



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SORONG



2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Dengan semangat dan kerja keras serta dukungan dari semua pihak, kami telah berhasil menyelesaikan program kegiatan pada Tahun 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong tahun 2020-2024.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong telah menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2023 dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Kegiatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 secara transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran/informasi secara utuh kepada masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan mengenai pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong pada Tahun 2023. Saran dan masukan yang positif dari semua pihak dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang, sangat kami harapkan.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong Tahun 2023 ini.

Sorong, 15 Januari 2024
Kepala Kantor,



Agung Budijono, SKM., MKM.
NIP. 197201291995031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

Laporan Kinerja ini secara garis besar memuat informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dan dicapai selama tahun 2023. Rencana Kinerja dan penetapan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong tahun 2023 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama setahun yakni tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024 yang telah disarikan dalam Indikator Kinerja Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Secara keseluruhan, dari tujuh indikator kinerja yang diperjanjikan, enam indikator kinerja tercapai, satu indikator kinerja tidak tercapai yaitu indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara. Capaian tujuh indikator kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong tahun 2023 sebagai berikut:

1. Indikator indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/plbdn tercapai 0,99 dari target 0,89 dengan persentase capaian kinerja 111,23%;
2. Indikator persentasi faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan tercapai 100% dari target 98% dengan persentase capaian kinerja 102,04%;
3. Indikator Indeks pengendalian faktor resiko di pintu masuk negara tercapai 1 dari target 0.95 dengan persentase capaian kinerja 105,26 %;
4. Indikator Nilai Kinerja Anggaran tercapai 82,84 dari target 87 dengan persentase capaian kinerja 95,21%;
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tercapai 89,92 dari target 95 dengan persentase capaian kinerja 94,65%;
6. Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker tercapai 85,77 dari target 77 dengan persentase capaian kinerja 111,39%;

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya, tercapai 80,56% dari target 90% sehingga capaian kinerjanya 89,51%.
8. Persentase Realisasi Anggaran, tercapai 97,61% dari target 95% sehingga capaian kinerjanya 102,74%.

Persentase capaian rata-rata tahun 2023 sebesar 101.50%

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong pada tahun 2023 diberikan pagu anggaran:

Jumlah Anggaran Program P2P sebesar = Rp. 12,559,814,000,-

Jumlah **Realisasi** Anggaran Program P2P Tahun 2023 : Rp. 12,259,070,878
,- (97.61%)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Isu Strategis.....	2
C. Visi dan Misi.....	7
D. Tugas Pokok dan Fungsi	10
E. Struktur Organisasi	11
F. Sumber Daya Manusia.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
1. BAB I Pendahuluan	14
2. BAB II Perencanaan Kinerja	15
3. BAB III Akuntabilitas Kinerja	15
A. Perencanaan Kinerja	17
B. Perjanjian Kinerja.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
1. INDIKATOR PERTAMA	15
a. Definisi Operasional	15
b. Rumus/Cara Perhitungan	18
c. Capaian Indikator	21
d. Upaya Yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Indikator	25
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	38
f. Kendala Masalah yang Dihadapi	39

g. Pemecahan Masalah	40
2. INDIKATOR DUA.....	42
a. Definisi Operasional.....	42
b. Rumus/Cara Perhitungan	45
c. Capaian Indikator	46
d. Upaya Yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Indikator.....	50
f. Analisis Penyebab Keberhasilan.....	60
g. Kendala Masalah yang Dihadapi	61
h. Pemecahan Masalah	62
i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	62
3. INDIKATOR TIGA.....	56
a. Definisi Operasional	56
b. Rumus/Cara Perhitungan	58
c. Capaian Indikator	66
d. Upaya Yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Indikator	69
e. Analisis Penyebab Keberhasilan	78
f. Kendala Masalah yang Dihadapi	79
g. Pemecahan Masalah.....	79
h. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	80
4. INDIKATOR EMPAT	83
a. Definisi operasional	83
b. Rumus/cara perhitungan	83
c. Capaian indikator.....	83
d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator	87
e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan.....	87
f. Kendala masalah yang dihadapi.....	87
g. Pemecahan masalah.....	87

h. Efisiensi penggunaan sumber daya	87
5. INDIKATOR LIMA	89
a. Definisi operasional	89
b. Rumus/cara perhitungan	90
c. Capaian Indikator	91
d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator	93
e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan	94
f. Kendala masalah yang dihadapi	95
g. Pemecahan masalah	95
h. Efisiensi penggunaan sumber daya	95
6. INDIKATOR ENAM	97
a. Definisi operasional	97
b. Rumus/cara perhitungan	97
c. Capaian Indikator	98
d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator	101
e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan	102
f. Kendala masalah yang dihadapi	102
g. Pemecahan masalah	102
h. Efisiensi penggunaan sumber daya	102
7. INDIKATOR TUJUH	105
a. Definisi operasional	105
b. Rumus/cara perhitungan	105
c. Capaian Indikator	105
d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan	108
e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator	108
f. Kendala masalah yang dihadapi	109
g. Pemecahan masalah	109

h. Efisiensi penggunaan sumber daya.....	109
8. INDIKATOR DELAPAN.....	112
a. Definisi Operasional.....	112
b. Rumus / Cara Perhitungan	112
c. Capaian Indikator.....	112
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Tindak Lanjut	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong Tahun 2021.....	5
------------	---	---

DAFTAR TABEL

TABEL 3. 1 Indikator Kinerja Tahun 2023 – 2024 Revisi.....	14
TABEL 3. 2 Capaian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong.....	15
TABEL 3. 3 Persentase Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Tahun 2023	19
TABEL 3. 4 Perhitungan Indeks	20
Tabel TABEL 3. 5 Perhitungan Indseks Parameter	20
TABEL 3. 6 Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Di KKP Kelas III Sorong	21
TABEL 3. 7 Pengawasan Faktor Risiko Penyakit Lainnya di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong.....	30
TABEL 3. 8 Pengendalian Faktor Risiko yang Ditemukan di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023	47
TABEL 3. 9 Persentase Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara.....	63
TABEL 3 10 Perhitungan Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara	64
TABEL 3. 11 Hasil Perhitungan Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara.....	65
TABEL 3 12 Nilai 13 Indikator IKPA tahun 2023	90
TABEL 3. 13 Nilai hasil desk kinerja implementasi WBK Satker	97
TABEL 3 14 Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2020 s.d 2023.....	106
TABEL 3. 15 Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja.....	116
TABEL 3. 16 Realisasi Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Satu	116
TABEL 3. 17 Realisasi Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Dua.....	118
TABEL 3. 18 Realisasi Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Tiga	119
TABEL 3. 19 Realisasi Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Empat.....	120
TABEL 3. 20 Realisasi Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Lima.....	122
TABEL 3. 21 Realisasi Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Enam	123
TABEL 3. 22 Realisasi Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Tujuh	124

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Distribusi Pegawai Per Wilayah Kerja Tahun 2023.....	13
Grafik 1. 2 Distribusi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Grafik 1.3 Distribusi PNS Berdasarkan Jabatan.....	14
Grafik 3. 1 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Indeks Deteksi Factor Risiko Penyakit Di Bandara/Pelabuhan/PLBDN Tahun 2023	21
Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Capaian Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan KKP Kelas III Sorong Tahun 2021 – 2023	23
Grafik 3. 3 Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut dan Lingkungan di KKP Kelas III Sorong Tahun 2023 dengan Target RAK Tahun 2024	24
Grafik 3. 4 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Indikator Satu KKP Kelas III Sorong dengan KKP Sejenis/Setara Tahun 2023	25
Grafik 3. 5 Distribusi Penafisan Pelaku Perjalanan Tiba/Berangkat di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023	26
Grafik 3. 6 Pengawasan ABK/Crew Pesawat Tiba/Berangkat di KKP Kelas III Sorong.....	28
Grafik 3. 7 Distribusi Pengawasan ICV pada Calon Jamaah Haji dan Umroh di KKP Kelas III Sorong Tahun 2023	29
Grafik 3. 8 Penerbitan <i>Port Health Quarantine Clearance</i> (PHQC) di KKP Kelas III Sorong Tahun 2023	31
Grafik 3. 9 Penerbitan COP di KKP Kelas III Sorong Tahun 2023.....	32
Grafik 3. 10 Pemeriksaan dan Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah (SIAJ) di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023.....	33
Grafik 3. 11 Pengawasan Tempat Pengolahan Pangan (TPP) di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023	34
Grafik 3. 12 Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023	36
Grafik 3. 13 Pengawasan TTU di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023	37
Grafik 3. 14 Capaian Pengendalian Faktor Risiko Tahun 2023 di KKP Kelas III Sorong.....	46

Grafik 3. 15 Persentase Capaian Pengendalian Faktor Risiko di KKP Kelas III Sorong Tahun 2023.....	47
Grafik 3. 16 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan KKP Kelas III Sorong tahun 2023 dengan Target RAK tahun 2024	48
Grafik 3. 17 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan KKP Kelas III Sorong dengan Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020 – 2024.....	49
Grafik 3. 18 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Faktor Risiko yang dikendalikan KKP Kelas III Sorong dengan KKP Kelas III Manokwari dan KKP Kelas III Biak.....	49
Grafik 3. 19 Distribusi Jumlah Pengendalian Faktor Risiko Pada Orang di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023	50
Grafik 3. 20 Distribusi Jenis Faktor Risiko Pada Orang yang Dikendalikan di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023	51
Grafik 3. 21 Distribusi Jenis Jenis Pengendalian FR pada Orang Tahun 2023 di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong.....	51
Grafik 3. 22 Jumlah Alat Angkut yang Ditemukan Adanya Vektor dan BPP Di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong	53
Grafik 3. 23 Pengendalian Faktor Risiko Nyamuk <i>Aedes Aegypti</i> di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023	56
Grafik 3. 24 Pengendalian Faktor Risiko Nyamuk Malaria di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023	57
Grafik 3. 25 Pengendalian Faktor Risiko Vektor Lalat di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023	59
Grafik 3. 26 Faktor Risiko Tikus yang Dikendalikan di KKP Kelas III Sorong Tahun 2023	60
Grafik 3. 27 Capaian Indeks Pengendalian Di Pintu Masuk Negara Di KKP Kelas III Sorong Pada Tahun 2023	66
Grafik. 3 28 Perbandingan Realisasi Dengan Kinerja Tahun Sebelumnya KKP Sorong Tahun 2021, 2022, 2023	67
Grafik 3. 29 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Pengendalian di Pintu Masuk Negara KKP Kelas III Sorong Tahun 2023 dengan Target RAK tahun 2024	67

Grafik 3. 30 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pengendalian di Pintu Masuk Negara antara KKP Kelas III Sorong dengan KKP Sejenis/Setara ...	68
Grafik 3. 31 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Indeks antara KKP Kelas III Sorong dengan KKP Sejenis/Setara	69
Grafik 3. 32 Sebaran Kasus Konfirmasi Kasus Sebagai Respon Sinyal SKD KLB di KKP Kelas III Sorong Tahun 2023.....	70
Grafik 3. 33 Target dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023	84
Grafik 3. 34 Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.....	84
Grafik 3. 35 Perbandingan Realisasi tahun 2020, 2021, 2023 dan target RAK tahun 2024.....	85
Grafik 3. 36 Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2023 KKP Sorong dan KKP Manokwari, KKP Biak dan KKP Posot 2021	86
Grafik 3. 37 Perbandingan Capaian Realisasi Nilai Kinerja dengan Renstra Kemenkes RI.....	86
Grafik 3. 38 Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	91
Grafik 3. 39 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2023.....	92
Grafik 3. 40 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dengan Target RAK	92
Grafik 3. 41 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dengan Satker Sejenis/Setara	93
Grafik 3. 42 Target dan Realisasi Implementasi WBK Satker	99
Grafik 3. 43 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Implementasi WBK Satker Tahun 2021 s.d 2023.....	99
Grafik 3. 44 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Implementasi WBK Satker Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah.....	100
Grafik 3. 45 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dengan Satker Sejenis/Setara	101
Grafik 3. 46 Perbandingan Capaian Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya Dengan Satker Sejenis.....	107

Grafik 3. 47 Perbandingan Realisasi Tahun 2020, 2021, 2023 dan Target Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya RAK Tahun 2020-2024	107
Grafik 3. 48 Perbandingan Realisasi Tahun 2020, 2021, 2023 dan Target Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya RAK Tahun 2020-2024	113
Grafik 3. 49 Realisasi Anggaran KKP Kelas III Sorong Tahun 2020 sampai dengan 2023.....	113
Grafik 3. 50 Perbandingan Indikator Persentase Realisasi Anggaran KKP Kelas III Sorong dengan Target RAK Tahun 2023	114
Grafik 3. 51 Perbandingan Indikator Persentase Realisasi Anggaran KKP Kelas III Sorong dengan Target Nasional Tahun 2023.....	114
Grafik 3. 52 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Realisasi Anggaran di KKP Kelas III Sorong; KKP Kelas III Manokwari; KKP Kelas III Biak; dan KKP Kelas III Poso Tahun 2023	114

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi
2. Kertas Kerja Perhitungan Kinerja
3. Realisasi Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, perngikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instanssi pemerintah.

SAKIP dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance/tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus result oriented goverment/ pemerintah yang berorientasi pada output/outcome. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas LAKIP. Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi pengukuran kinerja dan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi dan Kegiatan (RAK) Kantor

Kesehatan Pelabuhan kelas III Sorong tahun 2020-2024, khususnya target kinerja tahun 2023.

B. Isu Strategis

1. Pandemi COVID-19

COVID-19 sejak pertama ditemukan di Wuhan China pada akhir 2019 yang kemudian menjadi pandemi global hingga saat ini masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dunia. Setelah selama kurang lebih Indonesia menghadapi status pandemi COVID-19, Presiden RI Joko Widodo secara resmi mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia pada tanggal 21 Juni 2023 di Istana Merdeka, Jakarta melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Pada saat Keppres ini mulai berlaku sejumlah Keppres sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan tersebut adalah Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional, dan Keppres Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19 di Indonesia.

Dengan telah berakhirnya pandemi COVID-19 mengubah status faktual Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi penyakit endemi di Indonesia. Keputusan tersebut diambil sejalan dengan pencabutan status public health emergency of international concern (PHEIC) untuk COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Keputusan tersebut juga diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 di tanah air yang mendekati nihil. Memasuki masa endemi, Kepala Negara mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih.

Statu endemic COVID-19 tentunya membawa dampak positif terhadap perkembangan berbagai sektor di Indonesia, salah

satunya adalah sektor pariwisata. Hal ini akan berpengaruh terhadap lonjakan jumlah pelaku perjalanan/penumpang kapal dan pesawat ke daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata, sebagai contoh adalah Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat dan lain-lain. Peningkatan arus pelaku perjalanan yang sejalan dengan peningkatan lalu lintas alat angkut, memunculkan risiko penularan kasus COVID-19 kembali meskipun sudah berstatus endemic.

Pada periode 8-14 Oktober 2023 situasi COVID-19 di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan tren kasus. Kendati demikian, peningkatan tren kasus ini tidak diikuti dengan peningkatan rawat inap dan kematian. Kasus COVID-19 kali ini didominasi oleh subvarian EG.5. Subvarian EG.5 merupakan turunan dari varian omicron dan masuk dalam kategori variants of interest (VOI) atau varian yang memiliki mutasi genetik yang diprediksi dapat memengaruhi karakteristik klinis virus. Karakteristik dari subvarian ini, yakni dapat menyebabkan peningkatan kasus dan menghindari dari kekebalan sehingga lebih mudah menginfeksi tetapi tidak ada perubahan tingkat keparahan. Namun, adanya mobilisasi masyarakat saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat berpotensi terhadap lonjakan kasus COVID-19.

2. Cacar Monyet (*Mongkey Pox*)

Belum usai pandemik COVID-19, terdapat ancaman penyakit infeksi emerging lainnya yaitu penyakit Monkeypox. Penyakit Monkeypox merupakan emerging zoonosis yang disebabkan virus Monkeypox yang endemis di Afrika Tengah dan Afrika Barat. Penyakit ini dapat bersifat ringan dengan gejala yang berlangsung 2- 4 minggu, namun bisa berkembang menjadi berat hingga kematian (tingkat kematian 3 – 6 %). Di negara-negara endemis, monkeypox sebagian besar ditularkan melalui primata dan hewan pengerat.

Sejak Mei 2022, Monkeypox menjadi penyakit yang memerlukan perhatian kesehatan masyarakat global. WHO telah menerima notifikasi kasus monkeypox dari negara non endemis di 4 regional (Eropa, Amerika, Eastern Mediterranean, dan Western

Pacific) tanpa ada riwayat perjalanan dari negara endemis. Menurut data dari WHO, kasus cacar monyet ini semakin bertambah sejak 1 Januari 2022 dan jumlah kasusnya semakin bertambah hingga hari ini. Melansir Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang merupakan bagian dari Departemen Kesehatan & Layanan Kemanusiaan AS, penyakit cacar monyet ini tidak banyak ditemukan di beberapa negara, termasuk Amerika sendiri. Namun, kasus pertama ditemukan di Amerika pada tanggal 7 Mei 2022 yang dibawa oleh seseorang yang baru saja bepergian dari Nigeria. Kasus cacar monyet ini semakin berkembang dan data dari WHO menunjukkan bahwa ada lebih dari 3.413 laboratorium di 70 negara di dunia yang melaporkan kemunculan penyakit ini, Badan Kesehatan Dunia telah menetapkan cacar monyet ini sebagai darurat kesehatan global (Public Health Emergency Of International Concern).

Penyelidikan terus dilakukan untuk mengetahui pola penularan antar manusia di negara-negara non endemis tersebut. Dengan terkonfirmasi laporan kasus cacar monyet pertama di Singapura menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di Indonesia karena kemungkinan adanya importasi kasus akibat mobilitas penduduk yang tinggi baik melalui laut maupun udara dan kemungkinan adanya hewan penular Monkeypox di Indonesia, maka diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan di Indonesia.

Kasus pertama Monkeypox di Indonesia dilaporkan pada 20 Agustus 2022. Kementerian Kesehatan melaporkan satu warga negara Indonesia (WNI) terkonfirmasi menderita Monkeypox dengan riwayat perjalanan ke Belanda, Swiss, Belgia, dan Perancis (imported case). Dari hasil penyelidikan epidemiologi oleh tim Surveilans Dinas Kesehatan DKI Jakarta, diketahui bahwa pasien tidak memiliki hewan peliharaan. Selain penularan dari manusia ke hewan, ada risiko penularan dari manusia yang terinfeksi kepada hewan rentan (spill back). Di Indonesia belum ditemukan kasus pada hewan, sedangkan cukup banyak masyarakat yang hidup berdampingan dengan hewan peliharaan sehingga dikhawatirkan

ada potensi penularan balik (spill back) dan pembentukan reservoir hewan baru. Apabila Monkeypox sampai menular ke satwa liar, maka pengendalian akan menjadi sangat sulit dilakukan dan dapat menimbulkan wabah/KLB yang berulang pada manusia.

3. Malaria

Malaria adalah penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di beberapa wilayah Indonesia, terutama pada kawasan timur Indonesia. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, ada 443.530 kasus malaria di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut melonjak 45,60% dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 304.607 kasus. Kementerian Kesehatan sendiri menargetkan Indonesia bebas malaria di tahun 2030.

Pencapaian Indonesia Bebas Malaria 2030 didahului dengan seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus sudah mencapai bebas malaria sehingga daerah bebas malaria di tingkat provinsi dapat tercapai. Sebanyak 5 regional telah ditetapkan sebagai target eliminasi untuk mencapai bebas malaria. 5 regional tersebut yaitu regional pertama terdiri dari provinsi di Jawa dan Bali; regional kedua terdiri dari provinsi di Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat; regional ketiga terdiri dari provinsi di Kalimantan dan Maluku Utara, regional keempat terdiri dari provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur; dan regional kelima terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat.

Disisi lain, jumlah wilayah di Indonesia yang berhasil melakukan eliminasi malaria sebanyak 372 Kabupaten/Kota dari 514 kabupaten/kota atau 72% sudah dinyatakan mencapai eliminasi. Pada tahun 2022 Provinsi Papua menyumbang sebanyak 393.801 kasus positif malaria di Indonesia atau sebanyak 89% dari kasus nasional. Provinsi Papua Barat sendiri masih merupakan daerah endemis malaria dengan angka jumlah kasus malaria sebesar 19 kasus per 1000 penduduk dengan jumlah kasus sebanyak 9429 kasus malaria. Dari 7 kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua Barat terdapat 3 kabupaten yang masih merupakan

endemis tinggi. Ketiga kabupaten endemic tertinggi malaria yaitu kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Wondama, sedangkan Kabupaten Fak-fak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Pegunungan Arfak. Sementara itu Kabupaten Sorong Selatan telah dinyatakan lulus dalam penilaian eliminasi malaria tahun 2022 dan menjadi kabupaten pertama di tanah Papua yang telah dinyatakan kabupaten yang bebas malaria.

Ancaman sebaran kasus penyakit menular di Provinsi Papua Barat khususnya kota Sorong menjadi focus Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong melalui program kegiatan cegah tangkal penyakit. Selama pandemi COVID-19, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong bertugas dalam upaya to detect, to prevent, dan to respon terhadap penanggulangan COVID-19 di pintu masuk Negara. Dalam pelaksanaannya tenaga kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong melakukan identifikasi terhadap penumpang yang dicurigai mengidap COVID-19 serta melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko kesehatan. Selain itu upaya yang dilakukan adalah pengawasan terhadap alat angkut dan barang yang datang dari wilayah atau Negara terjangkit COVID-19 serta melaksanakan koordinasi dengan lintas sector terkait. Kegiatan deteksi dini dan respon terhadap ancaman masuknya penyakit di pintu masuk Negara ini dilakukan sesuai dengan perkembangan situasi ancaman penyakit baik di dunia maupun dalam negeri seperti sebaran wabah Monkeypox baru baru ini. Disamping itu, mengingat Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan wilayah endemis malaria, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong juga melaksanakan kegiatan screening aktif migrasi malaria guna mencegah kemungkinan wabah malaria akibat meningkatnya kasus malaria local maupun impor.

4. Virus NIPAH

Penyakit emerging zoonotik yang disebabkan oleh virus Nipah yang termasuk ke dalam genus Henipavirus dan famili Paramyxoviridae. Penyakit ini dapat ditularkan dari hewan, baik hewan liar atau domestik, dengan kelelawar buah yang termasuk ke

dalam famili Pteropodidae sebagai host alamiahnya. Tidak, penyakit virus Nipah pertama kali diidentifikasi berdasarkan laporan wabah yang terjadi pada peternak babi di sebuah desa di Sungai Nipah, Malaysia pada tahun 1998-1999 yang berdampak hingga Singapura. Dari wabah tersebut, dilaporkan 276 kasus konfirmasi dengan 106 kematian (CFR: 38,41%).

Sejak tahun 1998 hingga saat ini, telah dilaporkan sebanyak 700 kasus pada manusia dengan 407 kematian di 5 negara (Malaysia, Singapura, India, Bangladesh, dan Filipina). Sebagian besar kasus (48% atau 336 kasus) dan kematian (58,5% atau 238 kematian) dilaporkan di Bangladesh. Wabah terkini dilaporkan pada 4 Januari hingga 13 Februari 2023 di Bangladesh dengan 11 kasus (10 kasus konfirmasi dan 1 probable) dan 8 kematian (CFR: 73%). Dari 11 kasus yang ditemukan, 10 kasus memiliki riwayat konsumsi date palm sap (getah kurma) dan 1 kasus merupakan kasus kontak erat (dokter yang merawat salah satu kasus).

Hingga saat ini, belum dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Nipah pada manusia di Indonesia. Akan tetapi, beberapa penelitian atau publikasi telah menemukan adanya temuan virus Nipah pada kelelawar buah (genus Pteropus) pada beberapa negara termasuk Indonesia.

C. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu

“Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”.

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan menjabarkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan yakni **Mewujudkan**

Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko. Untuk mewujudkan visi tersebut **maka** Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong menetapkan 4 misi yaitu :

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Disamping itu Menteri Kesehatan telah mencanangkan 6 (enam) pilar transformasi kesehatan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 sebagai upaya percepatan Pembangunan kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan memerlukan suatu upaya transformasi sistem dan budaya organisasi Kementerian Kesehatan yang bersih, efektif, dan terpercaya sebagai organisasi pemerintah menuju birokrasi kelas dunia (world class government), serta tersedianya SDM kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing sebagai ASN profesional yang memenuhi profil Smart ASN meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, berjiwa hospitality dan entrepreneurship, serta memiliki jaringan luas. Pada tahun 2025, diharapkan. Kementerian Kesehatan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Upaya percepatan tujuan reformasi birokrasi menuju birokrasi berkelas dunia dilakukan dengan menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional dan berkarakter; berintegritas dan berkinerja tinggi; bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme; mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi; dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara; serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. KemenPANRB menghimpun dan mensyarkan nilai-nilai dasar instansi pemerintah menjadi 7 (tujuh) nilai

dasar yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, yang dihimpun dalam akronim BerAKHLAK. Penggunaan akronim BerAKHLAK bertujuan untuk lebih mudah diingat. Kementerian Kesehatan dituntut untuk menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN “BerAKHLAK” dengan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” secara utuh tanpa menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku sebagai kode etik. Kementerian Kesehatan dituntut melengkapi contoh perilaku sebagai kode perilaku yang relevan dengan konteks tugas fungsi masing-masing.

Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, diterapkan core values ASN “BerAKHLAK” dengan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Kementerian Kesehatan melakukan publikasi, sosialisasi, internalisasi Core Values “BerAKHLAK” kepada seluruh ASN di lingkungan kerja Kementerian Kesehatan sebagai implementasi penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja ASN dan tujuan organisasi pemerintah.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

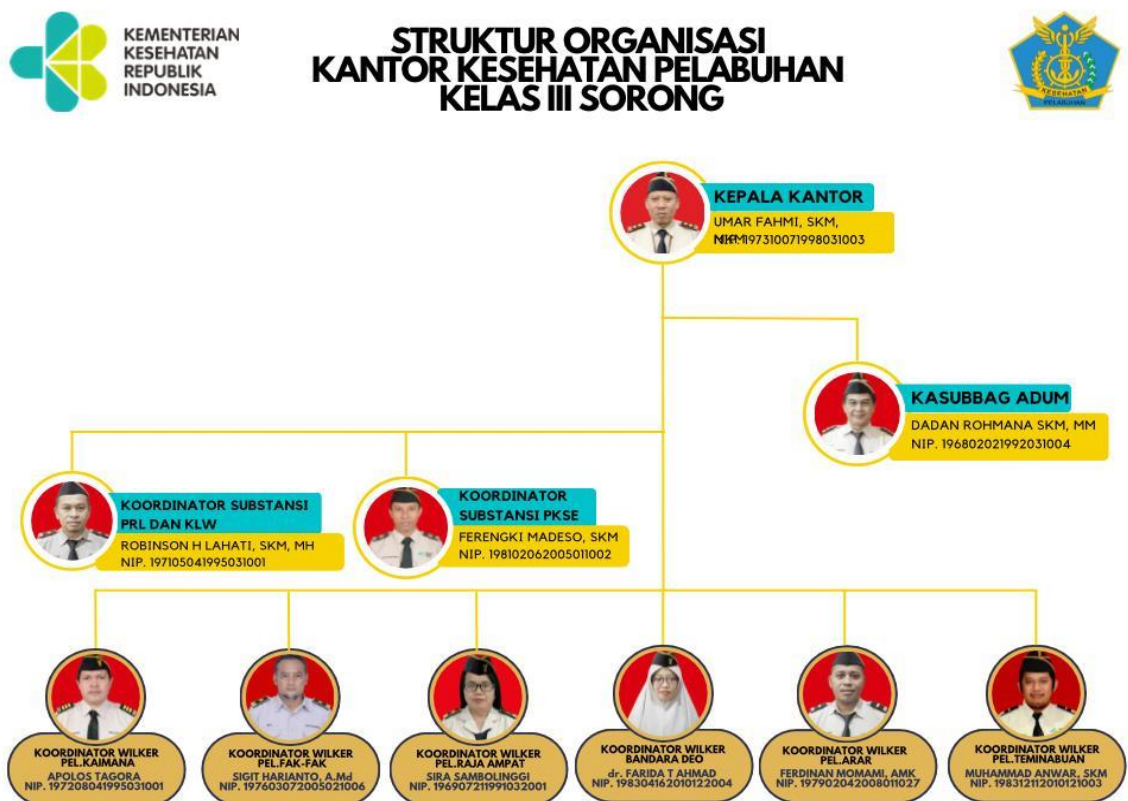
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP Kelas III Sorong mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Sorong dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;

- d. pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi KKP.

E. Struktur Organisasi



Adapun susunan organisasi KKP Kelas III Sorong terdiri dari:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi KKP Kelas III Soorong tahun 2023

1. Sub Bagian Administrasi Umum

Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

2. Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi dan penyakit dan penyakit potensial wabah serta penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

3. Substansi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah

Substansi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pelatihan teknis bidang pengendalian resiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

5. Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong terdiri atas :

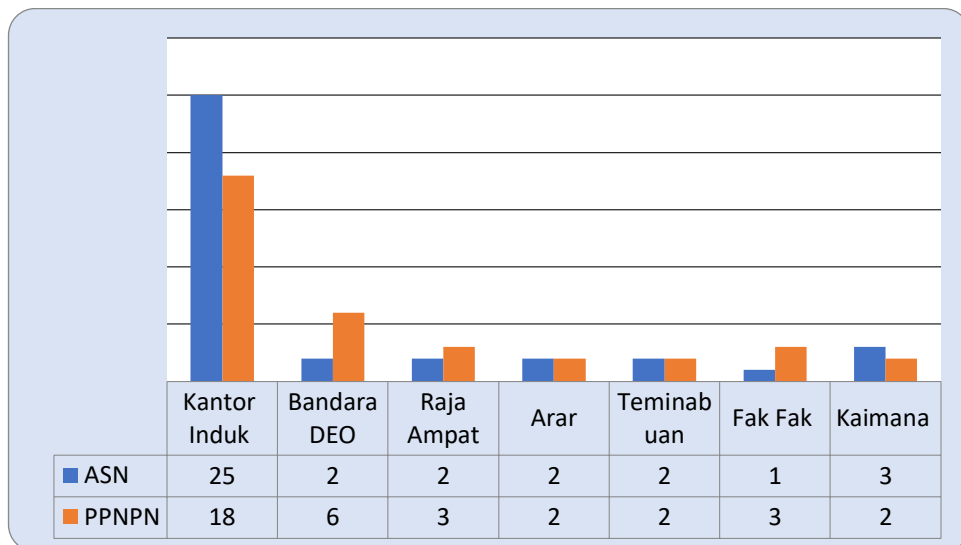
- a) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sorong (Kantor Induk)

- b) Wilayah Kerja Bandar Udara DEO Sorong
- c) Wilayah Kerja Pelabuhan Arar
- d) Wilayah Kerja Pelabuhan Khusus Sele
- e) Wilayah Kerja Pelabuhan Teminabuan
- f) Wilayah Kerja Pelabuhan Raja Ampat
- g) Wilayah Kerja Pelabuhan Fak-Fak
- h) Wilayah Kerja Pelabuhan Kaimana.

Dari delapan wilayah kerja tersebut terdapat satu wilayah kerja yang penanganannya di gabung yaitu wilayah kerja sele digabung dengan wilayah kerja Arar.

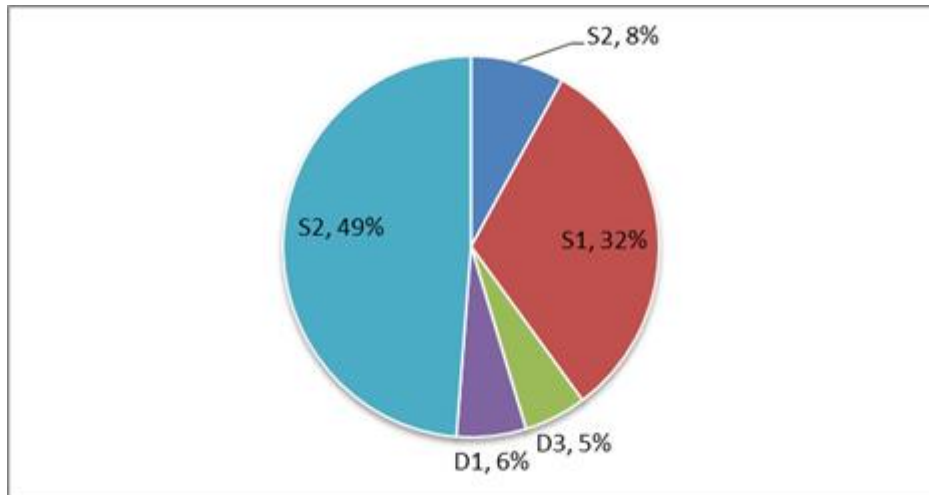
F. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong 31 Desember 2023 jumlah pegawai 37 (tiga puluh tujuh) orang, dan jumlah tenaga PPNPN sebanyak 36 orang dengan rincian distribusi per wilayah kerja sebagai berikut:

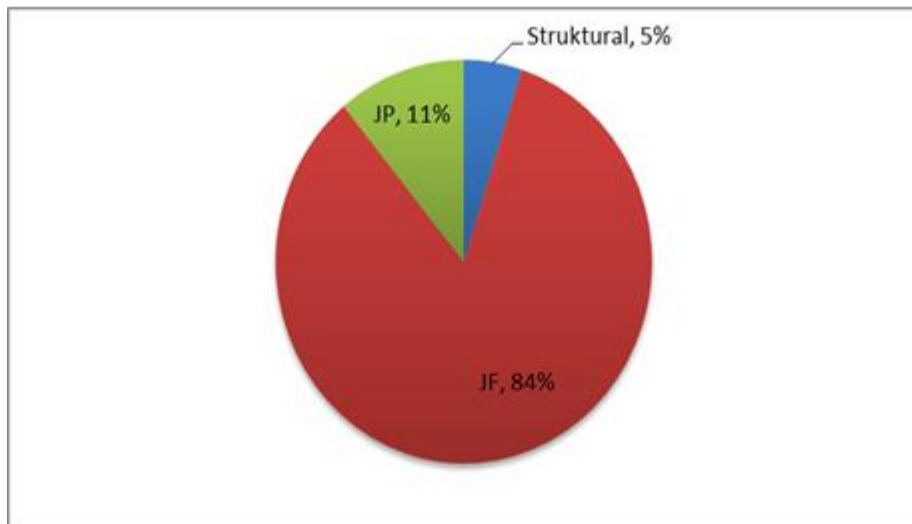


Grafik 1. 1 Distribusi Pegawai Per Wilayah Kerja Tahun 2023

Dari grafik diatas, diketahui penempatan pegawai terbanyak di Kantor Induk berjumlah 43 orang yang dapat di mobilisasi ke pelabuhan sorong, pelabuhan rakyat dan tenaga bantuan di wilker Bandar Udara DEO Sorong. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan dan jenis jabatan distribusi pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1. 2 Distribusi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong



Grafik 1 3 Distribusi PNS Berdasarkan Jabatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong

G. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong tahun 2021 disusun sesuai dengan Permenpan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi meliputi :

- a) Latar Belakang
- b) Visi dan Misi
- c) Tugas Pokok dan Fungsi
- d) Struktur Organisasi
- e) Sumber Daya Manusia
- f) Sistematika Penulisan

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

- a) Perencanaan Kinerja
- b) Perjanjian Kinerja

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Definisi Operasional
- 2) Rumus Cara Perhitungan
- 3) Capaian Indikator
- 4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
- 5) Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan
- 6) Kendala/masalah yang dihadapi
- 7) Pemecahan Masalah
- 8) Efisiensi penggunaan sumber daya

b) Realisasi Anggaran

Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen perjanjian kinerja. Pada sub bab ini realisasi anggaran diuraikan per masing-masing indikator.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah menyusun Rencana Aksi Program (RAP) 2020-2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dan RPJMN tahun 2020-2024. Selanjutnya Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas III Sorong Menyusun Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020-2024 yang telah mengacu pada Rencana Aksi Program P2P.

Selaras dengan sasaran program P2P dalam Rencana Aksi Program P2P tahun 2020-2024, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong adalah “ Meningkatkan Pelayanan Kekearifantinaan Kesehatan Di Pintu Masuk Negara dan Wilayah “ sasaran strategis ini ditandai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yakni :

1. Indeks deteksi faktor risiko penyakit di bandara/pelabuhan/PLBDN sebesar 0.93 pada akhir tahun 2024
2. Persentasi faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 99% pada akhir tahun 2024
3. Indeks pengendalian faktor resiko di pintu masuk Negara sebesar 0.97 pada akhir tahun 2024
4. Nilai kinerja anggaran yaitu 90 Pada akhir tahun 2024
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu 96% pada akhir tahun 2024
6. Kinerja Implementasi WBK Satker yaitu 78 pada akhir tahun 2024
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya yaitu 95% pada akhir tahun 2024

TABEL 2. 1 Indikator Kinerja Tahun 2020 - 2024

No	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target				
		2020	2021	2023	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan (Sebelum Revisi)	865.307	1.300.080	0,88	0,89	0,93
	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan / PLBDN (Setelah Revisi)					
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90 %	95 %	97%	98%	99%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	85 %	90 %	0,93	0,95	0,97
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	87	90
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80	92	93	95	96
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	76	77	78
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Setelah Revisi)	45 %	80 %	85	90%	95%
8	Persentase Realisasi Anggaran	-	-	-	95%	95%

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

TABEL 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan / PLBDN	0,89
2		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	98%
3		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	0,95
4	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit	Nilai kinerja anggaran	87
5		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95
6		Kinerja implementasi WBK satker	77
7		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	90%
8		Persentase Realisasi Anggaran	95%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pengukuran kinerja sendiri memiliki manfaat antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan Penetapan Kinerja (PK).

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Sorong yang telah ditetapkan. Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong adalah meningkatnya pelayanan kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.

Indikator Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong pada RAK awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2023 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Selain itu terdapat penambahan indikator yaitu Persentase Realisasi Anggaran sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor PR.03.02/C.I/1142/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penambahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan target indikator sebesar 95%. Secara lengkap indikator revisi tahun 2023-2024 sebagai berikut:

TABEL 3. 1 Indikator Kinerja Tahun 2023 – 2024 Revisi

Indikator Tahun 2022-2024 (Semula)	Indikator Tahun 2023-2024 (revisi)
Indeks Deteksi Factor Risiko Penyakit Di Bandara/Pelabuhan/PIbdn	Indeks Deteksi Factor Risiko Penyakit Di Bandara/Pelabuhan/PIbdn
Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan	Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara
Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kinerja Implementasi WBK Satker	Kinerja Implementasi WBK Satker
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
	Persentase Realisasi Anggaran

Target Indikator Kinerja tahun 2022 terdapat 7 indikator sedangkan untuk tahun 2023 terdapat revisi yaitu tambahan indikator ke 8 yaitu Persentase Realisasi Anggaran. Besaran target dan realisasi masing-masing indikator sebagaimana tertera pada tabel berikut:

TABEL 3. 2 Capaian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Deteksi Factor Risiko Penyakit Di Bandara/Pelabuhan/Plbdn	0,89	0,99	111,23%
2	Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan	98%	100%	102,04%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara	0,95	1	105,26%
4	Nilai Kinerja Anggaran	87	82,84	95,21%
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	89,92	95%
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	77	85,77	111,39%
7	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	90%	80,56%	89,51%
8	Persentase Realisasi Anggaran	95%	97,61%	102,74%
	Rata-Rata Persentase Capaian			101,50%

Uraian kinerja dari masing-masing indicator adalah sebagai berikut:

1. INDIKATOR PERTAMA

Indeks deteksi factor risiko penyakit di bandara/pelabuhan/PLBDN

a. Definisi Operasional

Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini factor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

1) Pengawasan Orang yang Diperiksa Sesuai Standar

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari pengamatan tanda dan gejala penyakit berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM)

melalui pengamatan suhu tubuh menggunakan *thermalscanner* serta pemeriksaan dokumen kesehatan sesuai dengan aturan perjalanan yang berlaku di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong (*scan barcode* aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan status vaksinasi) pada pelaku perjalanan baik penumpang maupun ABK/Crew Pesawat dan pengawasan *International Certificate Vaccination* pada calon Jamaah Haji dan Umroh. Selain pengawasan di atas, pengawasan orang yang dilakukan juga termasuk pada komunitas Pelabuhan yang tercatat meliputi pengawasan pemberian Vaksin COVID-19, pemeriksaan antigen COVID-19, pemeriksaan screening TB, pemeriksaan screening HIV, pemeriksaan Malaria, kunjungan poliklinik KKP dan pemberian KIR.

2) Persentase Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar

Pemeriksaan alat angkut sebagaimana dijelaskan dalam SOP Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara Tahun 2009, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan alat angkut dalam rangka penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) dan *Certificate of Pratique* (COP). PHQC merupakan dokumen kesehatan kapal yang diterbitkan sebagai syarat alat angkut kapal dapat melakukan aktifitas pelayaran dari Pelabuhan asal ke Pelabuhan tujuan. PHQC menandakan bahwa alat angkut tersebut bebas dari factor risiko. Sedangkan COP adalah dokumen kesehatan kapal yang diterbitkan pada kapal luar negeri atau kapal dari daerah terjangkau yang masuk ke wilayah kerja KKP Kelas III Sorong tahun 2023 setelah dinyatakan bebas factor risiko. Sebelum COP diterbitkan, kapal harus menyerahkan dokumen *Maritime Declaration of Health* (MDH) dengan jawaban tidak (No) pada semua pernyataan yang ada dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan lain yang mendukung.

3) Persentase Barang yang Diperiksa Sesuai Standar

Pemeriksaan barang dilakukan terhadap jenazah yang akan diangkut dengan alat angkut kapal dan pesawat. Prosedur pengawasan pengangkutan jenazah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan

Pelabuan Dalam Rangka karantina Kesehatan, antara lain jenazah harus disuntik dengan obat penahan busuk secukupnya, jenazah harus dimasukkan dalam peti yang dibuat dari logam dan alasnya ditutup dengan bahan yang menyerap serta peti ditutup rapat-rapat lalu dimasukkan kedalam peti kayu. Selain itu terdapat syarat administrasi yang harus dilengkapi seperti rekam medis dari dokter yang memastikan bahwa sebab kematian bukan karena penyakit menular dan semua dokumen yang bersangkutan.

4) Persentase Lingkungan yang Diperiksa Sesuai Standar

a) Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU)

Pemeriksaan TTU dilakukan sesuai standar berdasarkan Permenkes No.70 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri. TTU berupa gedung/bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan fisik berupa penilaian kondisi hygiene dan sanitasi gedung/bangunan dan lingkungan serta menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

b) Pemeriksaan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

Pemeriksaan TPP dilakukan sesuai standar berdasarkan Permenkes No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Mulai pemeriksaan hygiene bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengelolaan makanan, hingga penyajian makanan. Seluruh aspek lingkungan baik fisik tempat, peralatan maupun penjamah juga diperhatikan dalam pemeriksaan ini.

c) Pemeriksaan Sarana Air Bersih (SAB)

Pemeriksaan SAB dilakukan sesuai standar berdasarkan Permenkes 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan fisik, pengambilan sampel air minum untuk dilakukan pengujian laboratorium baik bakteriologi maupun kimia. Pengawasan dimulai dari titik sumber air yang didistribusikan sampai ke titik yang diterima oleh konsumen yang

ada di tempat pengelolaan makanan dan air-air kran yang berada di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong.

d) Survei Vektor

Berdasarkan Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya, tujuan pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di wilayah pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara adalah untuk meniadakan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan surveilans vektor secara rutin minimal sebulan sekali atau sesuai kebutuhan yang terdiri dari survei tikus pinjal, larva *Anopheles*, kecoa, lalat dan HI Perimeter.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara yang terdiri dari orang, barang, alat angkut, dan lingkungan yang dilakukan pemeriksaan oleh KKP Kelas III Sorong.

b. Rumus/Cara Perhitungan

1) Menghitung Persentase Masing-Masing Parameter

Persentase masing-masing parameter diperoleh dengan akumulasi jumlah pemeriksaan penapisan orang, alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, air dan udara) dibagi dengan target masing-masing parameter yang telah ditentukan kemudian dikalikan 100%.

$$A = \frac{a1}{a} \times 100\%$$

Keterangan :

A : Persentase pemeriksaan orang

a1 : Jumlah pemeriksaan orang

a : Target jumlah pemeriksaan orang

$$B = \frac{b1}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

B : Persentase pemeriksaan alat angkut

b1 : Jumlah pemeriksaan alat angkut

b : Target jumlah pemeriksaan alat angkut

$$C = \frac{c1}{c} \times 100\%$$

Keterangan :

C : Persentase pemeriksaan barang

c1 : Jumlah pemeriksaan barang

c : Target jumlah pemeriksaan barang

$$D = \frac{d1}{d} \times 100\%$$

Keterangan:

D : Persentase pemeriksaan pemeriksaan lingkungan

d1 : Jumlah pemeriksaan pemeriksaan lingkungan

d : Target jumlah pemeriksaan pemeriksaan lingkungan

Dari rumus di atas diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL 3. 3 Persentase Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Tahun 2023

No.	Parameter	Target 2023	Capaian 2023	Persentase %
1	Pemeriksaan orang yang diperiksa sesuai standar	1.920.000	2.288.678	119%
2	Pemeriksaan alat angkut yang diperiksa sesuai standar	13.500	15.849	117%
3	Pemeriksaan barang yang diperiksa sesuai standar	144	182	121%
4	Pemeriksaan lingkungan yang diperiksa sesuai standar	1.704	3.025	121%

2) Menghitung Indeks

Hasil perhitungan persentase masing-masing parameter selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel perhitungan indeks pada kolom "baseline". Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi nilai score maksimal dikurang score minimal.

TABEL 3. 4 Perhitungan Indeks

No.	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov. Max	Score Max	Minimal	Score Min
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Presentase orang yang diperiksa sesuai	5		0	0.00	100	120	600	0	0
2	Presentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5		0	0.00	100	120	600	0	0
3	Presentase barang yang diperiksa sesuai	3		0	0.00	100	120	360	0	0
4	Presentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5		0	0.00	100	120	600	0	0
Nilai Empiris					a	Score Max		b	Score Min	c

Keterangan :

- Bobot : Dihitung berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)
- Baseline : Persentase pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan
- Coverage : Nilai baseline dibagi nilai maksimal dikalikan 100
- Score : Bobot dikalikan coverage
- Maksimal : Nilai maksimal 100
- Cov. Max : Coverage maksimal sama dengan 120%
- Score Max : Bobot dikalikan coverage maksimal
- Minimal : Nilai minimal 0
- Score Min : Bobot dikalikan nilai minimal

Rumus Indeks:

$$Indeks = \frac{a}{b - c}$$

Dimana :

- a : Nilai Empiris (jumlah coverage)
- b : Nilai Score Maximal (jumlah score max)
- c : Nilai Score Minimal (jumlah score minimal)

Dari rumus diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel TABEL 3. 5 Perhitungan Indeks Parameter

No.	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov. Max	Score Max	Minimal	Score Min
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Presentase orang yang diperiksa sesuai	5	119	119	595	100	120	600	0	0
2	Presentase alat angkut yang diperiksa sesuai	5	117	117	585	100	120	600	0	0
3	Presentase barang yang diperiksa sesuai	3	120	120	360	100	120	360	0	0
4	Presentase lingkungan yang diperiksa sesuai	5	120	120	600	100	120	600	0	0
TOTAL					2,140			2160		0

Sehingga:

$$I = \frac{2140}{2160 - 0}$$

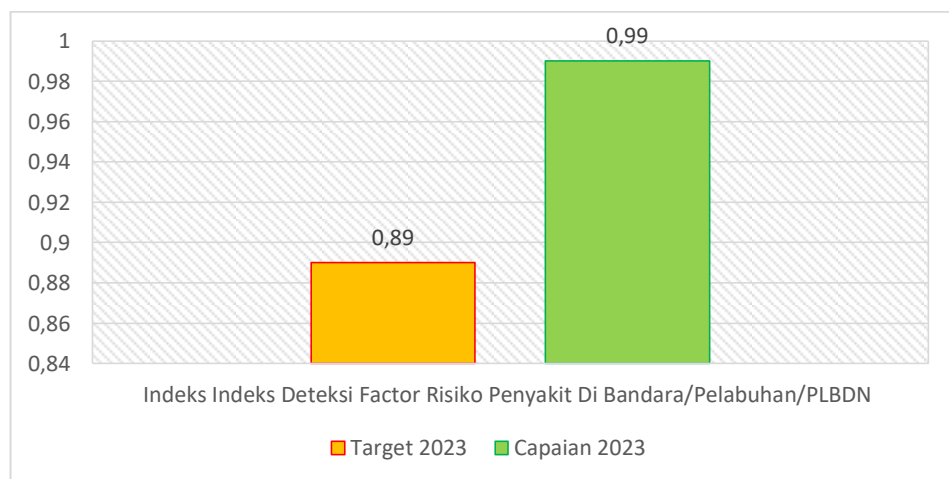
$$I = \frac{2140}{2160}$$

$$I = 0.9907$$

Jadi perolehan indeks deteksi factor risiko penyakit di bandara/pelabuhan/PLBDN tahun 2023 adalah 0,99.

c. Capaian Indikator

Indikator indeks deteksi factor risiko penyakit di bandara/pelabuhan/PLBDN sesuai standar kekarantinaan kesehatan di KKP Kelas III Sorong pada tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditentukan yakni 0,89. Realisasi indicator indeks deteksi factor risiko penyakit di bandara/pelabuhan/PLBDN pada tahun 2023 sebesar 0,99 (111,23%).



Grafik 3. 1 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Indeks Deteksi Factor Risiko Penyakit Di Bandara/Pelabuhan/PLBDN Tahun 2023

Adapun rincian jumlah pemeriksaan berdasarkan jenis pemeriksaannya tertuang dalam tabel berikut:

TABEL 3. 6 Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Di KKP Kelas III Sorong

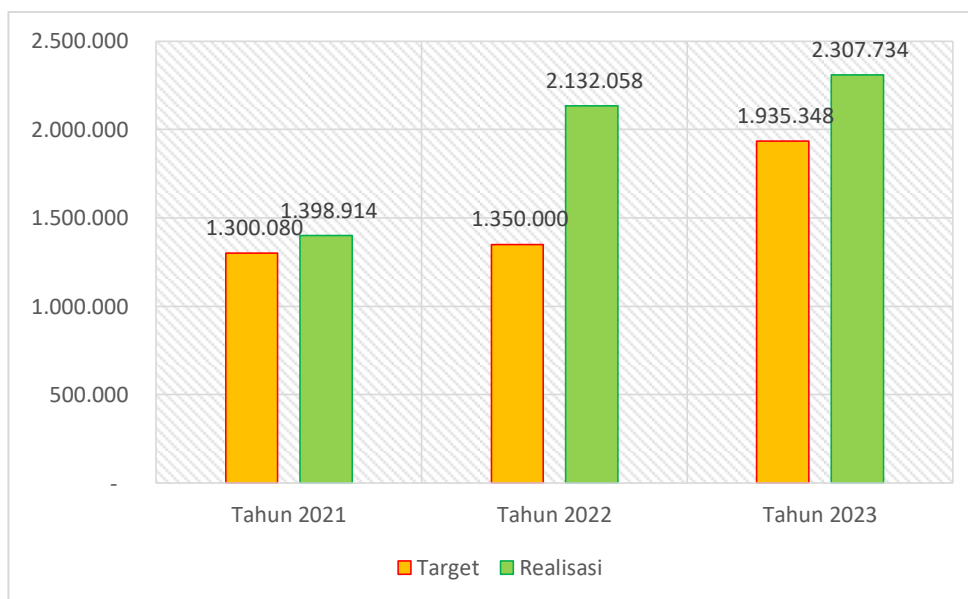
NO	SUMBER DATA	TOTAL
A PEMERIKSAAN FR PADA ORANG		
1	PENGAWASAN PENUMPANG KAPAL	
	a. Penumpang Naik	439,312
	b. Penumpang Turun	460,376
2	PENUMPANG PESAWAT	-
	a. Penumpang Naik	575,155
	b. Penumpang Turun	594,038
3	PENGAWASAN ABK KAPAL	-
	a. ABK Kapal Dalam Negeri	186,737
	b. ABK Kapal Luar Negeri	341
4	PENGAWASAN CREW PESAWAT	-
	a. Crew Pesawat Dalam Negeri	31,568
	b. Crew Pesawat Luar Negeri	-
5	PENGAWASAN LAIN-LAIN	-
	a. Pemberian Vaksin COVID 19	-
	b. Pemeriksaan Antigen	-
	c. Pemeriksaan Screening TB	364
	d. Pemeriksaan Screening HIV	364
	e. Pemeriksaan Malaria	423
	JUMLAH	2,288,678
B PEMERIKSAAN FR PADA ALAT ANGKUT		
1	PHQC	15,817
3	COP	32
	JUMLAH	15,849
C PEMERIKSAAN FR PADA BARANG		
1	PEMERIKSAAN JENAZAH/KERANGKA	182
	JUMLAH	182
D PEMERIKSAAN FR PADA LINGKUNGAN		
1	TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP)	605
2	PEMERIKSAAN AIR BERSIH	1,258
3	TEMPAT TEMPAT UMUM	1,078
4	VEKTOR	84
	JUMLAH	3,025
	Total	2,307,734

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pemeriksaan orang merupakan yang tertinggi dibandingkan pemeriksaan parameter lainnya. Capaian jumlah pemeriksaan orang dan barang oleh KKP Kelas III Sorong sejalan dengan kenaikan lalu lintas alat angkut yang datang dan keluar wilayah Kota Sorong - Papua Barat melalui pintu masuk Pelabuhan dan Bandara. Hal ini berhubungan dengan situasi kasus COVID-19 Nasional sepanjang tahun 2023 cenderung melandai. Disamping itu Pemerintah secara resmi telah mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia pada tanggal 21 Juni 2023 melalui Keputusan Presiden

Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.

1) Perbandingan Realisasi Dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi jumlah pemeriksaan orang, barang, alat angkut dan lingkungan 3 tahun terakhir, realisasi jumlah pemeriksaan pada tahun 2023 lebih tinggi dari capaian tahun 2021. Adapun grafik perbandingannya sebagai berikut:

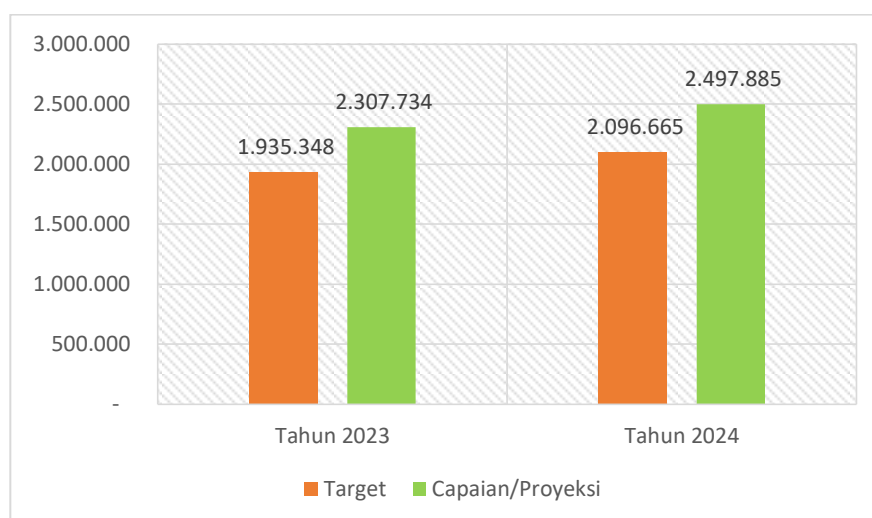


Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Capaian Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan KKP Kelas III Sorong Tahun 2021 – 2023

Capaian indicator pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Peningkatan arus pergerakan pelaku perjalanan dan alat angkut keluar dan masuk wilayah Sorong – Papua Barat sejalan dengan temuan harian kasus positif COVID-19 tahun 2023 yang sudah menurun. Disamping itu juga pencabutan status pandemi menjadi endemic COVID-19 oleh pemerintah pada bulan Juni 2023 berdampak pada kembali normalnya arus lalu lintas alat angkut, meskipun tetap dianjurkan waspada dan membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini meningkatkan antusiasme Masyarakat melakukan perjalanan baik dalam rangka pariwisata atau tujuan lainnya.

2) Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang tertuang dalam revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Sorong tahun 2020-2024, capaian indikator ini juga telah melampaui target tahun 2024 sebesar 2.096.665 dengan besaran realisasi yaitu 2.307.734 (110%). Adapun proyeksi kenaikan jumlah pemeriksaan orang, barang, alat angkut dan lingkungan pada tahun 2024 adalah 2.497.885 meningkat 8,2% dari tahun 2023. Proyeksi kenaikan ini dihitung menggunakan rumus proyeksi dengan Metode Geometrik.

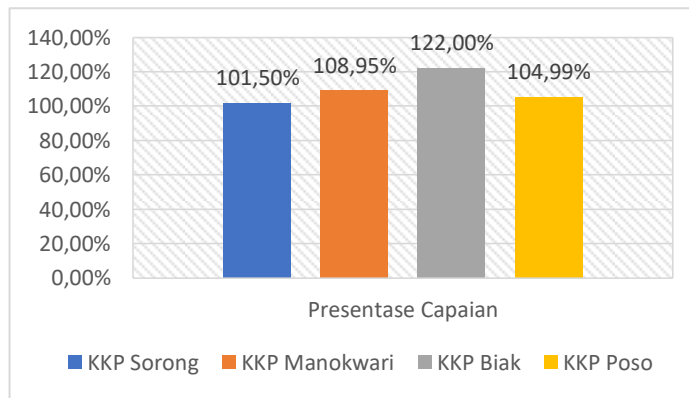


Grafik 3. 3 Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut dan Lingkungan di KKP Kelas III Sorong Tahun 2023 dengan Target RAK Tahun 2024

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Pada Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Ditjen P2P Tahun 2020-2024 tidak terdapat indikator pemeriksaan orang, barang, alat angkut dan lingkungan, namun demikian indikator ini mendukung target indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 97%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Organisasi Sejenis/Setara



Grafik 3. 4 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Indikator Satu KKP Kelas III Sorong dengan KKP Sejenis/Setara Tahun 2023

Berdasarkan grafik persentase capaian kinerja pada indikator satu, masing-masing KKP telah melebihi target yang ditetapkan. KKP dengan persentase capaian kinerja indikator satu tertinggi adalah KKP Kelas III Biak dengan 122%.

d. Upaya Yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Indikator

Upaya/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan adalah:

1) Kegiatan Penapisan/Pengawasan Orang yang Datang/Keluar Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong

a) Pengawasan Penumpang Alat Angkut Kapal dan Pesawat

Sasaran kegiatan ini adalah pelaku perjalanan yang terdiri dari penumpang baik melalui transportasi laut maupun udara yang tiba/berangkat di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong. Penapisan dilakukan kepada pelaku perjalanan kapal dan pesawat yang melakukan perjalanan domestic maupun internasional. Kegiatan yang dilakukan selama pengawasan pelaku perjalanan adalah dengan menggunakan scanner suhu tubuh dan pemeriksaan dokumen kesehatan di Pelabuhan maupun Bandara. Pemeriksaan dokumen kesehatan diantaranya adalah surat keterangan negatif COVID-19, e-HAC, sertifikat vaksin COVID-19 dan dokumen kesehatan lainnya yang dipersyaratkan bagi pelaku perjalanan.

Adapun jumlah pelaku perjalanan baik yang datang maupun keluar yang dilakukan pengawasan pada tahun ini adalah sejumlah 2.068.881 orang yang terdiri dari 1.014.467 penumpang berangkat dan 1.054.414 penumpang tiba. Adapun distribusi jumlah pelaku perjalanan yang datang setiap bulan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Grafik 3. 5 Distribusi Penafisan Pelaku Perjalanan Tiba/Berangkat di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah penumpang tiba dan berangkat di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong paling rendah terjadi pada bulan Februari 2023 yaitu sejumlah 45.682 penumpang berangkat dan 59.968 orang tiba kemudian di bulan berikutnya berangsur mengalami peningkatan kembali. Jumlah pengawasan tertinggi terhadap pelaku perjalanan di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong dilaksanakan pada bulan Desember 2023 dengan jumlah orang berangkat adalah 115.053 orang dan 117.978 orang tiba. Peningkatan jumlah penumpang alat angkut di Bulan Desember 2023 merupakan dampak dari momen arus mudik libur dan cuti bersama menjelang Natal 2023 dan tahun baru 2024. Bisa kita lihat juga di awal tahun 2023 dampak dari arus mudik tahun baru 2023 lalu lintas penumpang juga cukup

tinggi jika dibandingkan bulan lainnya yaitu >100.000 penumpang baik tiba maupun berangkat. Sedangkan kenaikan penumpang pada bulan Juli 2023 (>100.000 penumpang tiba dan berangkat) dibandingkan bulan sebelum dan sesudahnya merupakan dampak dari dicabutnya secara resmi status pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi endemic oleh pemerintah pada bulan Juni 2023. Kembali normalnya arus lalu lintas memicu antusiasme Masyarakat melakukan perjalanan dengan berbagai tujuan.

b) Pengawasan ABK Kapal dan Crew Pesawat

Sasaran kegiatan ini adalah Anak Buah Kapal (ABK) dan Crew Pesawat yang tiba/berangkat di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong. Penapisan dilakukan ABK dan crew pesawat yang melakukan perjalanan domestic maupun internasional. Kegiatan yang dilakukan selama pengawasan ABK dan crew pesawat adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan ABK/Crew pesawat secara umum seperti pemeriksaan sertifikat vaksin COVID-19, suhu tubuh, saturasi oksigen, tekanan darah serta dokumen penunjang lain yang terkait (Vaccination List).

Adapun jumlah ABK/Crew pesawat yang dilakukan pengawasan baik yang datang dalam negeri maupun luar negeri pada tahun ini adalah sejumlah 218.646 orang yang terdiri dari 218.305 ABK/Crew pesawat dalam negeri dan 341 orang dari luar negeri. Adapun distribusi jumlah ABK/Crew pesawat yang datang setiap bulan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :



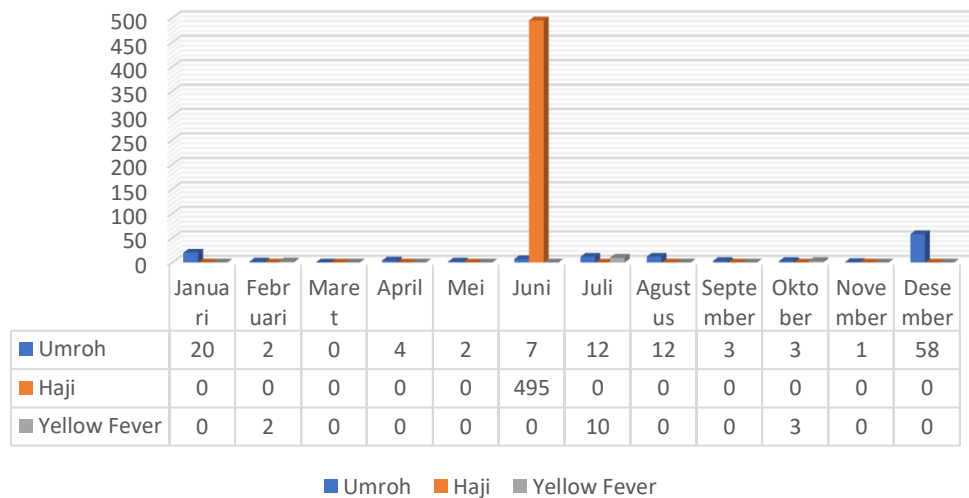
Grafik 3. 6 Pengawasan ABK/Crew Pesawat Tiba/Berangkat di KKP Kelas III Sorong

c) Pemeriksaan *International Certificate Vaccination (ICV)*

Pemeriksaan ICV dilakukan pada calon Jamaah Haji, Umroh dan pemberian vaksin Yellow Fever yang berangkat dari wilayah kerja KKP Kelas III Sorong. Kegiatan yang melekat pada pemeriksaan ICV antara lain adalah screening pemeriksaan kesehatan meliputi suhu tubuh, saturasi oksigen, tekanan darah, test kehamilan bagi pasangan usia subur dan penerbitan sertifikat vaksin COVID-19 serta penerbitan *International Certificate Vaccination (ICV)*.

Adapun jumlah calon Jamaah Haji, Umroh dan pelayanan vaksinasi Yellow Fever yang telah dilakukan pengawasan adalah sejumlah 634 orang yang terdiri dari 495 orang calon Jamaah Haji, 124 orang calon Jamaah Umroh dan 15 pelayanan vaksinasi Yellow Fever. Sebaran pengawasan ICV pada calon Jamaah Haji, Umroh dan vaksinasi Yellow Fever sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pelayanan Vaksinasi dan ICV Tahun 2023



Grafik 3. 7 Distribusi Pengawasan ICV pada Calon Jamaah Haji dan Umroh di KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Berdasarkan capaian pengawasan ICV di atas diketahui bahwa realisasi pengawasan tertinggi dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sejumlah 502 pengawasan. Menurunnya pelaksanaan vaksinasi meningitis kepada calon Jamaah Umroh dikarenakan adanya kebijakan Kementerian Kesehatan yang menetapkan bahwa vaksin meningitis tidak lagi menjadi syarat wajib bagi calon jemaah yang akan melakukan umrah. Vaksin meningitis hanya diwajibkan untuk calon jemaah haji tercantum dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/9325/2022 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah, yang diterbitkan pada 11 November 2022.

d) Pengawasan Lain-Lain

Pengawasan deteksi factor risiko di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong dilakukan terhadap beberapa factor risiko penyakit meliputi pengawasan pemberian Vaksin COVID-19, pemeriksaan antigen COVID-19, pemeriksaan screening TB, pemeriksaan screening HIV, dan pemeriksaan Malaria. Adapun distribusi pengawasan factor risiko tersebut di atas adalah sebagai berikut:

TABEL 3. 7 Pengawasan Faktor Risiko Penyakit Lainnya di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong

A	PEMERIKSAAN FR PADA ORANG	JUMLAH
1	PENGAWASAN LAIN-LAIN	-
	a. Pemberian Vaksin COVID 19	-
	b. Pemeriksaan Antigen	-
	c. Pemeriksaan Screening TB	364
	d. Pemeriksaan Screening HIV	364
	e. Pemeriksaan Malaria	423
	TOTAL	1,151

Pemeriksaan TB dan HIV dilaksanakan berkolaborasi dengan Puskesmas yang berbatasan dengan wilayah kerja KKP Kelas III Sorong. Adapun total pemeriksaan TB dan HIV pada tahun 2023 masing-masing sebanyak 364 pemeriksaan pada komunitas Pelabuhan dan bandara. Sedangkan pemeriksaan screening Malaria dilakukan pada ABK Kapal dengan total pemeriksaan pada tahun 2023 sebanyak 423 pemeriksaan.

2) Kegiatan Pemeriksaan Faktor Risiko Pada Alat Angkut

a) Penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC)

Penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong dilakukan setelah pengawasan factor risiko pada kapal saat kedatangan/keberangkatan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Faktor risiko yang diawasi meliputi kesehatan penumpang, sanitasi dan tanda keberadaan vector pada kapal, kelengkapan P3K kapal serta kelengkapan dokumen kesehatan kapal yang dimiliki. Adapun penerbitan PHQC di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong ditunjukkan pada grafik berikut:



Grafik 3. 8 Penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* di KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Penerbitan PHQC mengalami tren peningkatan pada semester kedua tahun 2023 yaitu pada bulan Juli hingga Desember 2023. Jumlah penerbitan tertinggi dilakukan pada bulan Desember 2023 yaitu sejumlah 1.720 dokumen, hal ini dikarenakan peningkatan lalu lintas kapal pada situasi khusus menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Jumlah penerbitan terendah terjadi pada bulan Juli 2023 yaitu sebanyak 1.034 dokumen. Penerbitan dokumen PHQC berkorelasi dengan jumlah kapal dan jumlah penumpang di kedatangan/keberangkatan.

b) Penerbitan *Certificate of Pratique (COP)*

Penerbitan *Certificate of Pratique (COP)* dilakukan pada kapal luar negeri yang masuk ke wilayah kerja KKP Kelas III Sorong tahun 2023. Pengawasan dilakukan terhadap factor risiko yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMD). Pengawasan alat angkut dari luar negeri dilakukan dengan pemeriksaan *Maritime Declaration of Health (MHD)* yang dikeluarkan oleh Nahkoda Kapal. Apabila tidak terdapat pernyataan dari MHD yang berpotensi menjadi factor risiko maka petugas karantina melakukan *Boarding* pada kapal yang berada pada zona karantina. Pada kapal dilakukan

pemeriksaan dokumen kesehatan secara verbal terkait kelengkapan dan validitas dokumen. Apabila dokumen kesehatan lengkap dan valid, maka petugas akan melanjutkan pemeriksaan factor risiko lingkungan yaitu sanitasi dan keberadaan vector pada kapal. Selama tahun 2023 tidak ditemukan factor risiko pada alat angkut kapal dari luar negeri sehingga diterbitkan COP. Adapun jumlah penerbitan COP di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong ditunjukkan pada grafik berikut:



Grafik 3. 9 Penerbitan COP di KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Penerbitan COP di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong selama tahun 2023 sebanyak 32 dokumen. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan factor risiko pada seluruh kapal dari luar negeri yang diperiksa. Pada bulan Mei 2023 menunjukkan penerbitan dokumen COP tertinggi yaitu 6 dokumen COP. Pada bulan Maret 2023 tidak dilakukan penerbitan COP dikarenakan tidak ada kapal dalam status karantina yang masuk ke wilayah KKP Kelas III Sorong.

3) Kegiatan Pemeriksaan Faktor Risiko Pada Barang

Pemeriksaan factor risiko barang dilakukan pada lalu lintas pengiriman jenazah, kerangka dan abu jenazah yang berangkat

melalui Pelabuhan dan Bandara di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong. Pengawasan dilakukan terhadap prosedur pemetian/pengemasan jenazah/kerangka sesuai dengan standar yang menghindari kemungkinan penularan factor risiko selama lalu lintas. Permohonan penerbitan SIAJ dilengkapi dengan surat keterangan kematian dari fasilitas kesehatan, surat keterangan formalisasi, surat bukti prosedur pemetian serta diangkut menggunakan ambulans yang sesuai dengan standar. Pada jenazah/kerangka yang telah memenuhi syarat kemudian diterbitkan Surat Izin Angkut Jenazah (SIAJ). Adapun jumlah SIAJ yang diterbitkan di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong pada tahun 2023 ditunjukkan pada grafik berikut:



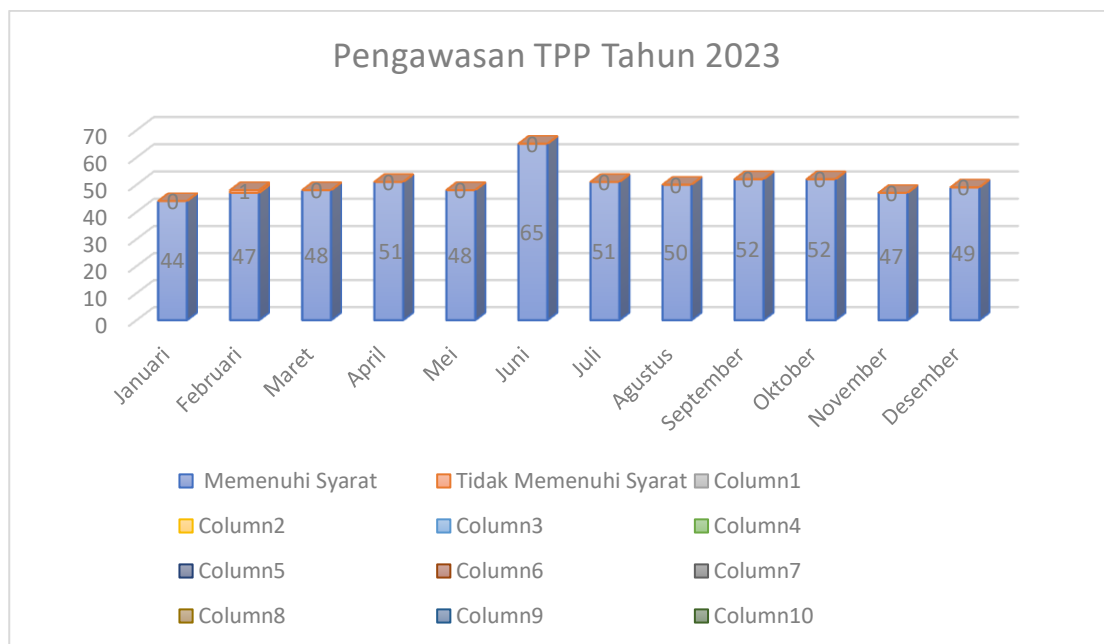
Grafik 3. 10 Pemeriksaan dan Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah (SIAJ) di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Jumlah penerbitan SIAJ di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong pada tahun 2023 yaitu sejumlah 182 dokumen. Penerbitan SIAJ tertinggi pada bulan Mei dan Juni 2023 yaitu masing-masing sebanyak 18 dokumen. Selama tahun 2023 seluruh jenazah/kerangka 100% dikategorikan sebagai jenazah/kerangka dengan riwayat penyakit yang tidak menular.

4) Kegiatan Pemeriksaan Faktor Risiko Pada Lingkungan

a) Pemeriksaan Faktor Risiko pada Tempat Pengolahan Pangan (TPP)

Pemeriksaan tempat pengolah makanan dilakukan setiap bulan pada semua TPP yang berada di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong dengan melakukan kunjungan langsung ke TPP seperti restoran, rumah makan, kantin dan pedagang makanan jajanan baik di lingkungan Bandara maupun di Pelabuhan. Penilaian TPP mengacu pada Kepmenkes No.1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi jasa Boga, Kepmenkes RI No 942/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan, dan Kepmenkes No 1098/Menkes/SK/VII/ 2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Indikator/kriteria dinilai antara lain kondisi halaman, letak bangunan, konstruksi bangunan, sarana air, sarana pencucian, penyimpanan alat, penyimpanan makanan, sarana pembuangan sampah, WC/urinoir, kondisi alat dan kondisi penjamah makanan.



Grafik 3. 11 Pengawasan Tempat Pengolahan Pangan (TPP) di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

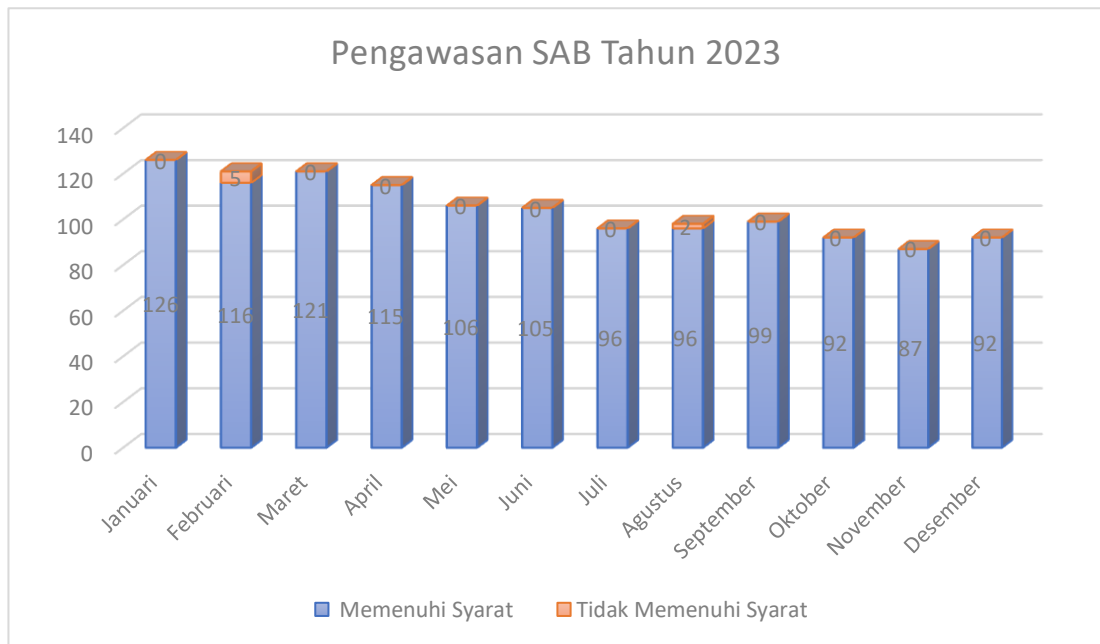
Pengawasan TPP di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong tahun 2023 dilakukan pada 605 tempat. Pada bulan Februari 2023 dari hasil pengawasan terdapat 1 TPP yang tidak memenuhi syarat.

TPP yang tidak memenuhi syarat (mengacu pada formulir pemeriksaan yang digunakan) umumnya disebabkan oleh kurangnya kebersihan lingkungan dan fasilitas sanitasinya seperti tempat cuci piring, tempat pembuangan sampah dan saluran air limbah tidak memenuhi syarat.

b) Pemeriksaan Air Bersih

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam mencegah penularan penyakit melalui air adalah kondisi sanitasi Sarana Air Bersih (SAB) termasuk di dalamnya pengawasan terhadap sisa chlor dan pH. Sasaran kegiatan pengawasan ini adalah kran/hydran, reservoir dan mobil tangki air.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 431/Menkes/SK/IV/ 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / Pos Lintas Batas dalam rangka Karantina Kesehatan, maka sisa Chlor yang diijinkan tidak boleh kurang dari 0,2 dan pH yang diijinkan berkisar antara 6,5 – 8,5 sesuai dengan Permenkes RI No. 32 Th 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Hygiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua* dan Pemandian Umum. Target pemeriksaan Sanitasi Sisa Chlor & pH adalah 84 sampel/tahun yang terbagi di 7 wilayah kerja dengan total SAB 1.258. Adapun jumlah sumber air bersih yang dilakukan pemeriksaan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Grafik 3. 12 Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Hasil pemeriksaan terhadap semua sampel sepanjang tahun 2023 di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong memenuhi terhadap parameter pH dan Chlor namun tidak memenuhi syarat untuk hasil pemeriksaan bakteriologis. Pada bulan Februari dari 121 SAB yang dilakukan pemeriksaan terdapat 5 SAB yang tidak memenuhi syarat bakteriologis. Sedangkan pada bulan Agustus 2023 dari total 98 SAB yang diperiksa terdapat 2 SAB yang tidak memenuhi syarat bakteriologis. Air bersih yang memenuhi syarat parameter Chlor menandakan air bersih memiliki daya desinfektan yang baik terhadap cemaran bakteriologis. Sedangkan parameter pH yang memenuhi syarat menandakan keseimbangan system asam dan basa serta unsur kimia dalam air maupun sebagai indicator awal terhadap risiko cemaran kimia.

c) Pemeriksaan Faktor Risiko pada Tempat-Tempat Umum (TTU)

Untuk mencapai target sub indikator ini dilaksanakan kegiatan pemeriksaan sanitasi bangunan. Pemeriksaan sanitasi bangunan dilaksanakan di semua wilker KKP Kelas III Sorong secara rutin setiap bulan dengan melakukan inspeksi sanitasi pada bangunan

umum, perkantoran, gudang, terminal, dan bangunan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kepelabuhan/ kebandaraan. Adapun yang diperiksa antara lain kondisi halaman, ruang bangunan, penyehatan air, penyehatan udara ruang, pengelolaan limbah, pencahayaan, kebisingan pada ruang kerja, getaran di ruang kerja, pengendalian vektor, kondisi instalasi, pemeliharaan jamban dan kamar mandi. Pemeriksaan sanitasi bangunan dilaksanakan rutin setiap bulan pada semua bangunan yang ada di wilayah kerja Pelabuhan dan Bandara.



Grafik 3. 13 Pengawasan TTU di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Pengawasan TTU di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong tahun 2023 dilakukan pada 1.078 bangunan. Pengawasan TTU terbanyak dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2023 yaitu masing-masing sejumlah 95 bangunan. Sedangkan pengawasan TTU paling sedikit dilakukan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2023 yaitu sejumlah 86 bangunan. Terdapat 1 bangunan TTU yang tidak memenuhi syarat pada hasil pemeriksaan di bulan April 2023. Terdapat beberapa poin pemeriksaan pada kondisi halaman, ruang bangunan, penyehatan air, penyehatan udara ruang, pengelolaan limbah, pencahayaan, kebisingan pada ruang kerja, getaran di ruang kerja, pengendalian vektor, kondisi

instalasi, pemeliharaan jamban dan kamar mandi yang tidak memenuhi syarat.

d) Pemeriksaan Faktor Risiko pada Keberadaan Vektor

Pemeriksaan faktor risiko keberadaan vector dilakukan terhadap beberapa jenis vector penyakit meliputi survey vector DBD, survey vector Pes, survey vector Malaria, dan survey vector Diare. Pemeriksaan factor risiko keberadaan vector dilakukan pada 7 wilayah kerja di KKP Kelas III Sorong. Pada masing-masing wilayah kerja dilakukan pemeriksaan keberadaan vector pada alat angkut kapal/pesawat dan wilayah perimeter maupun buffer selama tahun 2023. Hasil survey keberadaan vector dibandingkan dengan standar pada Permenkes No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya. Adapun pemeriksaan factor risiko keberadaan vector di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong yaitu sebanyak 84 lokus.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pada tahun 2023, indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan, keberhasilan ini disebabkan :

- 1) Adanya ketersediaan anggaran yang mencukupi dalam melaksanakan kegiatan dalam DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong Tahun 2023.
- 2) Adanya dukungan dari pimpinan, stake holder terkait diantaranya PT. Pelindo, PT. Pelni, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (KUPBU), Kantor Imigrasi, Kantor Bea Cukai, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sorong, Balai Karantina Indonesia, Stasiun Karantina Sorong, Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR), Maskapai Penerbangan, Keagenan Kapal dan dukungan masyarakat pelabuhan/bandara yang telah berperan dalam mendukung capaian indikator ini baik dari pengawasan penumpang maupun alat angkut.

- 3) Komitmen serta peran aktif pegawai KKP Kelas III Sorong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi cegah tangkal penyakit di wilayah kerja Pelabuhan dan Badar Udara.
- 4) Adanya pengaturan waktu kerja pegawai yang proporsional sesuai dengan bidang dan keahlian dalam kegiatan penafisan/pengawasan orang sehingga capaian indicator dapat memenuhi target.
- 5) Adanya peningkatan kapasitas SDM melalui seminar/workshop baik secara online atau offline berkaitan dengan jabatan fungsional yang diampu.
- 6) Komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor di pelabuhan/bandara telah terjalin dengan baik, termasuk koordinasi dengan lintas sektor di wilayah seperti dinas kesehatan, puskesmas, klinik/RS/laboratorium, dan TNI/polri.
- 7) Telah tertatanya sistem managerial dimulai dari perencanaan anggaran, rencana pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian kegiatan sesuai dengan target.
- 8) Stake holder dan Masyarakat di lingkungan bandara mendukung kegiatan pengawasan sanitasi dengan terbentuknya forum Bandara sehat yang dapat memfasilitasi segala permasalahan kesehatan lingkungan Bandara.

f. Kendala Masalah yang Dihadapi

Kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

- 1) Beberapa pelabuhan di wilayah kerja KKP Sorong belum di lengkapi dengan thermal Scanner sehingga pemeriksaan suhu tubuh dilakukan secara manual.
- 2) Kendaraan operasional ambulance dan kendaraan operasional vektor terbatas, sehingga pelayanan pasien antar jemput pasien rujukan tidak maksimal dan mobilitas peralatan vektor terkendala.
- 3) Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedis yang memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kerja KKP Kelas III Sorong.

- 4) Sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan kesehatan lingkungan meliputi fasilitas penunjang laboratorium lingkungan dan entomologi belum memadai.
- 5) Belum terbentuknya forum Pelabuhan sehat di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong

g. Pemecahan Masalah

- 1) Mengusulkan penambahan thermal scanner dalam perencanaan anggaran dan mengoptimalkan penggunaan thermometer digital di Pelabuhan wilayah kerja KKP Kelas III Sorong.
- 2) Mengusulkan penambahan ambulance standar karantina dan kendaraan operasional vektor untuk menunjang kegiatan deteksi faktor risiko dipintu masuk negara.
- 3) Mengoptimalkan pelayanan petugas medis/paramedis yang ada sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- 4) Menganalisa kembali terhadap beban kerja sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam pengusulan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) baik medis maupun paramedis di tahun berikutnya untuk penempatan di masing-masing wilker sesuai kebutuhan sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan lebih optimal.
- 5) Mengusulkan penghapusan peralatan laboratorium lingkungan dan entomologi yang telah rusak berat untuk selanjutnya dilakukan pengusulan pengadaan pada anggaran tahun berikutnya.

Melakukan koordinasi dengan dinas terkait di wilayah Pelabuhan untuk pembentukan forum Pelabuhan sehat di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran. Hasil perhitungan Efisiensi berada pada range -20 s.d +20. -20 artinya tidak efisien sedangkan +20 artinya adalah efisien. Sedangkan nilai konversi

efisiensi berada pada range 0-100%, disebut efisien bila NE sebesar 50%. Rumus untuk pengukuran efisiensi dan Nilai Efisiensi (NE) tersebut sebagai berikut:

5) Rumus Efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Dari rumus di atas maka hasil perhitungan Efisiensi adalah sebagai berikut:

PAKi : Rp. 820,029,000,-

RAKi : Rp. 710,394,529,-

CKi : 111,23%

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((820,029,000 \times 111,23\%) - 710,394,529)}{\sum_{i=1}^n (820,029,000 \times 111,23\%)} \times 100\%$$

E = 0.2212

E = 22.12%

Didapatkan hasil Efisiensi pada indicator satu adalah sebesar **0.2212 (22.12%)**.

6) Rumus Nilai Efisiensi (NE)

$$\text{Nilai Efisiensi} = \frac{50}{100} + \left(\frac{\text{Efisiensi}}{20 \times 50} \right)$$

Dari rumus di atas maka hasil perhitungan Nilai Efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = \frac{50}{100} + \left(\frac{E}{20 \times 50} \right)$$

$$= \frac{50}{100} + \left(\frac{0.2212}{20 \times 50} \right)$$
$$= 105.29\%$$

Didapatkan hasil Nilai Efisiensi pada indicator satu adalah sebesar **105.29%**.

7) Analisis Efisiensi

- a) Hasil perhitungan Efisiensi adalah 22.12% bernilai positif berada pada range 0 s.d +20 sehingga dapat disimpulkan bahwa indicator satu **EFISIEN**
- b) Indikator Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/ bandara/ PLBDN telah terlaksana efisien dengan nilai efisiensi sebesar 105.29%. Dengan anggaran 86.63% dapat mencapai kinerja 111.23%. Tingginya nilai efisiensi pada indicator ini, dikarenakan capaian masing-masing parameter pada indicator indeks pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah melebihi target yang ditentukan seperti yang tertera pada tabel 3.3 Persentase Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2023.

2. INDIKATOR DUA

Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan

a. Definisi Operasional

Indikator Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan merupakan indikator yang memberikan gambaran kualitas pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan. Angka ini menggambarkan besaran faktor risiko penyakit di pintu masuk yang telah dikendalikan dari temuan dalam pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong.

1) Faktor Risiko Orang

Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan orang yaitu:

a) Penumpang dengan suhu tinggi $>37,5^{\circ}\text{C}$

- Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dengan vaksinasi COVID-19 tidak lengkap
- Penumpang positif COVID-19
- Penumpang dengan keadaan sakit, saturasi <95 , hamil >32 minggu dan kadar Hb $8,5$
- Jemaah haji hamil (< 14 minggu dan >26 minggu)
- Belum mendapatkan vaksinasi internasional (Meningitis atau Yellow Fever)
- Dokumen ICV palsu atau kadaluarsa
- HIV positif
- TB positif
- Penumpang dengan penyakit berpotensi menularkan wabah

Upaya pengendalian risiko yang dilakukan diantaranya :

- Rujukan ke Rumah Sakit bagi penumpang sakit, suhu tinggi $>37,5^{\circ}\text{C}$ dan membutuhkan perawatan medis lebih lanjut ataupun ke Wisma Karantina Bagi penumpang positif COVID-19 dan PPLN yang belum vaksinasi Covid19 lengkap sesuai dengan Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 2 Tahun 2023. Rujukan dapat dilakukan juga ke Dinkes terkait hasil penemuan HIV atau TB positif.
- Penolakan berangkat atau tolak masuk bagi penumpang yang tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan aturan penerbangan dan peraturan lainnya.
- Pengobatan atau penanganan gawat darurat.
- Isolasi sementara dan penyelidikan epidemiologi bagi penumpang yang dicurigai dengan penyakit menular berpotensi menimbulkan wabah.

2) Faktor Risiko Alat Angkut

Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan alat angkut yaitu:

a) Ditemukan vektor, kecoa, tikus, lalat, nyamuk

- b) Mengangkut penumpang sakit berpotensi KKM (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat) atau datang dari negara terjangkit penyakit KKM Tidak terdapat P3K
- c) Air tercemar/terkontaminasi

Upaya pengendalian risiko yang dilakukan diantaranya :

- a) Disinfeksi atau tindakan sterilisasi menggunakan bahan kimia desinfektan untuk menindaklanjuti alat angkut yang tidak memenuhi syarat kesehatan, dalam hal ini terindikasi terdapat cemaran mikroorganisme yang dapat menyebabkan penularan penyakit.
- b) Disinseksi atau tindakan pengendalian atau hapus serangga yang dilakukan terhadap alat angkut yang tidak memenuhi syarat dengan indikasi ditemukan tanda-tanda atau keberadaan serangga di dalam pesawat.
- c) Penerbitan dokumen *Ship Sanitation Control Certificat (SSCC)* bagi alat angkut kapal setelah dilakukan tindakan penyehatan.

3) Faktor Risiko Barang

Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan barang yaitu jenazah dengan persyaratan administrasi yang belum lengkap salah satunya yaitu pernyataan telah dilakukan *embalming* (pengawetan jenazah). Jika persyaratan belum lengkap maka dilakukan penundaan atau penolakan keberangkatan.

4) Faktor Risiko Lingkungan

Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan lingkungan yaitu:

- a) Tempat-Tempat Umum (TTU) yang tidak memenuhi syarat Kesehatan sesuai dengan Permenkes No.70 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri.
- b) Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang tidak memenuhi syarat Kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

- c) Kualitas air yang tidak memenuhi syarat Kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- d) Indeks vektor yang tinggi sesuai dengan Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya.

Upaya pengendalian risiko yang dilakukan diantaranya :

- a) Pemberian rekomendasi berupa saran perbaikan atas faktor risiko yang ditemukan kepada pihak penyelenggara TTU, TPP, dan SAB.
- b) Fogging untuk mengendalikan keberadaan nyamuk dewasa
- c) Abatisasi untuk mengendalikan keberadaan jentik
- d) Spraying untuk mengendalikan kepadatan lalat
- e) Baiting untuk mengendalikan kepadatan kecoa

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya faktor risiko yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut, dan lingkungan sehingga faktor risiko tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

b. Rumus/Cara Perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%.

$$N = \frac{FRk}{FRt} \times 100\%$$

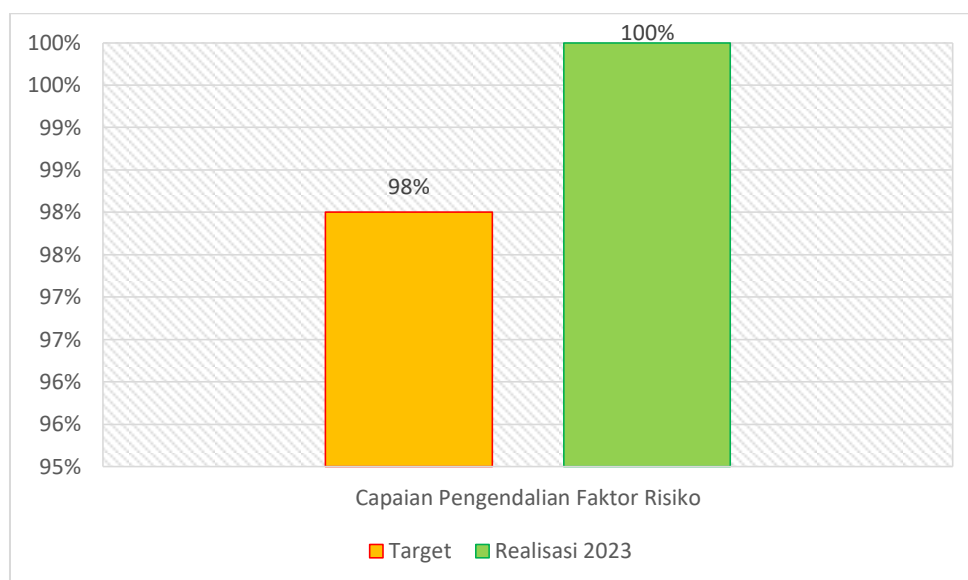
- N : Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan
- FRk : Jumlah Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
- FRt : Jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Berdasarkan cara perhitungan di atas, capaian indicator persentase factor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar:

$$N = \frac{315}{315} \times 100\% = 100\%$$

c. Capaian Indikator

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong pada tahun 2023 sebanyak 315, dengan jumlah faktor risiko yang dikendalikan 315 sehingga persentase capaian pengendalian adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 diperoleh capaian kinerja sebesar 102% dari target 98%.



Grafik 3. 14 Capaian Pengendalian Faktor Risiko Tahun 2023 di KKP Kelas III Sorong

Selama tahun 2023, KKP Kelas III Sorong telah melaksanakan pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan melalui kegiatan surveilans epidemiologi, pengendalian karantina, pelayanan kesehatan dan matra, pengawasan faktor risiko lingkungan pada Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) serta surveilans vektor.

Berdasarkan hasil pemeriksaan orang, barang, alat angkut dan lingkungan yang dilakukan, terdapat 831 faktor risiko yang ditemukan

dan telah dikendalikan seluruhnya. Adapun rincian faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan dalam tabel berikut ini :

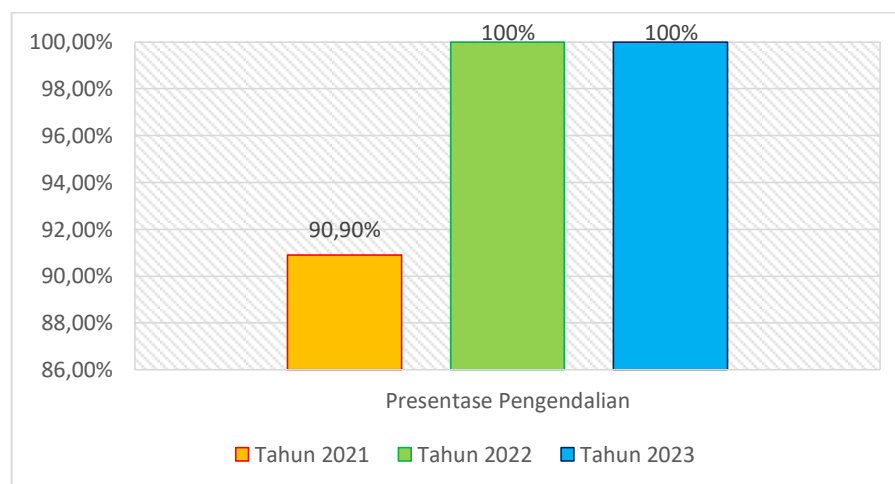
TABEL 3. 8 Pengendalian Faktor Risiko yang Ditemukan di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

No	Faktor Risiko (FR)	Jumlah yang diperiksa	Jumlah FR yang ditemukan	Jumlah FR yang dikendalikan	% capaian
1	Pemeriksaan Orang	2.288.676	492	492	100
2	Pemeriksaan Alat Angkut	15.849	28	28	100
3	Pemeriksaan Barang	182	0	0	0
4	Pemeriksaan lingkungan	3.025	311	311	100
Jumlah		2.307.734	831	831	100

Berdasarkan tabel di atas, diketahui faktor risiko yang paling tinggi ditemukan pada pemeriksaan orang yakni sebesar 492 faktor risiko. Faktor risiko pada pemeriksaan lingkungan sebanyak 311 faktor risiko, pemeriksaan alat angkut sebanyak 28 faktor risiko, dan pemeriksaan barang tidak ditemukan faktor risiko.

1) Perbandingan Realisasi Dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



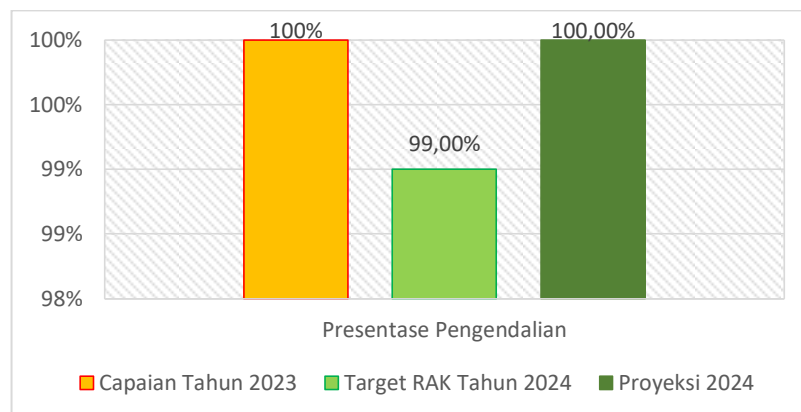
Grafik 3. 15 Persentase Capaian Pengendalian Faktor Risiko di KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Dari Grafik diatas diketahui bahwa terjadi tren peningkatan capaian persentase pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong dari tahun 2021

sampai tahun 2023. Capaian persentase pengendalian factor risiko di pintu masuk Negara diketahui pada tahun 2022 dan 2023 sama yaitu sebanyak 100%.

2) Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah KKP Kelas III Sorong

Realisasi indikator persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2023 yaitu 100% sedangkan target RAK tahun 2024 yaitu 99%. KKP Kelas III Sorong berupaya melaksanakan upaya pengendalian factor risiko pada seluruh factor risiko yang berhasil ditemukan pada pelaksanaan kegiatan pengawasan orang, alat angkut, barang dan lingkungan. Melihat capaian indicator tiga tahun 2022 dan 2023 mencapai 100%, pada tahun 2024 diproyeksikan pengendalian yang dilakukan mencapai 100% factor risiko.

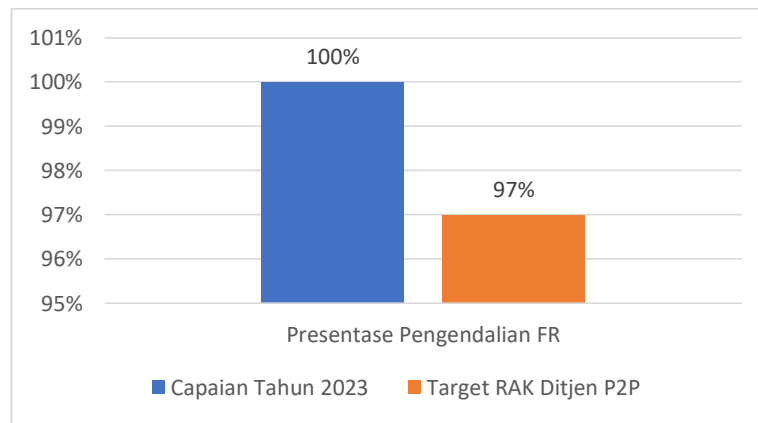


Grafik 3. 16 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan KKP Kelas III Sorong tahun 2023 dengan Target RAK tahun 2024

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

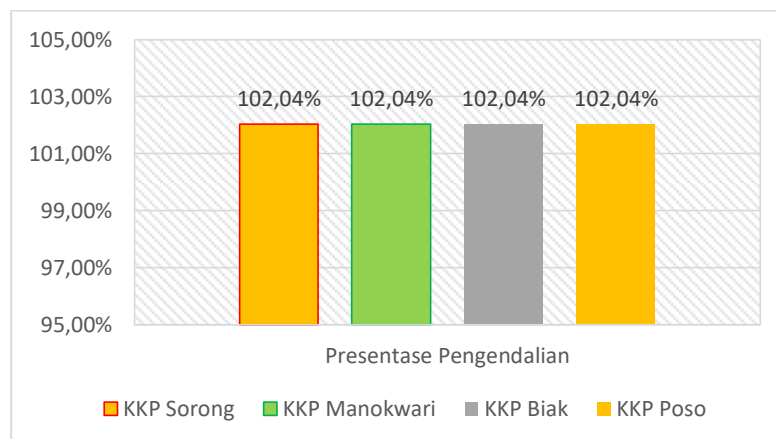
Jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah/rencana pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 sebesar 97%, indikator ini telah melebihi target kinerja jangka menengah dengan capaian tahun

2023 sebesar 100%. Adapun grafik perbandingannya sebagai berikut:



Grafik 3. 17 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan KKP Kelas III Sorong dengan Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020 – 2024

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Organisasi Sejenis/Setara



Grafik 3. 18 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Faktor Risiko yang dikendalikan KKP Kelas III Sorong dengan KKP Kelas III Manokwari dan KKP Kelas III Biak

Dari grafik diatas terlihat bahwa realisasi persentase pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk Negara KKP Kelas III Sorong sama dengan ke tiga Kantor Kesehatan Pelabuhan yang dibandingkan yaitu sebesar 102,04%. Tidak adanya perbedaan signifikan antara capaian persentase pengendalian factor risiko di masing-masing KKP yang dibandingkan dikarenakan besaran

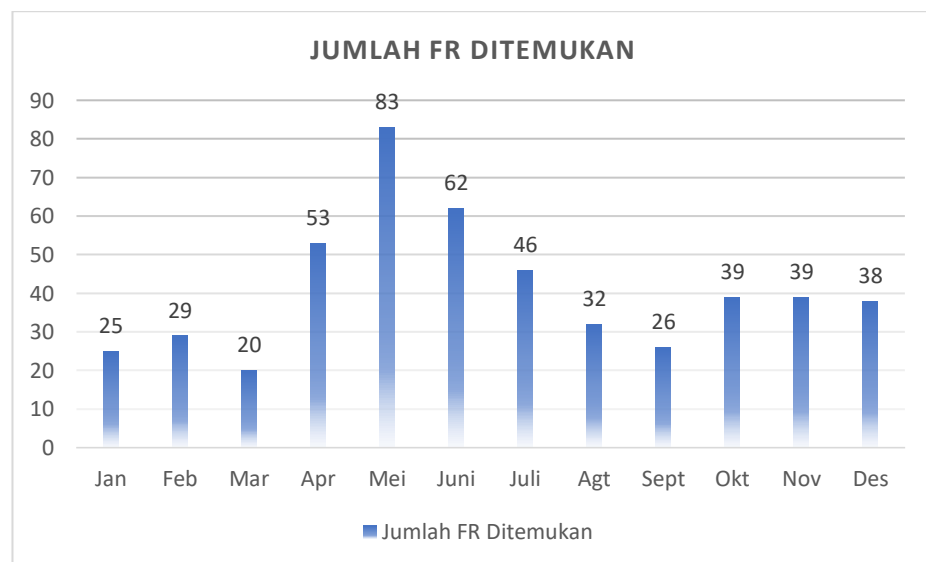
target indicator yang sama yaitu 98% dengan capaian persentase indicator masing-masing 100%.

d. Upaya Yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Indikator

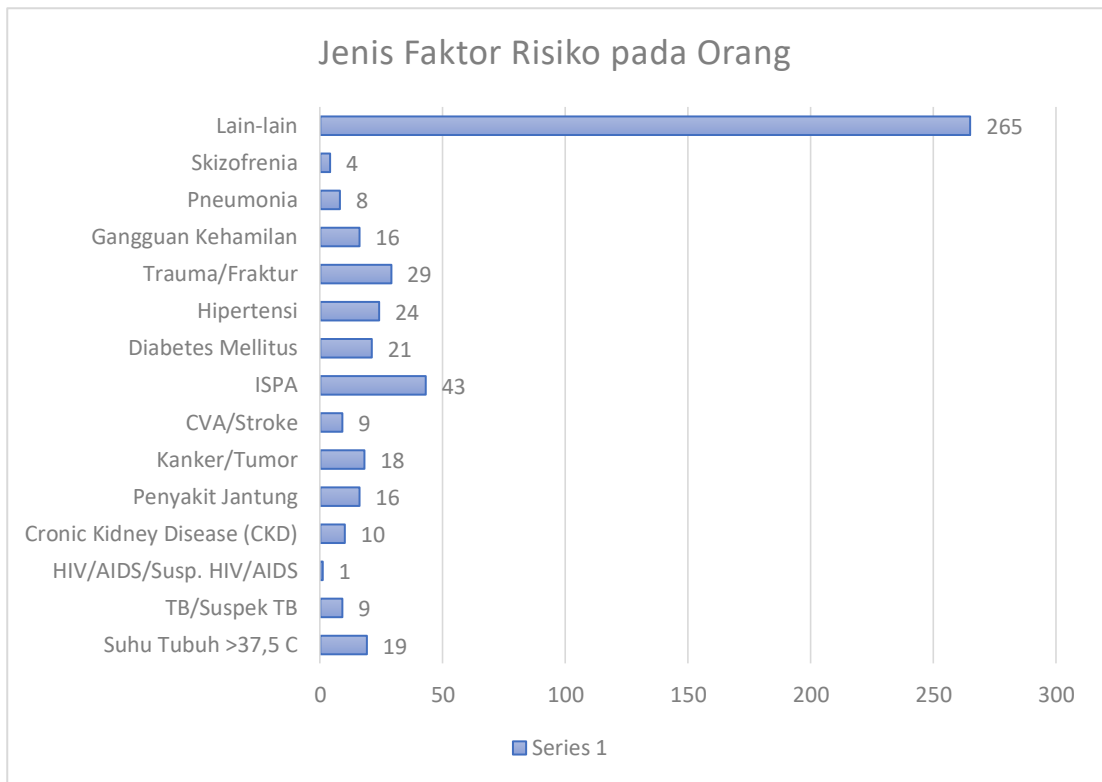
Upaya/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target persentase pengendalian factor risiko di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong adalah:

1) Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang

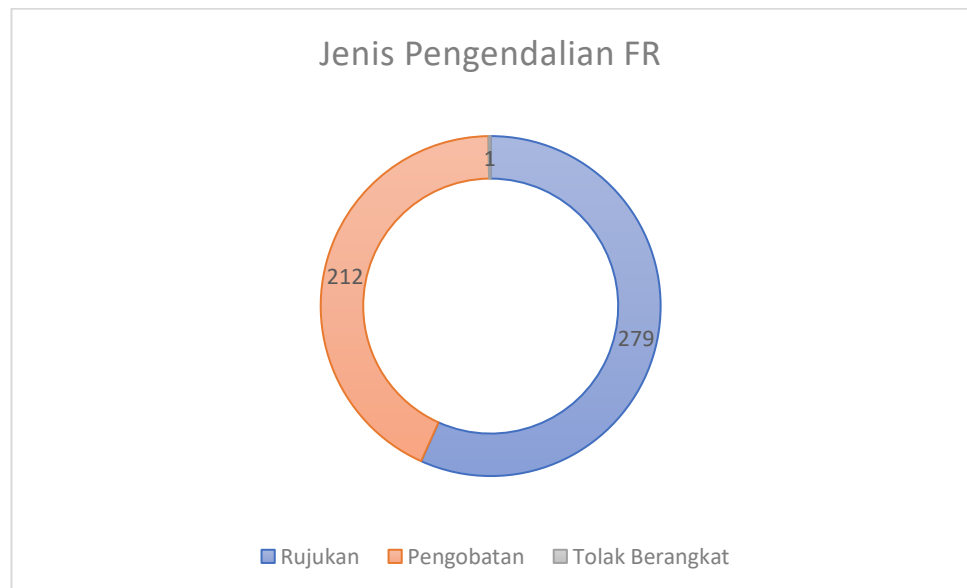
Kegiatan pengendalian faktor risiko selama tahun 2023 dilaksanakan di seluruh di pintu masuk wilayah kerja KKP Kelas III Sorong baik di wilayah Pelabuhan maupun Bandara. Adapun hasil kegiatan pengendalian factor risiko pada orang di tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Grafik 3. 19 Distribusi Jumlah Pengendalian Faktor Risiko Pada Orang di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023



Grafik 3. 20 Distribusi Jenis Faktor Risiko Pada Orang yang Dikendalikan di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023



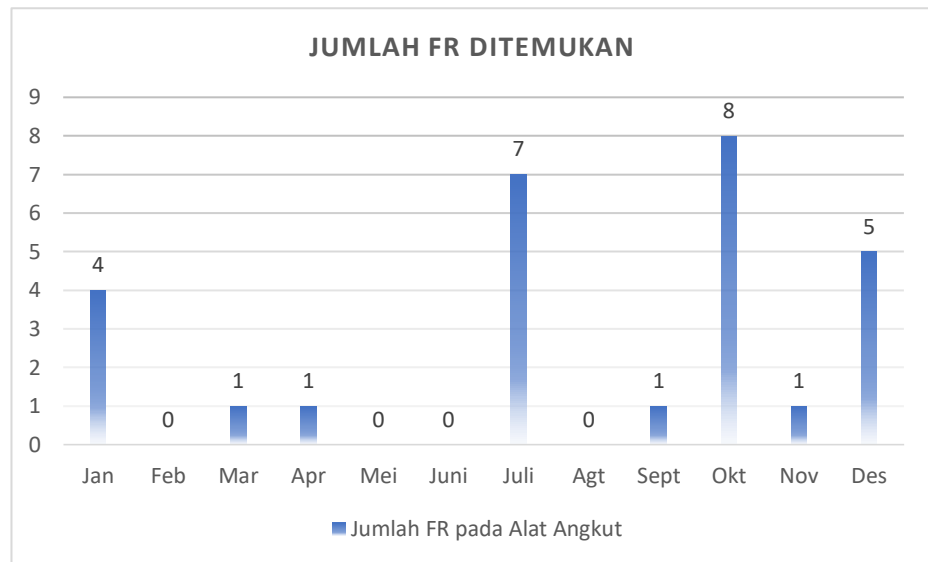
Grafik 3. 21 Distribusi Jenis Jenis Pengendalian FR pada Orang Tahun 2023 di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong

Jenis Faktor Risiko yang dikendalikan di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong tahun 2023 sebanyak 492 faktor risiko pada orang. Tiga faktor risiko terbanyak yang ditemukan adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu sejumlah 43 kasus, trauma/fraktur

sejumlah 29 kasus dan peningkatan suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ kasus. Sedangkan FR paling sedikit yang ditemukan adalah HIV/AIDS dengan jumlah 1 kasus. Pada kasus tersebut dilakukan observasi dan pemeriksaan terhadap faktor risiko infeksi COVID-19 dengan hasil konfirmasi negative COVID-19. Dari grafik 3.21 tergambar bahwa FR sebagian besar dikendalikan dengan pelayanan rujukan yaitu 279 kasus, pengobatan 212 kasus dan 1 kasus dengan metode tolak berangkat. Secara keseluruhan semua faktor risiko yang ditemukan diwilayah kerja KKP Kelas III Sorong dapat dikendalikan baik dengan prosedur rujukan, pengobatan, maupun penolakan pemberangkatan.

2) Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko Pada Alat Angkut

Kegiatan pengendalian alat angkut dilakukan jika ditemukan keberadaan vector dan binatang pembawa penyakit pada alat angkut saat dilakukan pemeriksaan kesehatan. Alat angkut dinyatakan tidak sehat karena berisiko dapat menularkan penyakit seperti ditemukan adanya tikus dan serangga tular vektor atau ditetapkan sebagai kapal terjangkit penyakit menular potensial PHEIC. Alat angkut yang dinyatakan berisiko maka terlebih dahulu harus dilakukan tindakan penyehatan dan kemudian diberikan dokumen SSCC. Kegiatan pengendalian yang dilakukan diantaranya adalah deratisasi, desinseksi dan fumigasi. Pada tahun 2023 KKP Kelas III Sorong mendapatkan 28 alat angkut yang ditemukan keberadaan vector sehingga dilakukan tindakan penyehatan dan penerbitan dokumen SSCC. Distribusi jumlah alat angkut yang ditemukan adanya vector dan binatang pembawa penyakit dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3. 22 Jumlah Alat Angkut yang Ditemukan Adanya Vektor dan BPP Di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong

Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah alat angkut yang berisiko karena ditemukan adanya vector dan binatang pembawa penyakit pada saat pemeriksaan kesehatan tertinggi pada bulan Oktober 2023 yaitu sejumlah 8 alat angkut. Vektor dan binatang pembawa penyakit dominan yang ditemukan adalah kecoa dan tikus sehingga pengendalian yang paling banyak dilakukan adalah desinseksi/fumigasi.

3) Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko Pada Barang

Seluruh tindakan pengawasan barang yang tiba dan berangkat di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong sepanjang tahun 2023 merupakan kategori lalu-lintas jenazah/kerangka. Hasil pengawasan menunjukkan seluruh pengangkutan jenazah/kerangka (100%) merupakan kategori bukan penyakit menular sehingga tidak ditemukan adanya factor risiko pada jenazah yang harus dikendalikan.

4) Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko Pada Lingkungan

a) Pengendalian Faktor Risiko pada Tempat-Tempat Umum (TTU)

TTU berupa gedung/bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan fisik berupa penilaian kondisi higiene dan sanitasi gedung/bangunan dan lingkungan serta

menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut. Pada bulan April 2023 terdapat 1 lokasi TTU yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong. Metode pengendalian FR yang dilakukan adalah dengan memberikan Rekomendasi perbaikan hygiene sanitasi TTU yang TMS. Rekomendasi diberikan kepada pengelola Pelabuhan untuk melakukan perbaikan pada hasil pemeriksaan yang dinyatakan TMS. Selanjutnya rekomendasi yang disampaikan dilakukan evaluasi secara berkala pada pemeriksaan TTU di bulan berikutnya.

b) Pengendalian Faktor Risiko pada Tempat Pengolahan Makanan (TPM)/Tempat Pengolahan Pangan (TPP)

Hasil dari pemeriksaan hygiene bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengelolaan makanan, hingga penyajian makanan yang dilakukan sepanjang tahun 2023 pada TPP di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong terdapat 1 lokasi TPP yang TMS. Metode pengendalian FR yang dilakukan adalah dengan memberikan Rekomendasi perbaikan hygiene sanitasi TPP yang TMS. Rekomendasi diberikan kepada pengelola Pelabuhan untuk melakukan perbaikan pada hasil pemeriksaan yang dinyatakan TMS. Selanjutnya rekomendasi yang disampaikan dilakukan evaluasi secara berkala pada pemeriksaan TPP di bulan berikutnya. Selain pemberian rekomendasi, tindakan pengendalian lain yang dilakukan adalah dengan melakukan KIE kepada pemilik TPP terkait dengan pentingnya menjaga hygiene sanitasi dalam mengolah makanan.

c) Pengendalian Air Bersih di Lingkungan Buffer dan Perimeter KKP Kelas III Sorong

Pemeriksaan terhadap Sarana Air Bersih (SAB) yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan pemeriksaan fisik, pengambilan sampel air minum untuk dilakukan pengujian laboratorium baik bakteriologi maupun kimia. Hasil dari

pemeriksaan terhadap 1.258 titik SAB didapatkan 7 titik yang tidak memenuhi syarat pada pemeriksaan bakteriologis. Metode pengendalian FR yang dilakukan adalah dengan memberikan rekomendasi dan KIE pengolahan Air Bersih yang aman bagi pemilik SAB yang tidak memenuhi syarat bakteriologis. Selanjutnya rekomendasi yang disampaikan dilakukan evaluasi secara berkala pada pemeriksaan SAB di bulan berikutnya.

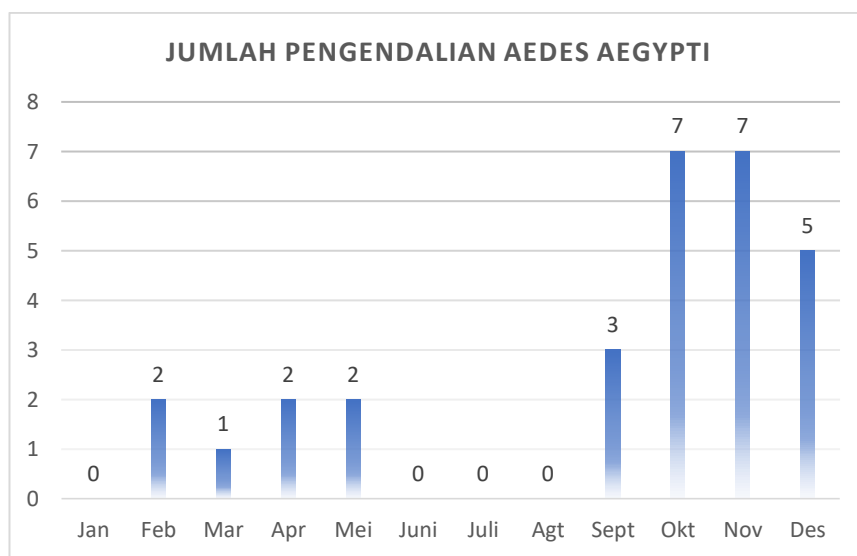
d) Pengendalian Jentik Nyamuk di Lingkungan Buffer dan Perimeter KKP Kelas III Sorong

Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan Metode *Single Larva Survey* di semua wilayah kerja KKP Kelas III Sorong. Hasil survey jentik akan menggambarkan kepadatan populasi nyamuk *Aedes aegypti* setiap bulan di daerah perimeter dan buffer dengan angka *House Index* (HI), *Container Index* (CI) dan *Breteau Index* (BI). Pengendalian Nyamuk dalam fase larva di pelabuhan disyaratkan 0 (nol) dan buffer < 1 sesuai dengan standar dalam *Internasional Health Regulation* (IHR). Apabila dalam survey larva ditemukan kontainer dengan positif larva nyamuk *Aedes aegypti* maka perlu dilakukan intervensi dengan larvasida. Kegiatan survey jentik nyamuk yang dilakukan di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong sepanjang tahun 2023 menemukan adanya factor risiko di 84 lokasi focus. Tindakan pengendalian factor risiko yang telah dilakukan oleh KKP Kelas III Sorong adalah dengan melakukan intervensi larvasidasi sesuai dosis di 84 lokasi focus di seluruh wilayah kerja KKP Kelas III Sorong baik wilayah buffer maupun perimeter. Tindakan pengendalian vector jentik nyamuk sepanjang tahun 2023 dapat dikendalikan 100%.

e) Pengendalian Nyamuk *Aedes Aegypti* di Lingkungan Buffer dan Perimeter KKP Kelas III Sorong

Apabila hasil survey nyamuk DBD menunjukkan nilai HI di daerah perimeter > 0 dan HI di buffer > 1 serta ditemukan kasus yang terindikasikan penularan DBD di wilayah kerja

berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi maka perlu dilakukan pengendalian terhadap vector DBD. Metode pengendalian vector DBD yang diaplikasikan di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong menggunakan metode pengasapan (*fogging*). Metode *fogging* menggunakan insektisida yang diaplikasikan berdasarkan hasil survey dan keamanan saat pengaplikasiannya. Hasil survey factor risiko nyamuk *Aedes Aegypti* di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong tahun 2023 ditemukan adanya factor risiko di 29 lokasi focus baik buffer maupun perimeter. Tindakan pengendalian factor risiko yang telah dilakukan oleh KKP Kelas III Sorong adalah dengan melakukan intervensi pengasapan sesuai dosis yaitu di 29 lokasi focus tersebut. Tindakan pengendalian vector nyamuk *Aedes Aegypti* sepanjang tahun 2023 dapat dikendalikan 100%. Berikut distribusi jumlah lokasi focus sepanjang tahun 2023 di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong yang dilakukan pengendalian nyamuk *Aedes Aegypti* :

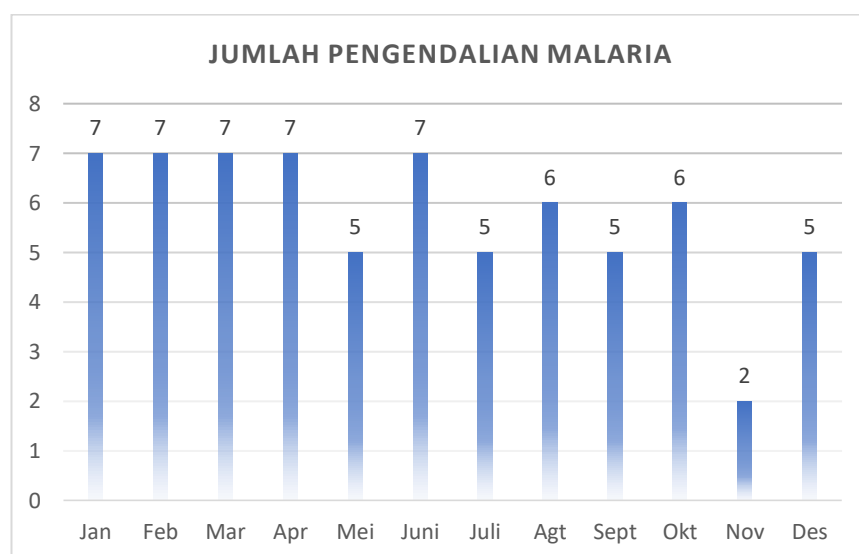


Grafik 3. 23 Pengendalian Faktor Risiko Nyamuk *Aedes Aegypti* di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

f) Pengendalian Nyamuk Malaria di Lingkungan Buffer dan Perimeter KKP Kelas III Sorong

Dalam layanan pengendalian vector Malaria di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong sepanjang tahun 2023 didasarkan pada hasil survey vector nyamuk *Anopheles*. Pelaksanaan survey

dilaksanakan pada fase larva dengan metode survey indeks habitat perindukan. Pengendalian nyamuk dewasa dilakukan di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong secara kimiawi dengan metode *Indoor Residual Spraying* (IRS). IRS dilakukan pada bangunan baik daerah perimeter maupun buffer yang berisiko terhadap timbulnya kasus malaria. Kegiatan survey nyamuk dewasa yang dilakukan di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong sepanjang tahun 2023 menemukan adanya factor risiko di 69 lokasi focus. Berikut distribusi jumlah lokasi focus sepanjang tahun 2023 di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong yang dilakukan upaya pengendalian malaria:



Grafik 3. 24 Pengendalian Faktor Risiko Nyamuk Malaria di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepadatan populasi nyamuk Malaria diantaranya adalah Indeks Habitat Larva *Anopheles* > 1, hasil survey nyamuk malam menunjukkan angka gigitan nyamu *Anopheles* atau *Man Biting Rate* (MBR) > 0,025, perilaku masyarakat keluar pada malam hari tanpa menggunakan repelen atau baju yang menutupi badan, ventilasi rumah terbuka atau tidur tidak menggunakan kelambu dan tidak menggunakan insektisida rumah tangga pada malam hari.

Tindakan pengendalian factor risiko yang telah dilakukan oleh KKP Kelas III Sorong adalah dengan melakukan intervensi IRS

sesuai dosis di 69 lokasi focus di seluruh wilayah kerja KKP Kelas III Sorong baik wilayah buffer maupun perimeter. Tindakan pengendalian nyamuk malaria sepanjang tahun 2023 dapat dikendalikan 100%.

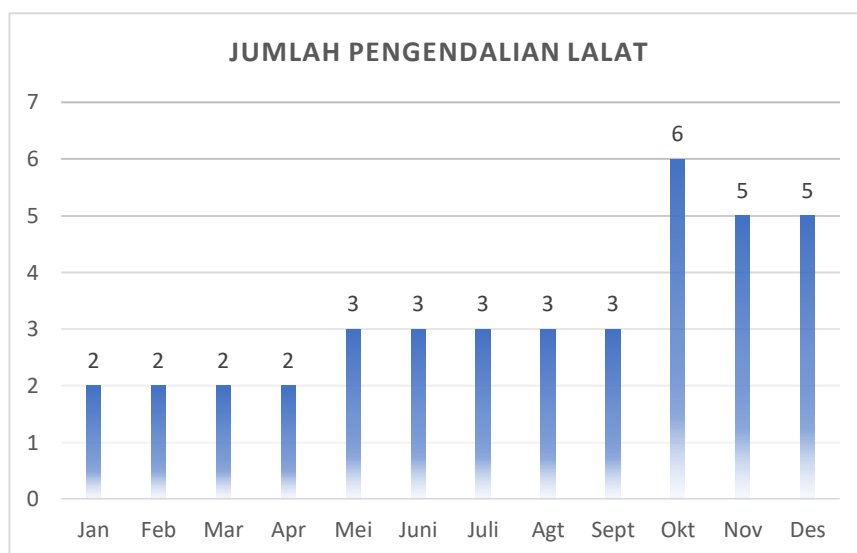
g) Pengendalian Vektor Diare (Lalat) di Lingkungan Buffer dan Perimeter KKP Kelas III Sorong

Layanan survei vektor diare dilaksanakan dengan survei kepadatan lalat dan kecoa di seluruh wilayah kerja KKP Kelas III Sorong sepanjang tahun 2023. Pengamatan kepadatan lalat dilakukan dengan menggunakan *flygrill* yang didasarkan pada sifat lalat yang cenderung untuk hinggap pada tepi-tepi atau tempat yang bersudut dalam kurun waktu tertentu dan lem kecoa. *Flygrill* dan lem kecoa diletakkan di tempat-tempat yang berdekatan dengan tempat sampah, kotoran hewan, kandang, dan lainnya.

Jumlah lalat yang hinggap dihitung selama 30 detik. Perhitungan ini dilakukan sebanyak 10 kali di setiap titik pengamatan. 5 perhitungan tertinggi dibuat rata-ratanya dan dicatat dalam kartu pengamatan. Angka rata-rata ini merupakan indeks dalam lokasi tersebut dan diinterpretasikan sebagai berikut:

- 0 – 2 : Rendah
- 3 – 5 : Sedang
- 6 – 20 : Tinggi
- ≥ 21 : Sangat Tinggi

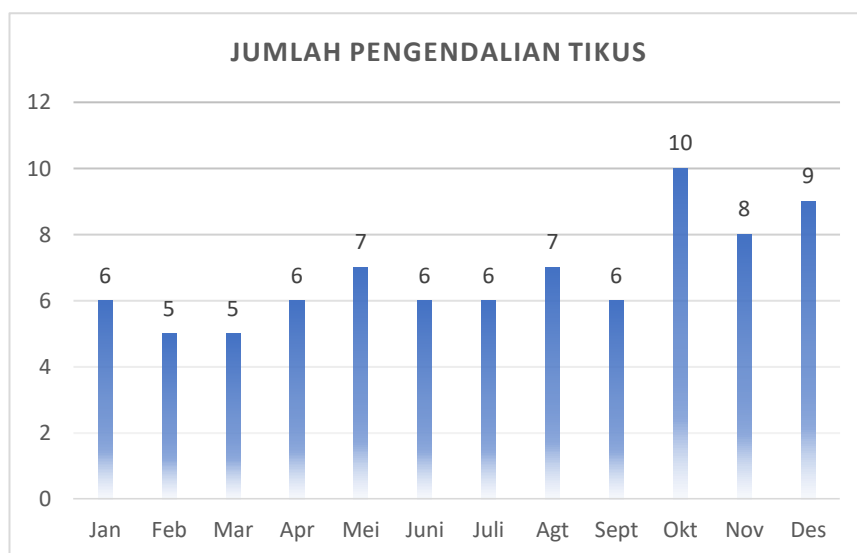
Kegiatan survey lalat yang dilakukan di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong sepanjang tahun 2023 menemukan adanya factor risiko di 39 lokasi focus. Tindakan pengendalian factor risiko yang telah dilakukan oleh KKP Kelas III Sorong adalah dengan melakukan intervensi berupa *Spraying* insektisida sesuai dosis di 39 lokasi focus di seluruh wilayah kerja KKP Kelas III Sorong baik wilayah buffer maupun perimeter. Tindakan pengendalian vector lalat sepanjang tahun 2023 dapat dikendalikan 100%.



Grafik 3. 25 Pengendalian Faktor Risiko Vektor Lalat di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

h) Pengendalian Vektor Pes di Lingkungan Buffer dan Perimeter KKP Kelas III Sorong

Keberadaan binatang pembawa penyakit di lingkungan Pelabuhan dan Bandara dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat salah satunya yaitu keberadaan tikus. Tikus merupakan reservoir pembawa berbagai penyakit salah satunya *Leptospirosis*. Selain itu, tikus merupakan inang dari vector pes yaitu pinjal. Pengendalian terhadap tikus secara tidak langsung juga mengendalikan vector pes. Prosedur survey tikus dilakukan dengan identifikasi lokasi yang berpotensi menjadi tempat keberadaan tikus seperti Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Gudang, dermaga dan terminal Pelabuhan/Bandara. Pada lokasi yang berpotensi dilakukan pemasangan perangkat baik di dalam maupun di luar bangunan. Tikus yang tertangkap dilakukan identifikasi spesies dan pemeriksaan terhadap kemungkinan keberadaan pinjal. Hasil survey vector tikus di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong tahun 2023 ditemukan adanya factor risiko di 81 lokasi focus. Berikut ini ada grafik sebaran lokasi focus yang menjadi factor risiko di sepanjang tahun 2023:



Grafik 3. 26 Faktor Risiko Tikus yang Dikendalikan di KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Tindakan pengendalian factor risiko yang telah dilakukan oleh KKP Kelas III Sorong adalah dengan melakukan intervensi pemasangan perangkap dan identifikasi di 81 lokasi focus di seluruh wilayah kerja KKP Kelas III Sorong baik wilayah buffer maupun perimeter. Tindakan pengendalian tikus sepanjang tahun 2023 dapat dikendalikan 100%.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pada tahun 2023, indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan, keberhasilan ini disebabkan :

- 1) Adanya peran serta dari upaya pemberdayaan Masyarakat/Kader/anggota pramuka dalam mendukung kegiatan pengendalian factor risiko lingkungan khususnya dalam pengendalian vector.
- 2) Adanya ketersediaan anggaran yang mencukupi dalam melaksanakan kegiatan dalam DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong Tahun 2023.
- 3) Adanya dukungan dari pimpinan, lintas sektor terkait diantaranya PT. Pelindo, PT. Pelni, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

(KUPBU), dan dukungan masyarakat pelabuhan yang telah berperan dalam mendukung kegiatan pengendalian factor risiko.

- 4) Adanya dukungan dari lintas program terkait diantaranya Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong dalam upaya pengendalian factor risiko lingkungan.
- 5) Adanya peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia (SDM) medis, paramedis, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan dan sanitarian melalui seminar/workshop baik secara online atau offline terkait tindakan medis, diklat kekarantinaan, sanitasi lingkungan dan survey/pengendalian vector/binatang pembawa penyakit.
- 6) Telah tertatanya sistem managerial dimulai dari perencanaan anggaran, rencana pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian kegiatan sesuai dengan target.
- 7) Stake holder di lingkungan bandara mendukung kegiatan pengawasan sanitasi. Masing-masing pelabuhan/bandara sudah terbentuk forum pelabuhan/bandara sehat yang dapat memfasilitasi segala permasalahan kesehatan lingkungan.
- 8) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengendalian factor risiko lingkungan telah terpenuhi.

g. Kendala Masalah yang Dihadapi

Kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Kendaraan operasional ambulance tidak dimiliki oleh semua wilayah kerja KKP kelas III Sorong, sehingga pelayanan pasien meliputi antar jemput pasien dalam rujukan dan evakuasi korban kegawat daruratan kecelakaan laut tidak maksimal.
- 2) Kendaraan operasional vektor yang terbatas sehingga proses distribusi petugas dan peralatan dalam rangka pengendalian vector tidak dapat berjalan dengan maksimal.
- 3) Frekuensi pengangkutan sampah ketempat pembuangan akhir sampah sering mengalami keterlambatan sehingga volume

sampah di tempat pembuangan sampah sementara di wilayah Pelabuhan/bandara meningkat.

- 4) Belum meratanya distribusi SDM kesehatan diantaranya jabatan Dokter, Perawat, Epidemiologi Kesehatan, Entomologi Kesehatan dan Sanitarian di masing-masing wilayah kerja KKP Kelas III Sorong yang dapat menghambat proses deteksi dini dan respon terhadap factor risiko penyakit.
- 5) Masih dijumpai penolakan tindakan pengendalian vector di lingkungan buffer Pelabuhan dan bandara oleh Masyarakat sekitar.

h. Pemecahan Masalah

Pemecahan-pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Mengusulkan penambahan SDM kesehatan baik melalui formasi CPNS umum maupun menambah tenaga PPPK.
- 2) Mengoptimalkan SDM Kesehatan yang ada dalam melakukan upaya pengendalian factor risiko di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong.
- 3) Mengusulkan penambahan ambulance standar karantina dan kendaraan operasional vektor pada perencanaan anggaran tahun selanjutnya.
- 4) Melakukan pengendalian/penyemprotan lalat secara rutin setiap bulan di lokasi pembuangan sampah sementara mengacu pada hasil survey vector dan binatang pembawa penyakit.
- 5) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor di Pelabuhan dan Bandara dalam mengatur pengelolaan sampah untuk menekan perkembang biakan lalat.
- 6) Melakukan koordinasi dengan tokoh Masyarakat dan pemberian KIE tentang pentingnya pengendalian vector penyakit sebelum tindakan.

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran. Hasil

perhitungan Efisiensi berada pada range -20 s.d +20. -20 artinya tidak efisien sedangkan +20 artinya adalah efisien. Sedangkan nilai konversi efisiensi berada pada range 0-100%, disebut efisien bila NE sebesar 50%. Rumus untuk pengukuran efisiensi dan Nilai Efisiensi (NE) tersebut sebagai berikut:

1) Rumus Efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Efisiensi penggunaan sumber daya capaian indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut dan lingkungan tahun 2023 adalah 4.98% dengan perhitungan sebagai berikut :

PAKi : Rp. 711,395,000,-

RAKi : Rp. 669,391,669,-

CKi : 102.04%

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((711,395,000 \times 102.04\%) - 669,391,669)}{\sum_{i=1}^n (711,395,000 \times 102.04\%)} \times 100\%$$

$$E = 0.0498 \times 100\%$$

$$E = 4,98\%$$

2) Rumus Nilai Efisiensi (NE)

$$\text{Nilai Efisiensi} = \frac{50}{100} + \left(\frac{\text{Efisiensi}}{20 \times 50} \right)$$

Dari rumus di atas maka hasil perhitungan Nilai Efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{50}{100} + \left(\frac{E}{20 \times 50} \right) \\
&= \frac{50}{100} + \left(\frac{0,0498}{20 \times 50} \right) \\
&= 62.46\%
\end{aligned}$$

Didapatkan hasil Nilai Efisiensi pada indikator satu adalah sebesar **62.46%**.

3) Analisis Efisiensi

- a) Hasil perhitungan Efisiensi adalah 4.98% berada pada range 0 s.d +20 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator dua **EFISIEN**
- b) Indikator persentasi faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah terlaksana efisien dengan nilai efisiensi sebesar 62.46%. Dengan anggaran 97,30% dapat mencapai kinerja 102.04%. Tingginya nilai efisiensi pada indikator ini dikarenakan seluruh factor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah dilakukan pengendalian (100%) seperti tertera pada tabel 3.8 Pengendalian Faktor Risiko yang Ditemukan di Wiayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023. Persentase pengendalian telah melebihi target yang ditentukan yaitu 98%.

3. INDIKATOR TIGA

Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara

a. Definisi Operasional

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

- 1) Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang Dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%

Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) untuk mendeteksi dan merespon secara cepat setiap kejadian terhadap faktor risiko PHEIC tersebut kurang dari 24 jam, dapat berupa respon cepat di level KKP sendiri atau sebagai masukan bagi pengelola Bandara dan Pelabuhan dan dapat juga berupa masukan/usulan bagi Instansi Pusat.

- 2) Indeks Pinjal ≤ 1

Salah satu upaya pemberantasan penyakit menular adalah dengan melakukan pemberantasan pinjal pada binatang pengerat tikus. Adapun syarat jumlah indeks pinjal yang ditargetkan tidak melebihi 1 %. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya upaya pemberantasan dan pengendalian tikus agar pelabuhan bebas dari pinjal. Kegiatan pengendalian vektor pes dilakukan dengan pemantauan titik-titik lokasi keberadaan tikus kemudian dilakukan pemasangan perangkap pada lokasi tersebut dengan tujuan mengidentifikasi tikus dan pinjal.

- 3) Tidak Ditemukan Larva Anopheles

Pengamatan keberadaan larva Anopheles dilakukan dengan survei Larva Anopheles dengan penangkapan larva menggunakan *dipper*/cidukan yang dilakukan pada berbagai macam genangan air. Persyaratan di lingkungan sekitar Bandara dan Pelabuhan yaitu tidak ditemukannya larva Anopheles.

4) Indeks Populasi Kecoa < 2

Kecoa merupakan vektor mekanis dari berbagai penyakit. Kegiatan pengamatan kecoa dilakukan pada titik-titik yang berpotensi adanya vektor kecoa seperti rumah makan/restoran, gedung dan bangunan. Sesuai dengan Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya, yaitu jumlah populasi kecoa *Blattella germanica* < 2 ekor (kategori rendah).

5) Indeks Populasi Lalat < 2

Lalat juga merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan. Upaya untuk menurunkan populasi lalat adalah sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan. Untuk itu sebagai salah satu cara penilaian baik buruknya suatu lokasi adalah dilihat dari angka kepadatan lalatnya. Kepadatan lalat <2 menunjukkan bahwa kepadatannya rendah atau tidak menjadi masalah.

6) HI Perimeter = 0

House Index (HI) adalah jumlah rumah atau bangunan positif jentik dari seluruh rumah atau bangunan yang diperiksa. Sesuai ketentuan IHR tahun 2005, wilayah perimeter harus bebas dari investasi *Aedes* sp baik stadium larva maupun dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva.

7) HI Buffer < 1

Wilayah buffer adalah wilayah darat yang berjarak jarak 2 km diluar wilayah Bandara dan Pelabuhan yang harus bebas risiko penularan penyakit oleh vektor dengan standar House Index (HI) <1,2 km adalah jarak terbang vektor nyamuk *Anopheles* sp.

8) Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan TTU Memenuhi Syarat

Pengawasan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) yaitu gedung/bangunan di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong

dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

9) Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan

Tempat Pengelolaan Makanan atau TPP terdiri dari jasaboga golongan C dan Rumah Makan/Restoran. Pengawasan hygiene sanitasi TPP terdiri dari dua kegiatan yaitu pemeriksaan kelaikan hygiene sanitasi dan pengambilan sampel (makanan, usap alat dan usap tangan).

10) Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Bakteriologis

Pengawasan kualitas air minum di bandara dilakukan dengan Inspeksi Sanitasi Sarana Air Minum dan pengambilan sampel untuk uji kualitas fisika, kimia dan mikrobiologi. Pengujian berdasarkan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pengawasan dilakukan terhadap lokasi sarana air bersih mulai dari sumber air dan media penampungnya.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara.

b. Rumus/Cara Perhitungan

Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal) dengan Range indeks 0-1 dengan mempertimbangkan bobot yang dihitung berdasarkan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Tahap pertama adalah dengan menghitung persentase masing-masing parameter dan selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel pengukuran indeks.

1) Menghitung Persentase Masing-Masing Parameter

a) Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%

Adalah pencapaian sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong tahun 2023 yang dihitung dengan membandingkan antara capaian dengan target SKD KLB dan Bencana yang direspon dikalikan 100%. Berdasarkan cara perhitungan tersebut, capaian target indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Cklb = \frac{pp}{tp} \times 100\%$$

Dimana :

Cklb : Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon

tk : total kasus SKD KLB dan Bencana yang direspon

tt : Total Target SKD KLB dan Bencana yang direspon

b) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1

Pencapaian persentase pinjal ≤ 1 dihitung dengan persentase pelabuhan/bandara dengan indeks pinjal sesuai dengan standar, yaitu ≤ 1 . Berdasarkan cara perhitungan tersebut, capaian target indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CP = \frac{pp}{tp} \times 100\%$$

Dimana :

CP = persentase capaian indeks pinjal < 1

pp = total pelabuhan/bandara dengan indeks pinjal < 1

tp = total pelabuhan/bandara yang ada

c) Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (< 1)

Capaian tidak ada larva *Anopheles* adalah persentase pelabuhan/bandara dengan Indeks habitat perimeter = 0. Berdasarkan cara perhitungan tersebut, capaian target indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CA = \frac{pa}{tp} \times 100\%$$

Dimana :

CA = persentase capaian tidak ada larva *Anopheles*

pa = total pelabuhan/bandara dengan tidak ada larva
Anopheles

tp = total pelabuhan/bandara yang ada

- d) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2

Capaian kepadatan kecoa <2 adalah persentase pelabuhan/bandara dengan kepadatan kecoa <2. Berdasarkan cara perhitungan tersebut, capaian target indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CK = \frac{pk}{tp} \times 100\%$$

Dimana :

CK = persentase capaian kepadatan kecoa <2

pk = total pelabuhan/bandara dengan kepadatan kecoa <2

tp = total pelabuhan/bandara yang ada

- e) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2

Capaian kepadatan lalat <2 adalah persentase pelabuhan/bandara dengan kepadatan Lalat <2. Berdasarkan cara perhitungan tersebut, capaian target indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CL = \frac{pl}{tp} \times 100\%$$

Dimana :

CL = persentase capaian kepadatan lalat <2

pl = total pelabuhan/bandara dengan kepadatan lalat <2

tp = total pelabuhan/bandara yang ada

- f) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0

Capaian HI perimeter = 0 dihitung dengan persentase pelabuhan/bandara dengan HI Perimeter sesuai dengan standar, yaitu 0. Berdasarkan cara perhitungan tersebut, capaian target indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CH = \frac{ph}{tp} \times 100\%$$

Dimana :

CH = persentase capaian HI perimeter = 0

ph = total pelabuhan/bandara dengan HI perimeter = 0

tp = total pelabuhan/bandara yang ada

g) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1

Capaian HI buffer <1 dihitung dengan persentase pelabuhan/bandara dengan HI buffer sesuai dengan standar, yaitu <1. Berdasarkan cara perhitungan tersebut, capaian target indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CB = \frac{pb}{tp} \times 100\%$$

Dimana :

CB = persentase capaian HI buffer <1

ph = total pelabuhan/bandara dengan HI buffer <1

tp = total pelabuhan/bandara yang ada

h) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan

Capaian persentase lokus Tempat-Tempat Umum (TTU) diperoleh dengan membandingkan capaian total lokus TTU yang memenuhi syarat setelah dilakukan 3 kali pemeriksaan dengan target TTU memenuhi syarat pada tahun 2023 dikalikan 100%. Berdasarkan cara perhitungan tersebut, capaian target indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Cttu = \frac{ctu}{ttu} \times 100\%$$

Dimana :

Ctu = persentase capaian lokus TTU memenuhi syarat

ctu = total capaian lokus TTU memenuhi syarat

ttu = total target lokus TTU memenuhi syarat

- i) Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan

Capaian persentase lokus Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) diperoleh dengan membandingkan capaian total lokus TPM yang memenuhi syarat setelah dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan target TPM memenuhi syarat pada tahun 2023 dikalikan 100%. Berdasarkan cara perhitungan tersebut, capaian target indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Ctpm = \frac{ctpm}{ttpm} \times 100\%$$

Dimana :

Ctpm = persentase capaian lokus TPM memenuhi syarat

ctpm = total capaian lokus TPM memenuhi syarat

ttpm = total target lokus TPM memenuhi syarat

- j) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis

Capaian persentase lokus kualitas air bersih diperoleh dengan membandingkan capaian total lokus kualitas air bersih yang memenuhi syarat dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis dengan target pemeriksaan kualitas aairb bersih memenuhi syarat pada tahun 2023 dikalikan 100%. Berdasarkan cara perhitungan tersebut, capaian target indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Ctpm = \frac{cab}{tab} \times 100\%$$

Dimana :

Cab = persentase capaian lokus kualitas air bersih memenuhi syarat

cab = total capaian lokus kualitas air bersih memenuhi syarat

tab = total target lokus kualitas air bersih memenuhi syarat

Dari rumus di atas diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL 3. 9 Persentase Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara

No.	Parameter	Target 2023	Capaian 2023	Persentase %
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	12	12	100%
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	168	168	100%
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	168	168	100%
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	168	168	100%
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	168	135	80,4%
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	168	168	100%
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	168	168	100%
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	936	1077	115,1%
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	588	604	102,9%
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	8	8	100%
Rata-Rata Persentase Capaian				99,84%

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian persentase parameter tertinggi adalah persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan sebesar 115,1%. Tingginya capaian parameter tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan lokus TTU memenuhi syarat melebihi target lokus yang ditetapkan (capaian tahun 2023 1.077 lokus dari target 936 lokus). Sedangkan capaian paling rendah adalah parameter persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 yaitu 80,4%. Hal ini disebabkan masih terdapat lokus dengan kepadatan lalat tinggi. Pada lokus tersebut ditemukan tempat perindukan lalat berupa tempat pembuangan sampah sementara yang tidak terkelola dengan baik dan adanya pasar ikan.

2) Menghitung Indeks Pengendalian Di Pintu Masuk Negara

Hasil perhitungan persentase masing-masing parameter selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel perhitungan indeks pada kolom "baseline". Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi nilai score maksimal dikurang score minimal.

TABEL 3 10 Perhitungan Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara

NO	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Cov Min	Score Min
1	2	3	4	$5 = (4/7) * 100$	$6 = 3 * 5$	7	8	$9 = 3 * 8$	10	11	$12 = 3 * 11$
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspn kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	5		0	0	100	100	500			
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4		0	0	100	100	400			-
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	3		0	0	100	100	300			-
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	4		0	0	100	100	400			-
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	4		0	0	100	100	400			-
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5		0	0	100	100	500			
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5		0	0	100	100	500			
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	4		0	0	100	100	400			
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	5		0	0	100	100	500			
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	5		0	0	100	100	500			
Nilai Empiris						a	Nilai Skor Max	b	Nilai Skor Min	c	

Keterangan :

- Bobot : Dihitung berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)
- Baseline : Persentase Indeks Pengendalian Di Pintu Masuk Negara

- Coverage : Nilai baseline dibagi nilai maksimal dikalikan 100
- Score : Bobot dikalikan coverage
- Maksimal : Nilai maksimal 100
- Cov. Max : Coverage maksimal sama dengan 120%
- Score Max : Bobot dikalikan coverage maksimal
- Minimal : Nilai minimal 0
- Score Min : Bobot dikalikan nilai minimal

Rumus Indeks:

$$Indeks = \frac{a}{b - c}$$

Dimana :

a : Nilai Empiris (jumlah coverage)

b : Nilai Score Maximal (jumlah score max)

c : Nilai Score Minimal (jumlah score minimal)

TABEL 3. 11 Hasil Perhitungan Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Cov Min	Score Min
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10	11	12=3*11
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direpson kurang dari	5	100.0	100	500	100	100	500	0	0	0
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4	100.0	100	400	100	100	400	0	0	0
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles	3	100.0	100	300	100	100	300	0	0	0
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	4	100.0	100	400	100	100	400	0	0	0
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	4	80.4	80.4	321.4	100	100	400	0	0	0
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5	100.0	100	500	100	100	500	0	0	0
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5	100.0	100	500	100	100	500	0	0	0
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali	4	115.1	115.1	460.3	100	100	400	0	0	0
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali	5	102.9	102.9	514.5	100	100	500	0	0	0
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	5	100.0	100	500	100	100	500	0	0	0
Nilai					4,396	Score Max		4,400	Score Min		0

Sehingga :

$$I = \frac{4396}{4400 - 0}$$

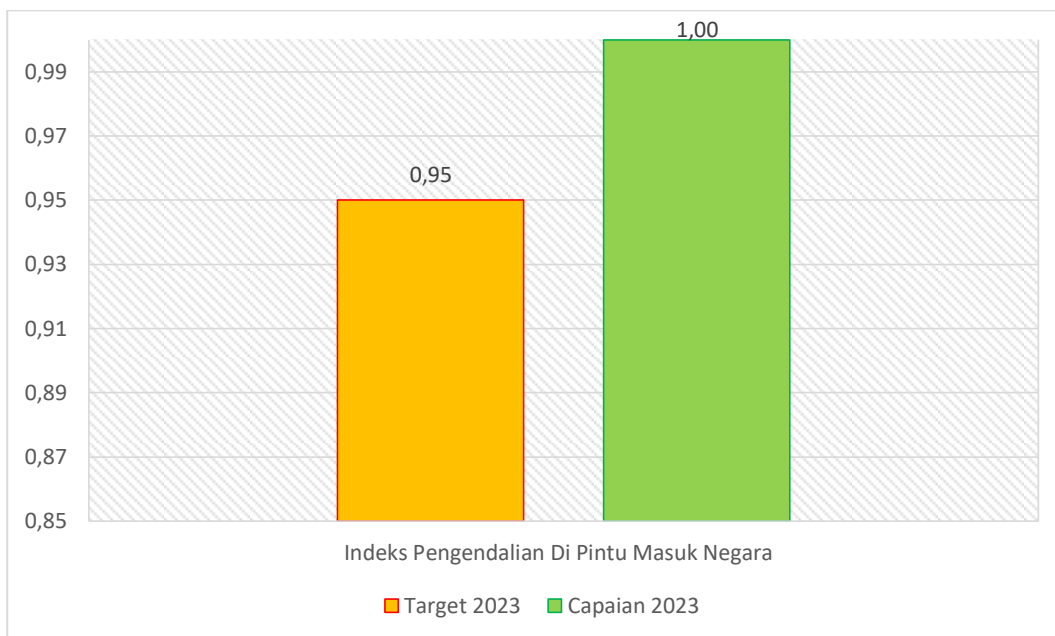
$$I = \frac{4396}{4400}$$

$$I = 1,00$$

Jadi perolehan indeks pengendalian di pintu masuk negara tahun 2023 adalah 1,00.

c. Capaian Indikator

Indikator indeks pengendalian di pintu masuk negara di KKP Kelas III Sorong pada tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditentukan yakni 0,95. Realisasi indikator indeks pengendalian di pintu masuk negara pada tahun 2023 sebesar 1,00 (105,26%).

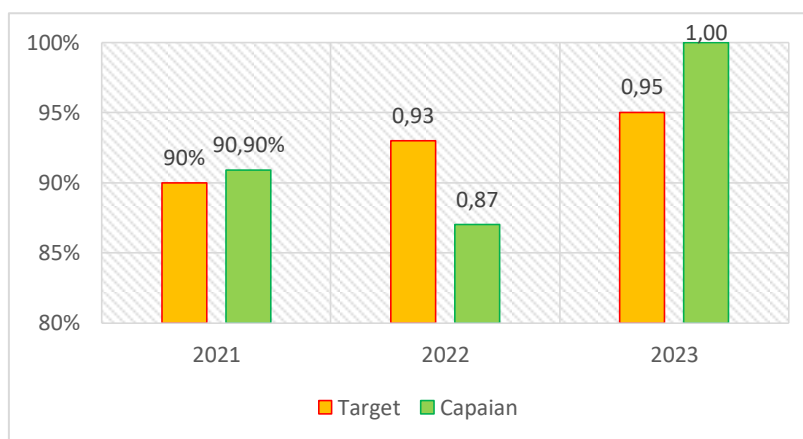


Grafik 3. 27 Capaian Indeks Pengendalian Di Pintu Masuk Negara Di KKP Kelas III Sorong Pada Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, indeks pengendalian di pintu masuk negara KKP Kelas III Sorong tahun 2023 telah memenuhi target.

1) Perbandingan Realisasi Dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Persentase capaian indikator tiga diperoleh dengan menghitung rata-rata persentase capaian dari masing-masing subindikator (tersaji dalam tabel persentase pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara) sehingga diperoleh hasil rata-rata 99,81%. Adapun grafik perbandingan persentase capaian kinerja indikator tiga dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

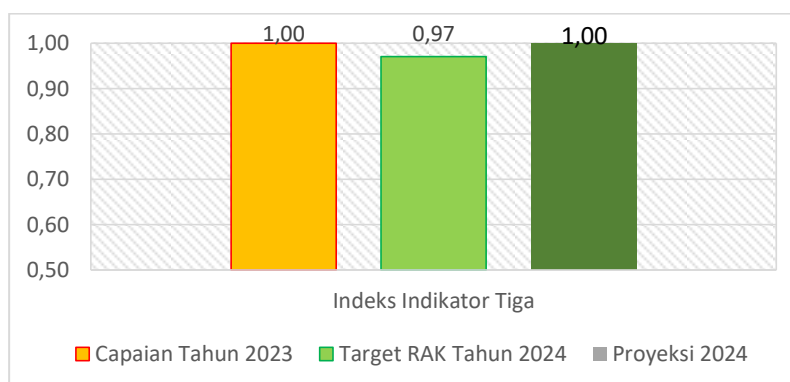


Grafik. 3 28 Perbandingan Realisasi Dengan Kinerja Tahun Sebelumnya KKP Sorong Tahun 2021, 2022, 2023

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, KKP Kelas III Sorong belum mencapai target indeks pengendalian factor risiko. Namun pada capaian tahun 2023 telah berhasil mencapai target realisasi yang ditetapkan.

2) Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah KKP Kelas III Sorong

Jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Sorong tahun 2020-2024, realisasi kinerja indikator ini telah mencapai target tahun 2024 sebesar 0,97. Proyeksi capaian indicator tiga tahun 2024 adalah 1. Proyeksi tersebut berdasarkan analisis capaian tahun 2023 dan tersedianya dukungan sumber daya pada tahun 2024 berupa SDM dan anggaran. Adapun grafik perbandingannya sebagai berikut:

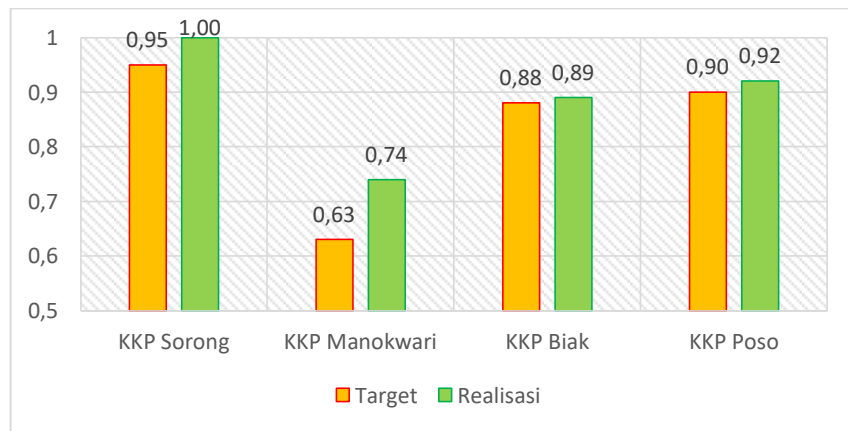


Grafik 3. 29 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Pengendalian di Pintu Masuk Negara KKP Kelas III Sorong Tahun 2023 dengan Target RAK tahun 2024

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

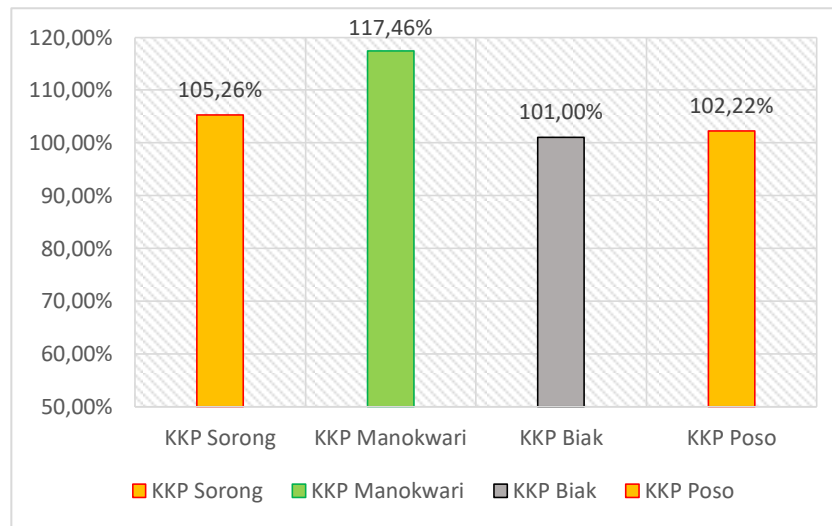
Pada Renstra Kemenkes dan RAP Ditjen P2P Tahun 2020-2024 tidak terdapat indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, namun indikator ini mendukung pencapaian target indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 97%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Organisasi Sejenis/Setara



Grafik 3. 30 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pengendalian di Pintu Masuk Negara antara KKP Kelas III Sorong dengan KKP Sejenis/Setara

Dari grafik diatas terlihat bahwa realisasi indeks pengendalian di pintu masuk Negara KKP Kelas III Sorong lebih tinggi daripada tiga KKP lain yang setara yaitu sebesar 1.00. KKP Kelas III Manokwari memiliki capaian indeks indicator ke tiga paling rendah yaitu 0,71, sedangkan KKP Kelas III Poso diurutan ke dua yaitu sebesar 0,92 dan KKP Kelas III Biak urutan ke tiga sebesar 0,89. Berbeda halnya jika dianalisis dari capaian indicator atas target yang telah ditentukan dengan membandingkan antara capaian indeks indicator dengan target seperti tampak pada tabel berikut:



Grafik 3. 31 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Indeks antara KKP Kelas III Sorong dengan KKP Sejenis/Setara

Jika dibandingkan antara persentase capaian indikator antar masing-masing KKP, terlihat bahwa capaian tertinggi adalah KKP Kelas III Manokwari yaitu sebesar 117,46%, urutan ke dua adalah KKP Kelas III Sorong dengan persentase capaian 105,26%, urutan ke tiga adalah KKP Kelas III Poso dengan capaian 102,22% dan KKP Kelas III Biak memiliki capaian persentase terendah yaitu 101%. Perbedaan capaian persentase indikator ini dipengaruhi oleh besaran target yang telah ditentukan oleh masing-masing satuan kerja seperti yang tertera pada tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pengendalian di Pintu Masuk Negara antara KKP Kelas III Sorong dengan KKP Sejenis/Setara.

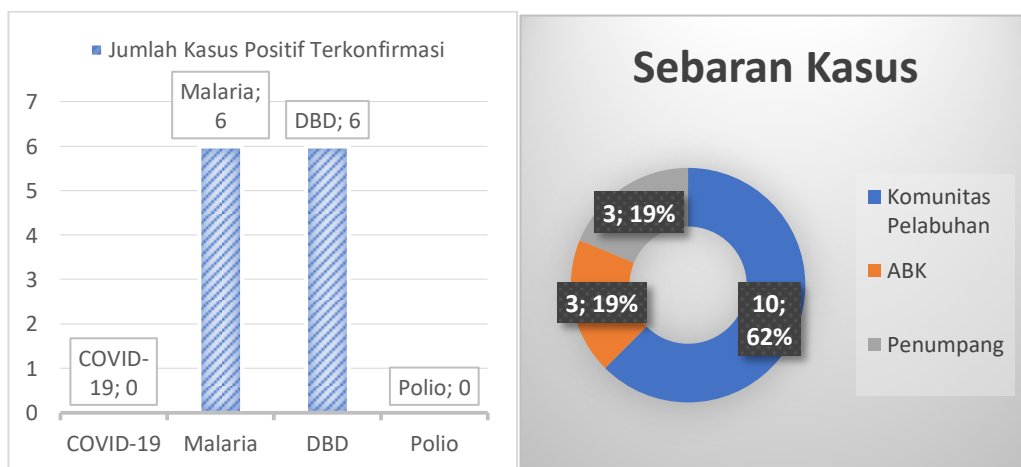
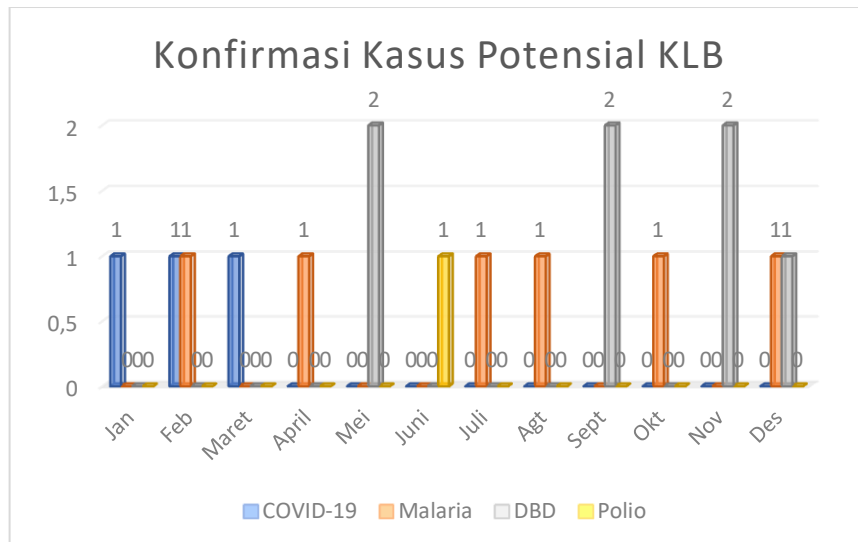
d. Upaya Yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Indikator

Upaya/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target indeks pengendalian di pintu masuk Negara KKP Kelas III Sorong adalah:

1) Jumlah sinyal kewaspadaan dini KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong

Kewaspadaan dini KLB di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong dilakukan dengan melakukan surveilans aktif di wilayah kerja terhadap penyakit yang berpotensi terjadinya wabah. Kegiatan

surveilans yang dilakukan adalah konfirmasi kasus suspek COVID-19, Malaria, DBD dan Polio yang dilakukan pada ABK, penumpang, dan komunitas Pelabuhan/Bandara. Apabila ditemukan hasil pemeriksaan positif maka ditindak lanjuti dengan penyelidikan epidemiologi terhadap kontak erat untuk menganalisis sumber penularan. Pada tahun 2023 terdapat 15 sinyal SKD KLB yang diterima dan seluruh sinyal tersebut telah direspon kurang dari 24 jam. Sinyal SKD KLB yang berhasil direspon oleh KKP Kelas III Sorong seluruhnya merupakan respon untuk mencegah risiko peningkatan kasus penyakit potensial wabah di wilayah kerja Bandara dan Pelabuhan. Berikut merupakan sebaran kasus positif COVID-19 di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong yang terkonfirmasi positif COVID-19 tahun 2023 :



Grafik 3. 32 Sebaran Kasus Konfirmasi Kasus Sebagai Respon Sinyal SKD KLB di KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa temuan kasus potensi KLB respon sinyal paling tinggi adalah penyakit DBD dan Malaria. Diketahui juga bahwa dari hasil anamnesis mayoritas kasus positif. Konfirmasi kasus positif DBD dan Malaria Sebagian besar merupakan Komunitas di sekitar Pelabuhan/Bandara. Kasus DBD dan Malaria seluruhnya terkonfirmasi positif setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan Rapid test. Sedangkan kasus yang dicurigai COVID-19 dan Polio dinyatakan negative setelah dilakukan pemeriksaan Rapid Test COVID-19 dan pemeriksaan laboratorium feses untuk polio. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk merespon SKD KLB tersebut ialah :

a) Kegiatan Verifikasi Rumor

Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi laporan kejadian penyakit menular berpotensi KLB yang diterima di wilayah kerja. Pada komunitas Pelabuhan/Bandara, ABK dan Penumpang yang terdiagnosa positif kasus DBD dan Malaria dilakukan verifikasi rumor terhadap kemungkinan penularan lain pada kontak erat seperti keluarga dan rekan kerja. Pemantauan rumor penularan dilakukan dengan metode door to door. Hasil verifikasi terhadap rumor tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan yaitu jika hasil verifikasi menyatakan bahwa memang terjadi kasus penyakit menular berpotensi KLB/wabah maka akan dilakukan investigasi/ penyelidikan epidemiologi untuk selanjutnya.

b) Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penularan penyakit baru di wilayah kerja sebagai dasar untuk menyatakan tempat sumber penularan penyakit. Hasil investigasi kemudian dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan mengenai tindakan pengendalian.

Kepada seluruh rumor yang telah terverifikasi yaitu tidak terdapat kontak erat yang positif DBD dan Malaria. Namun dari hasil pengawasan ditemukan banyak tempat perindukan nyamuk di sekitar lokasi kasus, dan kepadatan nyamuk dewasa

cukup tinggi. Petugas mengambil Keputusan untuk dilakukan tindakan pengendalian berupa pengasapan insektisida/fogging di lokasi kasus. Pada keluarga diberikan KIE terkait Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) mandiri dan perilaku-perilaku yang dapat meningkatkan risiko tergigit nyamuk vector pembawa DBD dan Malaria.

2) Indeks Pinjal di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Untuk mencapai target sub indikator ini dilaksanakan kegiatan layanan survei vektor pes. Kegiatan layanan vektor pes dilaksanakan sebanyak 84 kali di seluruh wilayah kerja. Terdapat beberapa tahapan dalam kegiatan ini, yaitu pemetaan, persiapan alat dan bahan, pemasangan perangkat, serta identifikasi. Pemetaan dilakukan untuk menentukan lokasi pemasangan perangkat. Pemasangan perangkat dilaksanakan selama 4 hari kegiatan oleh 3 orang petugas (2 orang kader dan 1 orang pengawas).

Selanjutnya akan dilakukan identifikasi tikus dan pinjal yang tertangkap dan perhitungan indeks vektornya. Perhitungan indeks yang dijadikan standar baku vektor pada kegiatan ini adalah indeks pinjal ≤ 1 sesuai Permenkes No. 50 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya, dimana dalam rentang indeks ini dianggap tidak berpotensi terjadi penularan penyakit pes.

3) Indeks Habitat Larva *Anopheles* di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Untuk mencapai target subindikator ini dilaksanakan kegiatan layanan survei vektor malaria. Tahapan kegiatannya terdiri dari survei jentik dan survei nyamuk *Anopheles* dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 84 kali di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong dan dilakukan di 168 Pelabuhan/Bandara selama tahun 2023.

Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya, standar jentik *Anopheles* dinyatakan dalam indeks habitat. Selama tahun 2023, keberadaan jentik *Anopheles* tidak diketemukan baik di wilayah perimeter pelabuhan dan bandara. Adapun langkah tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait di wilayah pelabuhan dan bandara terkait kebersihan laguna dan menyarankan untuk memanfaatkan area laguna dengan menimbun genangan air dengan material bekas bangunan yang ada di sekitar laguna.

4) Kepadatan Kecoa <2 di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Untuk mencapai target subindikator ini dilaksanakan kegiatan layanan survei vektor kepadatan kecoa dan layanan pengendalian kecoa di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong tahun 2023. Layanan survei vektor kecoa dilaksanakan setiap bulan di seluruh wilayah kerja KKP Kelas III Sorong baik di wilayah Pelabuhan maupun Bandara. Layanan survey vektor kecoa dilaksanakan di 14 lokasi Pelabuhan/Bandara setiap bulan sehingga akumulasi dalam satu tahun adalah 168 lokasi. Dari 168 lokasi Pelabuhan dan Bandara yang rutin dilakukan survey, seluruh lokasi telah memenuhi syarat kepadatan kecoa <2.

Meski hasil temuan kecoa masih relative di bawah standar, namun tetap perlu diwaspadai terjadinya peningkatan jumlah kepadatan kecoa terutama di TTU, TPP dan pemukiman penduduk. Untuk itu, selain memberikan penyuluhan kepada masyarakat, sekaligus juga disampaikan tentang pentingnya menjaga agar tidak terjadi peningkatan populasi kecoa dengan meningkatkan kebersihan lingkungan.

5) Kepadatan Lalat <2 di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Untuk mencapai target subindikator ini dilaksanakan kegiatan layanan survei vektor diare dan layanan pengendalian vektor diare di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong sepanjang tahun 2023. Layanan survei vektor diare dilaksanakan setiap bulan di seluruh wilayah kerja KKP Kelas III Sorong baik di wilayah Pelabuhan maupun Bandara. Layanan survey vektor diare dilaksanakan di 14 lokasi Pelabuhan/Bandara setiap bulan sehingga akumulasi dalam satu tahun adalah 168 lokasi. Dari 168 lokasi Pelabuhan dan Bandara yang rutin dilakukan survey terdapat 33 lokasi yang memiliki indeks kepadatan lalat >2 sehingga perlu dilakukan pengendalian melalui penyemprotan insektisida.

Faktor penyebab tingginya angka kepadatan lalat di wilayah kerja disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- Kepadatan lalat ini merupakan perhitungan rata-rata kepadatan lalat beberapa lokasi pengamatan di wilayah pelabuhan dan bandara. Populasi lalat yang tinggi di wilayah Pelabuhan dan Bandara biasanya disebabkan karena disekitarnya terdapat Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan pasar terutama yang menjual ikan dan buah. Kondisi ini membuat rata-rata kepadatan lalat menjadi lebih tinggi.
- Sanitasi lingkungan yang buruk dan adanya pembangunan pengembangan pelabuhan yang ikut berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan.

Oleh karena factor penyebab di atas, selain dilakukannya pengendalian menggunakan penyemprotan insektisida, KKP Kelas III Sorong juga melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait di wilayah Pelabuhan dan Bandara untuk selalu memperhatikan pengelolaan sampah serta sanitasi lingkungan di wilayah Bandara dan Pelabuhan untuk meminimalisir tempat perindukan lalat. Di sisi lain, KKP Kelas III Sorong juga melakukan edukasi kepada masyarakat komunitas Pelabuhan dan Bandara untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan Pelabuhan dan Bandara.

6) HI perimeter = 0 di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Untuk mencapai target subindikator ini dilaksanakan kegiatan layanan survei vektor DBD dan layanan pengendalian vektor DBD di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong sepanjang tahun 2023. Layanan survei vektor DBD dilaksanakan setiap bulan di seluruh wilayah kerja KKP Kelas III Sorong pada tahun 2023 oleh petugas KKP dan kader. Apabila indeks larva *Aedes aegypti* diatas standar yang ditetapkan (berdasarkan hasil survei), maka dilaksanakan pengendalian vektor DBD.

Besarnya indeks larva *Ae. aegypti* sesuai standar untuk daerah perimeter adalah HI sebesar 0%. Selama tahun 2023, HI perimeter di seluruh wilayah kerja KKP Kelas III Sorong sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu sebesar 0%. Untuk mempertahankan HI perimeter bebas dari larva *Aedes* upaya yang dilakukan di Pelabuhan dan Bandara adalah mengenai pencegahan perindukan larva *Aedes* pada container/tempat penampungan air di Pelabuhan/Bandara.

7) HI buffer <1 di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Untuk mencapai target subindikator ini dilaksanakan kegiatan layanan survei vektor DBD dan layanan pengendalian vektor baik di wilayah perimeter, maupun di wilayah buffer DBD. Layanan survei vektor DBD dilaksanakan setiap bulan sepanjang tahun 2023 di seluruh wilayah kerja oleh petugas KKP dan kader. Apabila indeks larva *Aedes aegypti* diatas standar yang ditetapkan (berdasarkan hasil survei), maka dilaksanakan pengendalian vektor DBD.

Besarnya indeks larva *Ae. aegypti* sesuai standar untuk daerah buffer adalah HI sebesar <1. Selama tahun 2023, HI buffer di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong diketahui bahwa HI pada daerah buffer seluruhnya <1. Hal ini menunjukkan bawah sepanjang tahun 2021 nilai HI di wilayah buffer memenuhi syarat baku mutu sesuai dengan Permenkes No. 50 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan

Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya. Dalam rangka menjaga HI buffer <1 maka dilakukan edukasi secara continue pada masyarakat di wilayah buffer mengenai perilaku 3M plus meliputi Menguras, Menutup, dan Memanfaatkan Kembali serta plus mengendalikan secara biologi (predator alami) dan maupun kimia seperti penggunaan larvasida.

8) Sub Indikator Hasil Pemeriksaan TTU Yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Untuk mencapai target sub indikator ini dilaksanakan kegiatan pemeriksaan sanitasi bangunan TTU di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong sepanjang tahun 2023. Pemeriksaan sanitasi bangunan dilaksanakan di semua wilker KKP Kelas III Sorong secara rutin setiap bulan dengan melakukan inspeksi sanitasi pada bangunan umum, perkantoran, gudang, terminal, dan bangunan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kepelabuhan/kebandaraan.

Adapun yang diperiksa antara lain kondisi halaman, ruang bangunan, penyehatan air, penyehatan udara ruang, pengelolaan limbah, pencahayaan, kebisingan pada ruang kerja, getaran di ruang kerja, pengendalian vektor, kondisi instalasi, pemeliharaan jamban dan kamar mandi. Pemeriksaan sanitasi bangunan dilaksanakan rutin setiap bulan pada semua bangunan yang ada di wilayah kerja Pelabuhan dan Bandara. Pada Tahun 2023 dilakukan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum sebanyak 1077 lokasi yang memenuhi syarat.

9) Sub Indikator Hasil Pemeriksaan TPP Yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Untuk mencapai target subindikator ini dilaksanakan kegiatan pemeriksaan tempat pengolahan pangan di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong sepanjang tahun 2023. Pemeriksaan TPP meliputi pemeriksaan hygiene sanitasi TPP meliputi ketersediaan air bersih, bangunan yang bebas dari pencemaran, kebersihan penyimpanan hingga penyajian makanan dan kebersihan penjamah makanan saat mengolah makanan. Pemeriksaan

sampel makanan secara organoleptic yang dilakukan meliputi bau, warna, rasa dan masa penggunaan. Pemeriksaan tempat pengolahan makanan dilakukan setiap bulan pada semua TPP yang berada di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong dengan melakukan kunjungan langsung ke TPP seperti restoran, rumah makan, kantin dan pedagang makanan jajanan baik di lingkungan Bandara maupun di Pelabuhan.

Penilaian TPP mengacu pada Kepmenkes No.1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga. Indikator/kriteria dinilai antara lain kondisi halaman, letak bangunan, konstruksi bangunan, sarana air, sarana pencucian, penyimpanan alat, penyimpanan makanan, sarana pembuangan sampah, WC/urinoir, kondisi alat dan kondisi penjamah makanan. Pada Tahun 2023, jumlah pengawasan TTP yang dilakukan sebanyak 605 pemeriksaan dengan hasil 604 pemeriksaan memenuhi syarat. Rekomendasi yang diberikan kepada pengelola TPM adalah:

- a) Menjaga kebersihan baik dapur maupun ruang penyajian,
- b) Memastikan pemilihan, penyimpanan, pengolahan dan penyajian makanan terhindar dari risiko pencemaran baik fisik, kimia maupun biologis
- c) Pengelola TPM perlu menyediakan fasilitas personal hygiene seperti wastafel dengan kualitas air bersih yang memenuhi syarat.
- d) Penjamah makanan menerapkan personal hygiene saat mengolah makanan.

10) Sub Indikator Hasil Pemeriksaan PAB Yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

Pemeriksaan PAB merupakan upaya untuk mencegah risiko penyakit menular melalui air. Pemeriksaan air bersih terdiri dari 3 parameter yaitu fisik, bakteriologis dan kimia. KKP Kelas III Sorong melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap reservoir air bersih di wilayah kerja Pelabuhan dan Bandara. Adapun parameter fisik di lapangan meliputi suhu, warna, bau, pH air dan chlor air. Hasil

pemeriksaan menunjukkan seluruh parameter fisik menunjukkan memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes No. 32 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Hygiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum. Pada Tahun 2023, jumlah pengawasan SAB yang dilakukan sebanyak 1.258 titik dengan hasil 1.251 titik memenuhi syarat

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pada tahun 2023, indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan, keberhasilan ini disebabkan:

- 1) Adanya peran serta dari upaya pemberdayaan Masyarakat/Kader/anggota pramuka dalam mendukung kegiatan pengendalian factor risiko lingkungan khususnya dalam pengendalian vector.
- 2) Adanya ketersediaan anggaran yang mencukupi dalam melaksanakan kegiatan dalam DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong Tahun 2023.
- 3) Adanya dukungan dari pimpinan, lintas sektor terkait diantaranya PT. Pelindo, PT. Pelni, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (KUPBU), dan dukungan masyarakat pelabuhan yang telah berperan dalam mendukung kegiatan pengendalian factor risiko.
- 4) Adanya dukungan dari lintas program terkait diantaranya Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong dalam upaya pengendalian factor risiko lingkungan.
- 5) Adanya peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia (SDM) medis, paramedis, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan dan sanitarian melalui seminar/workshop baik secara online atau offline terkait tindakan medis, diklat kekarantinaan, sanitasi lingkungan dan survey/pengendalian vector/binatang pembawa penyakit.

- 6) Telah tertatanya sistem managerial dimulai dari perencanaan anggaran, rencana pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian kegiatan sesuai dengan target.
- 7) Stake holder di lingkungan bandara mendukung kegiatan pengawasan sanitasi. Masing-masing pelabuhan/bandara sudah terbentuk forum pelabuhan/bandara sehat yang dapat memfasilitasi segala permasalahan kesehatan lingkungan.
- 8) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengendalian factor risiko lingkungan telah terpenuhi.

f. Kendala Masalah yang Dihadapi

Kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Terdapat sumber factor risiko perindukan lalat seperti pasar ikan, pasar buah dengan sanitasi pengelolaan sampah yang kurang di beberapa wilayah kerja Pelabuhan/Bandara.
- 2) Pada TPM di wilayah kerja Pelabuhan Rakyat, Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Raja Ampat memiliki bangunan yang bersifat semi permanen sehingga berpotensi terhadap cemaran fisik, keberadaan vector dan agen biologis lainnya.
- 3) Kendaraan operasional ambulance evakuasi tidak dimiliki oleh semua wilayah kerja KKP Kelas III Sorong.
- 4) Belum tersedianya laboratorium kesehatan lingkungan yang terakreditasi di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong sehingga pemeriksaan sampel lingkungan tidak bisa terlaksana dengan maksimal.

g. Pemecahan Masalah

Pemecahan-pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Advokasi kepada pihak pasar terkait dengan pengelolaan sampah sesuai standar dengan tidak menimbun sampah basah >24 jam serta melakukan pengendalian vector lalat secara rutin.
- 2) Diseminasi informasi hasil pemeriksaan TPM kepada pengelola Pelabuhan terkait dengan factor risiko konstruksi bangunan TPM

sehingga menjadi pertimbangan perencanaan pengelola dalam memperbaiki konstruksi bangunan TPM pada tahun-tahun berikutnya.

- 3) Menganalisa kembali terhadap beban kerja sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam pengusulan SDM di tahun berikutnya.
- 4) Pengusulan fasilitas ambulans karantina untuk mendukung system kewaspadaan dini di wilayah kerja.
- 5) Pengusulan anggaran pemeriksaan sampel lingkungan (air bersih dan makanan) di laboratorium terpadu terdekat dengan lokasi KKP Kelas III Sorong.

h. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran. Hasil perhitungan Efisiensi berada pada range -20 s.d +20. -20 artinya tidak efisien sedangkan +20 artinya adalah efisien. Sedangkan nilai konversi efisiensi berada pada range 0-100%, disebut efisien bila NE sebesar 50%. Rumus untuk pengukuran efisiensi dan Nilai Efisiensi (NE) tersebut sebagai berikut:

1) Rumus Efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Efisiensi penggunaan sumber daya capaian indikator indeks pengendalian factor risiko di pintu masuk negara tahun 2023 adalah 13.68% dengan perhitungan sebagai berikut :

PAKi : Rp. 449,472,000,-

RAKi : Rp. 408,399,483,-

CKi : 105,26%

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((449,472,000 \times 105,26\%) - 408,399,483)}{\sum_{i=1}^n (449,472,000 \times 105,26\%)} \times 100\%$$

$$E = 0.1368 \times 100\%$$

$$E = 13.68\%$$

2) Rumus Nilai Efisiensi (NE)

$$\text{Nilai Efisiensi} = \frac{50}{100} + \left(\frac{\text{Efisiensi}}{20 \times 50} \right)$$

Dari rumus di atas maka hasil perhitungan Nilai Efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= \frac{50}{100} + \left(\frac{E}{20 \times 50} \right) \\ &= 50\% + \left(\frac{0.1368}{20} \times 50\% \right) \\ &= 84.20\% \end{aligned}$$

Didapatkan hasil Nilai Efisiensi pada indikator satu adalah sebesar **84.20%**.

3) Analisis Efisiensi

- Hasil perhitungan Efisiensi adalah 13.68% berada pada range 0 s.d +20 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator tiga **EFISIEN**.
- Indikator Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara telah sepenuhnya terlaksana sehingga nilai efisiensi sebesar 84.20%. Dengan anggaran 90.86% dapat mencapai kinerja 105.26%. Tingginya nilai efisiensi pada indikator ini dikarenakan persentase capaian masing-masing komponen mayoritas telah

mencapai 100% dengan nilai rata-rata 99,55%. Pemeriksaan SAB dengan parameter kimia dan bakteriologis pada tahun 2023 telah terlaksana melalui pemeriksaan di laboratorium terpadu BTKL Ambon sehingga mempengaruhi nilai capaian.

4. INDIKATOR EMPAT

Nilai Kinerja Anggaran

a. Definisi operasional

Indikator nilai kinerja anggaran merupakan performance budgeting penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran oleh satuan kerja difasilitasi dengan Aplikasi SMART DJA. Variabel yang diukur antara lain capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi volume keluaran (RVK) dan realisasi volume indikator keluaran kegiatan (RVKK) dengan menggunakan formula rata geometric. Data capaian nilai kinerja anggaran ini di ambil dari Smart DJA kementerian Keuangan.

b. Rumus/cara perhitungan

Rumus perhitungan nilai kinerja anggaran adalah :

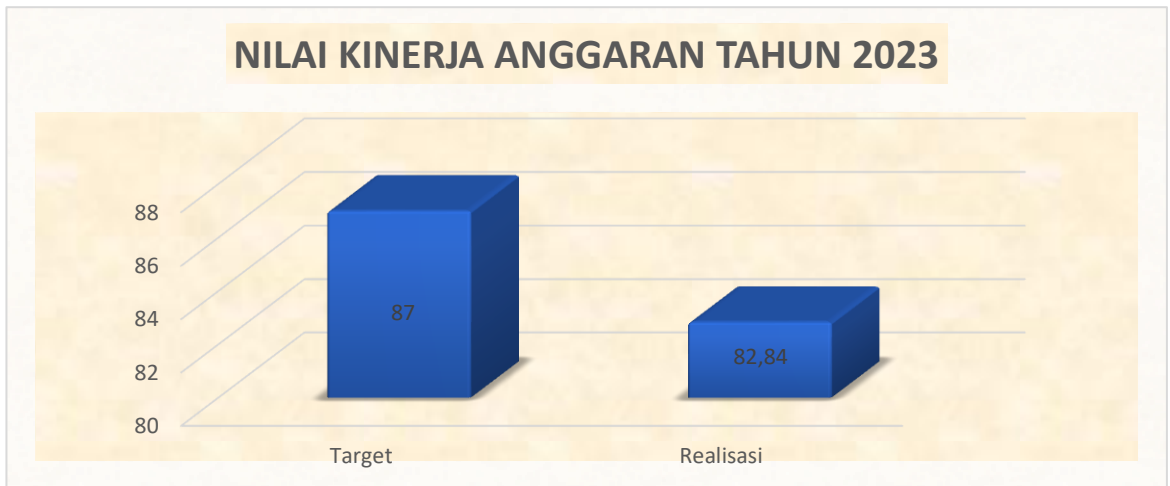
Realisasi volume kegiatan/target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Vol Kegiatan}}{\text{Target Vol Kegiatan}} \times \frac{\text{Realisasi Indikator Kegiatan}}{\text{Target Indikator Kegiatan}}$$

Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 yang di ambil dari SMART DJA kemenkeu dengan nilai sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 82.84.

c. Capaian indikator

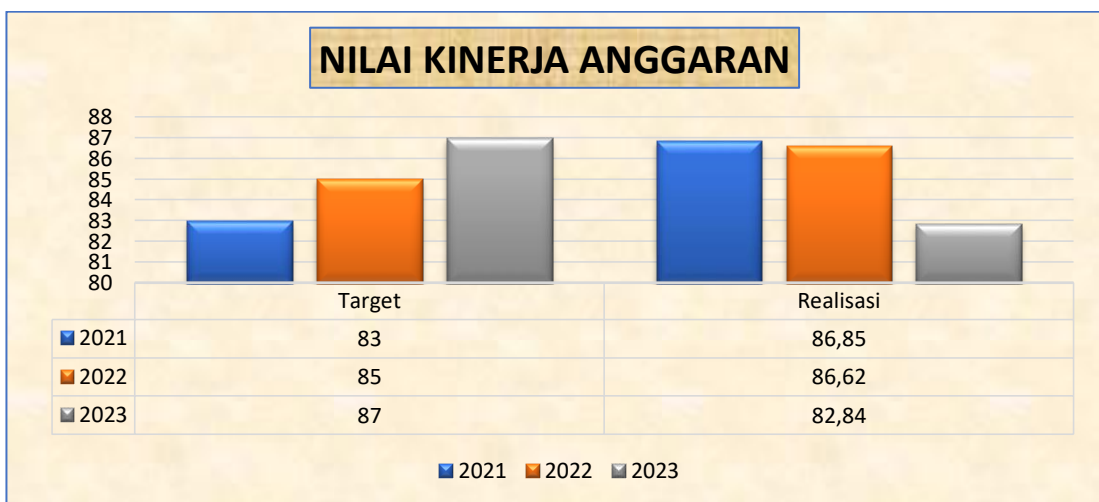
Target indikator nilai kinerja anggaran tahun 2023 sebesar 87, dengan capaian nilai kinerja anggaran yang bersumber dari SMART DJA kemenkeu sebesar 82.84 dengan persentase capaian kinerja sebesar 95.22%, capain ini 4.16% lebih rendah dari target. Berikut grafik perbandingan target dan capaian kinerja nilai kinerja anggaran tahun 2023.



Grafik 3. 33 Target dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023

1) Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dengan tahun sebelumnya

Nilai kinerja anggaran tahun 2023 sebesar 82.84, tahun 2022 sebesar 86.62, dan tahun 2021 sebesar 86.85, terjadi penurunan capaian sebesar 3.78 terhadap capaian tahun 2022 dan turun 3.71 terhadap capaian tahun 2021, berikut ini grafik yang menggambarkan perbandingan capaian kinerja anggaran tahun 2022 dengan realisasi dua tahun sebelumnya:



Grafik 3. 34 Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2021, 2022 dan tahun 2023

2) Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2021, 2022, 2023 dan target jangka menengah (Target RAK Tahun 2024)

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, maka capaian nilai kinerja anggaran tahun 2023 masih dibawah target RAK tahun 2024 sebesar 88. Berikut grafik yang menggambarkan capaian kinerja tahun 2021, 2022, 2023 dan target jangka menengah (Target RAK 2024). Proyeksi capaian NKA tahun 2024 adalah sebesar 85.43. Nilai tersebut didapatkan dari rata-rata capaian indicator empat dari tahun 2021 s.d 2023. Nilai proyeksi masih di bawah target tahun 2024 yaitu 88 sehingga diperlukan upaya tindak lanjut yang spesifik pada kendala tahun 2023 sehingga target dapat tercapai.

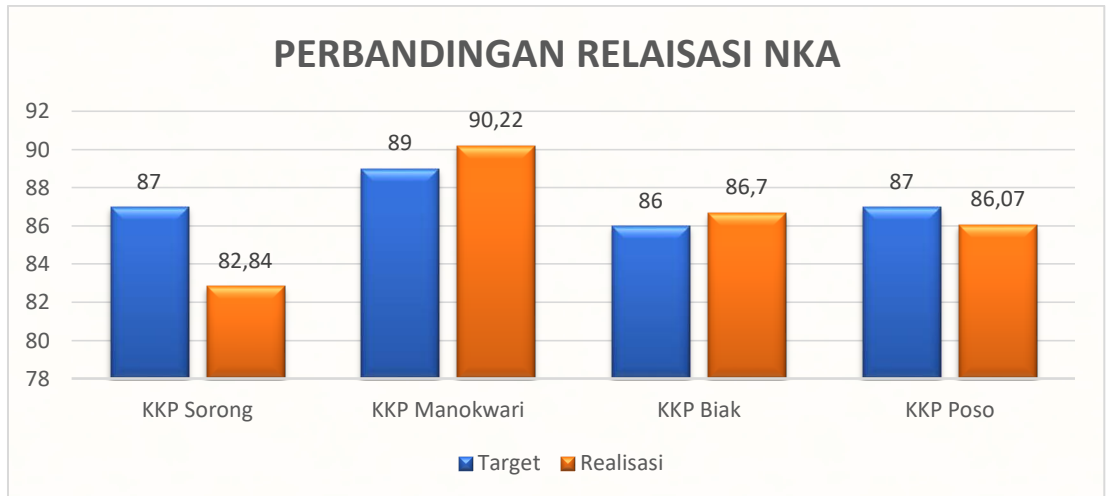


Grafik 3. 35 Perbandingan Realisasi tahun 2020, 2021, 2023 dan target RAK tahun 2024

3) Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 dengan organisasi sejenis/setara

Apabila dibandingkan dengan capaian indikator nilai kinerja anggaran KKP kelas III Manokwari, KKP Kelas III Biak dan KKP Kelas III Poso, maka capaian indikator nilai kinerja anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong tahun 2023 lebih rendah

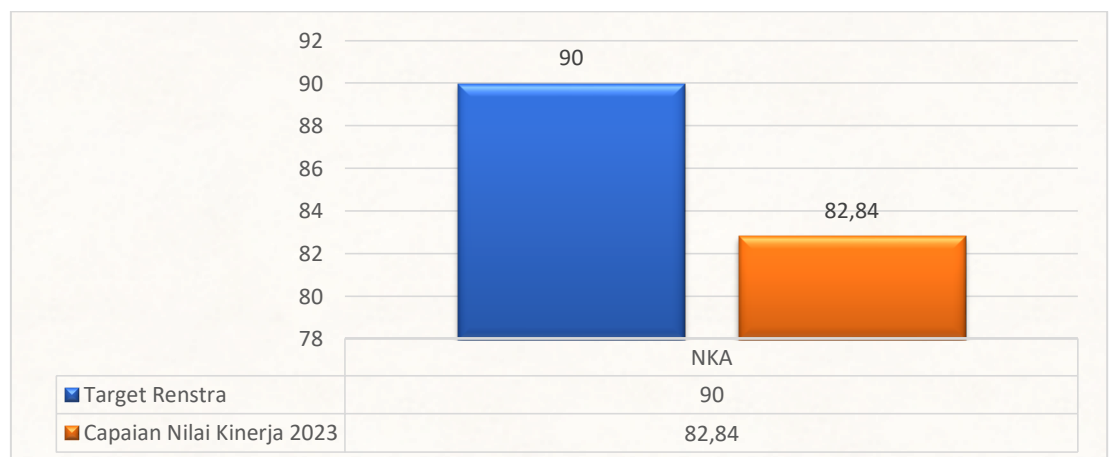
dari capaian KKP lain yang setara. Berikut ini grafik perbandingan Capaian Kinerja KKP kelas III Sorong, KKP Kelas III Manokwari, KKP Kelas III Biak dan KKP Kelas III Poso.



Grafik 3. 36 Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2023 KKP Sorong dan KKP Manokwari, KKP Biak dan KKP Poso

4) Perbandingan dengan target Renstra Kementerian Kesehatan

Apabila disandingkan dengan target Nilai Kinerja Penganggaran Kementerian Kesehatan sebesar 90 pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2021 – 2024 maka capaian nilai kinerja anggaran tahun 2023 sebesar 82.84 masih dibawah target yang ditetapkan. Adapun perbandingan antara capaian realisasi nilai kinerja tahun 2023 dengan target renstra Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Grafik 3. 37 Perbandingan Capaian Realisasi Nilai Kinerja dengan Renstra Kemenkes RI

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Tercapainya target indikator nilai kinerja anggaran tahun 2023 karena berbagai optimalisasi capaian realisasi anggaran, optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan, optimalisasi anggaran yang berpotensi tidak terserap dengan melakukan revisi DIPA.

e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Adapun penyebab tercapainya target indikator nilai kinerja anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Memaksimalkan capaian penyerapan anggaran tahun 2023 sebesar 97.61%; Nilai konsistensi 95,79; Efisiensi 0,56, Nilai Efisiensi 51,4.
- 2) Optimalisasi anggaran belanja modal pengadaan lahan pada wilayah kerja Fak Fak menjadi Pembangunan pagar semi permanen dalam rangka mengamankan Aset.
- 3) Adapun turunnya nilai kinerja anggaran tahun 2023 karena efisiensi anggaran yang relative rendah sehingga belum mampu mengangkat Nilai kinerja anggaran lebih tinggi dari tahun 2022.

f. Kendala masalah yang dihadapi

- 1) Tidak tercapainya capaian output kegiatan peningkatan kompetensi SDM dikarenakan target pada DIPA terlalu besar
- 2) Pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana PNBPN tidak terserap secara optimal dikarenakan terdapat kelebihan penggunaan pada tahun 2022 sehingga menjadi pengurang pada tahun 2023.

g. Pemecahan masalah

- 1) Untuk lebih memperhatikan lagi perhitungan pegawai yang akan ditingkatkan kompetensinya
- 2) Realisasi anggaran bersumber PNBPN harus sejalan dengan penerimaan PNBPN, sehingga tidak terjadinya kelebihan pengambilan.

h. Efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran

dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran. Hasil perhitungan Efisiensi berada pada range -20 s.d +20. -20 artinya tidak efisien sedangkan +20 artinya adalah efisien. Sedangkan nilai konversi efisiensi berada pada range 0-100%, disebut efisien bila NE sebesar 50%. Rumus untuk pengukuran efisiensi dan Nilai Efisiensi (NE) tersebut sebagai berikut:

1) Rumus Efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times C_{ki}) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times C_{ki})} \times 100\%$$

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian Keluaran i

Efisiensi penggunaan sumber daya capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 adalah -2,51% dengan perhitungan sebagai berikut:

PAK_i : 12,559,814,000

RAK_i : 12,259,070,878

CK_i : 95.21%

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((12,559,814,000 \times 95.21\%) - 12,259,070,878)}{\sum_{i=1}^n (12,559,814,000 \times 95.21\%)} \times 100\%$$

E = -0.0251 x 100 %

E = -2.51 %

2) Rumus Nilai Efisiensi (NE)

$$\text{Nilai Efisiensi} = \frac{50}{100} + \left(\frac{\text{Efisiensi}}{20 \times 50} \right)$$

Dari rumus di atas maka hasil perhitungan Nilai Efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{50}{100} + \left(\frac{E}{20 \times 50} \right) \\ &= \frac{50}{100} + \left(\frac{-0,0251}{20 \times 50} \right) \\ &= 43\%\end{aligned}$$

Didapatkan hasil Nilai Efisiensi pada indikator satu adalah sebesar **43%**.

3) Analisis Efisiensi

- a) Hasil perhitungan Efisiensi adalah -2.51% berada pada range 0 s.d +20 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator empat **TIDAK EFISIEN**.
- b) Indikator nilai kinerja anggaran tidak efisien dengan nilai efisiensi sebesar 43%. Dengan anggaran 97% dapat mencapai kinerja 95.21%. Nilai efisiensi lebih dari 50% pada indikator ini dikarenakan capaian kinerja lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

5. INDIKATOR LIMA

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

a. Definisi operasional

IKPA merupakan alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Adapun Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN). Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran mengacu pada tiga aspek pengukuran yaitu :

- 1) Kualitas perencanaan anggaran dengan bobot 20; dengan indikator kinerja :
 - a) Revisi DIPA (bobot 10)
 - b) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 10)
- 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan bobot 55; dengan indikator kinerja :
 - a) Penyerapan anggaran (bobot 20)
 - b) Belanja kontraktual (bobot 10)
 - c) Penyelesaian tagihan (bobot 10)
 - d) Penyelesaian UP dan TUP (bobot 10)
 - e) Dispensasi SPM (bobot 5)
- 3) Kualitas hasil pelaksanaan anggaran, bobot nilai 25 dengan indikator kinerja Capaian Output.

b. Rumus/cara perhitungan

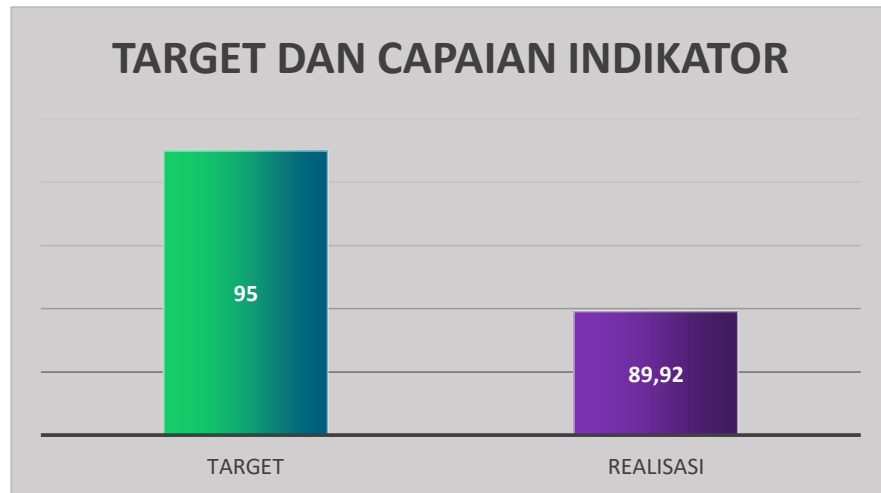
Perhitungan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong diambil dari OM-SPAN Kementerian Keuangan tahun anggaran 2023 dengan nilai capaian IKPA 89.92, rincian nilai masing masing indikator sebagai berikut :

TABEL 3 12 Nilai 13 Indikator IKPA tahun 2023

No	Indikator	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	10	10	72.62
		Deviasi Halaman III DIPA	10	4.52	
2	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	20	18.39	95.31
		Belanja Kontraktual	10	8.79	
		Penyelesaian Tagihan	10	10	
		Pengelolaan UP dan TUP	10	9.67	
		Dispensasi SPM	5	5	
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	25	23.55	94.19
Nilai Akhir (nilai total/konversi bobot)					89.92

c. Capaian Indikator

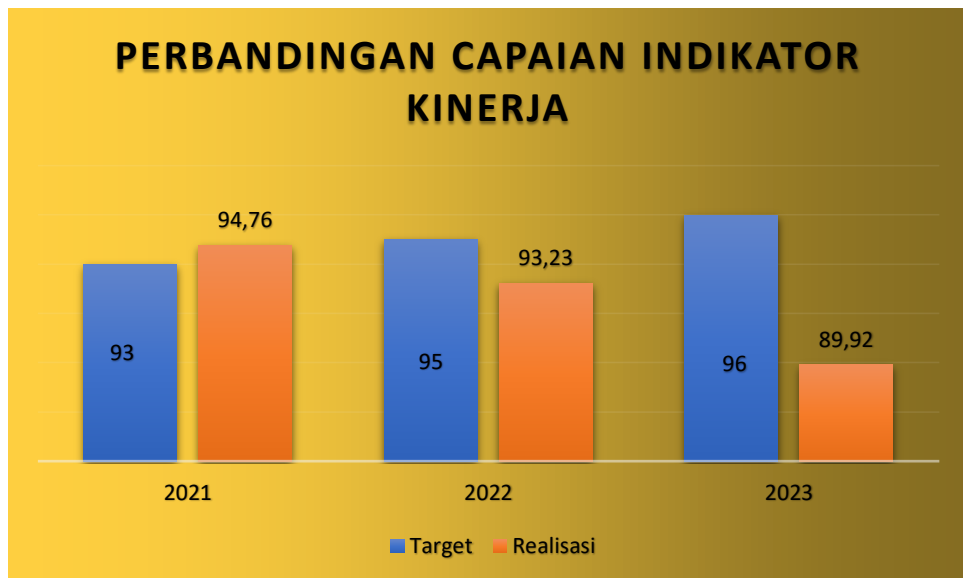
Target nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) tahun 2023 sebesar 95 dengan realisasi capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) tahun 2023 sebesar 89.92 atau 94,65% dari target.



Grafik 3. 38 Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

1) Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 s.d 2023

Realisasi capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) tahun 2022 sebesar 93.23 atau 101.92% dan capaian IKPA tahun 2023 sebesar 89.92, terjadi penurunan capaian sebesar 8.81 dari capaian 2021. Berikut ini grafik perbandingan target dan capaian IKPA tahun 2021 sampai dengan tahun 2023:



Grafik 3. 39 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2023

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian IKPA tahun 2023 masih dibawah target jangka menengah dan terpaut angka 6.08 dari target RAK tahun 2024 yaitu 96. Adapun proyeksi capaian indicator pada tahun 2024 adalah 92.63 diperoleh dari nilai rata-rata capaian tahun 2021 s.d 2023. Nilai proyeksi masih di bawah target tahun 2024 yaitu 96 sehingga diperlukan upaya tindak lanjut yang spesifik pada kendala tahun 2023 sehingga target dapat tercapai.



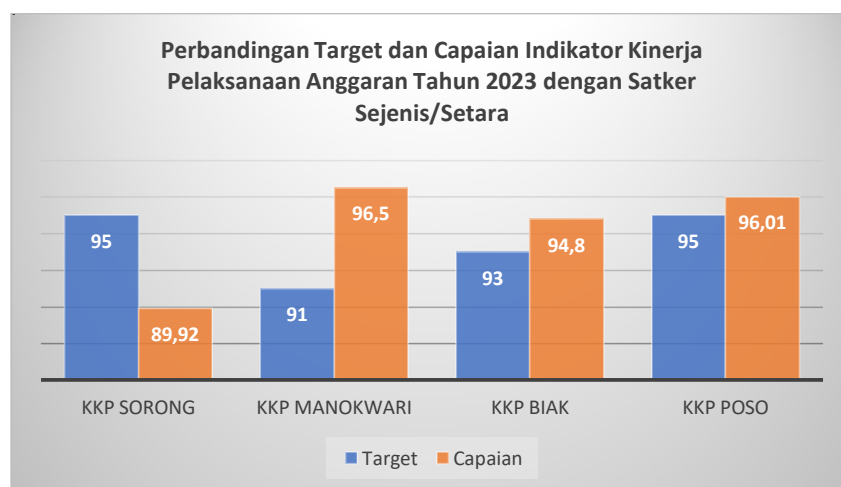
Grafik 3. 40 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dengan Target RAK

2) Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dengan Satker Sejenis/Setara

Perbandingan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023 dengan dengan organisasi sejenis/setara ini merupakan perbandingan capaian IKPA KKP Sorong dengan KKP Manokwari, KKP Biak dan KKP Poso. Realisasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran KKP Kelas III Sorong yaitu 89,92 dari target 95 nilai tersebut lebih rendah dari KKP Kelas III Manokwari dengan nilai 95.50 dari target 91, KKP Kelas III Biak dengan nilai 94,80 dari target 93 dan Kelas III Poso dengan nilai 96.01 dari target 95.

Berikut ini grafik perbandingan target dan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023 dengan satker sejenis:



Grafik 3. 41 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dengan Satker Sejenis/Setara

3) Perbandingan dengan target Renstra kementerian Kesehatan

Capaian realisasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong sebesar 89.92 mendukung dari indikator Renstra Kementerian Kesehatan untuk sasaran program “persentase jumlah satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ≥ 80 “.

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Upaya untuk menunjang pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran antara lain :

- 1) Melakukan perencanaan dengan matang agar tidak terjadi Deviasi Halaman III DIPA secara terus menerus di triwulan berjalan.

- 2) Melakukan revisi DIPA untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, dan memastikan tidak ada pagu minus di akhir tahun anggaran untuk belanja gaji pegawai.
- 3) Melakukan akselerasi kemajuan tagihan dengan mempercepat serapan belanja, sehingga sampai dengan akhir tahun 2023 capaian realisasi anggaran mencapai 98.04%.
- 4) Mendaftarkan/menyampaikan ADK Data kontrak Ke KPPN paling lambat lima hari kerja setelah kontrak ditandatangani oleh PPK dan pihak Penyedia dengan tujuan kepatuhan terhadap regulasi dan untuk menjamin kepastian penyediaan dana.
- 5) Meminimalisir kesalahan SPM dengan memastikan kebenaran data supplier, kebenaran rekening pihak penerima, kelengkapan dokumen dan ADK SPM serta kebenaran pada uraian SPM.
- 6) Melakukan revolving uang persediaan sebelum batas akhir satu bulan setelah SP2D UP terbit.
- 7) Melakukan pengajuan SPM akhir tahun dengan mengikuti ketentuan pada langkah langkah akhir tahun dan tidak melebihi batas waktu, sehingga pada akhir tahun tidak terdapat dispensasi pengajuan SPM yang disebabkan oleh keterlambatan pengajuan SPM.
- 8) Melakukan perbaikan kinerja melalui pemantauan dan pengawasan secara online untuk memastikan keselarasan penyerapan anggran dan kinerja capaian outputnya.

e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Tidak Tercapainya target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2023 antara lain :

- 1) Indikator Deviasi Halaman III DIPA dibawah nilai bobot disebabkan oleh Perencanaan tidak sesuai dengan Realiasi.
- 2) Indikator Penyerapan Anggran dibawah nilai bobot disebabkan oleh Penyerapan Belanja Barang dan Belanja Modal Pada Awal Tahun belum optimal.
- 3) Indikator belanja Kontraktual dibawah nilai bobot disebabkan karena adanya keterlambatan memasukan dokumen pendukung kontrak pada awal tahun.

f. Kendala masalah yang dihadapi

Adanya Permintaan Efisiensi dari Pusat terkait Anggaran Perjalanan Dinas, sehingga beberapa kegiatan tertunda (tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan).

g. Pemecahan masalah

- 1) Diperlukan koordinasi dengan Pihak KPPN mengenai langkah-langkah dalam meningkatkan nilai deviasi halaman III DIPA.
- 2) Mengupayakan Optimalisasi Penyerapan Anggaran berupa belanja barang dan belanja modal sesuai dengan RPK dan RPD Satker

h. Efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran. Hasil perhitungan Efisiensi berada pada range -20 s.d +20. -20 artinya tidak efisien sedangkan +20 artinya adalah efisien. Sedangkan nilai konversi efisiensi berada pada range 0-100%, disebut efisien bila NE sebesar 50%. Rumus untuk pengukuran efisiensi dan Nilai Efisiensi (NE) tersebut sebagai berikut:

1) Rumus Efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times Cki) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times Cki)} \times 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Efisiensi penggunaan sumber daya capaian indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 adalah -4,30% dengan perhitungan sebagai berikut :

PAKi : 306.851.000

RAKi : 302.934.554

CKi : 94.65%

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((306.851.000 \times 94.65\%) - 302.934.554)}{\sum_{i=1}^n (234.822.002 \times 94.65\%)} \times 100\%$$
$$E = -0.04303 \times 100\%$$
$$E = -4,30\%$$

2) Rumus Nilai Efisiensi (NE)

$$\text{Nilai Efisiensi} = \frac{50}{100} + \left(\frac{\text{Efisiensi}}{20 \times 50} \right)$$

Dari rumus di atas maka hasil perhitungan Nilai Efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= \frac{50}{100} + \left(\frac{E}{20 \times 50} \right) \\ &= \frac{50}{100} + \left(\frac{-0,04303}{20 \times 50} \right) \\ &= \mathbf{39\%} \end{aligned}$$

Didapatkan hasil Nilai Efisiensi pada indikator satu adalah sebesar **39%**.

3) Analisis Efisiensi

- a) Hasil perhitungan Efisiensi adalah -4.30% berada pada range 0 s.d +20 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator lima **TIDAK EFISIEN**.
- b) Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah terlaksana tidak efisien dengan nilai efisiensi sebesar 39%. Dengan capaian anggaran 89.92% tidak dapat mencapai target kinerja 95%. Nilai efisiensi kurang dari 50% pada indikator ini didukung factor:
 - Tidak ada dispensasi SPM
 - Tidak ada pagu minus
 - Serapan anggaran diatas 90%
 - Revolving uang persediaan tepat waktu
 - Pengajuan SPM Bulan Desember sesuai dengan ketentuan langkah langkah akhir tahun dan
 - Capaian Output 100%.

6. INDIKATOR ENAM

Kinerja Implementasi WBK Satker

a. Definisi operasional

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Implementasi WBK berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Outcome dalam indikator ini yaitu meningkatnya kualitas satker dengan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik dan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self Assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

b. Rumus/cara perhitungan

Nilai implementasi WBK Satker di hitung dari akumulasi Nilai total pengungkit dan nilai Komponen Hasil seperti yang ditampilkan pada table dibawah :

TABEL 3. 13 Nilai hasil desk kinerja implementasi WBK Satker

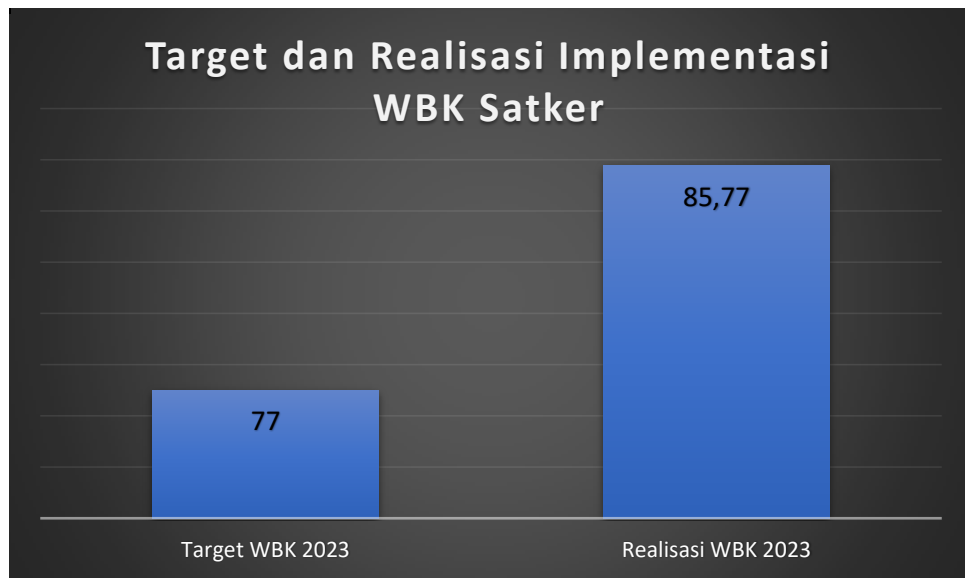
No	Materi	Nilai	Rekomendasi Perbaikan
I	KOMPONEN PENGUNGKIT	50.16	
A	Aspek Pemenuhan	24.51	
1	<i>Manajemen Perubahan</i>	4.00	
2	<i>Penataan Tatalaksana</i>	2.14	

3	<i>Penataan Sistem Manajemen SDM</i>	4.88	
4	<i>Penguatan Akuntabilitas</i>	4.15	
5	<i>Penguatan Pengawasan</i>	5.14	
6	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</i>	4.20	
B	Aspek Reform	25.65	
1	<i>Manajemen Perubahan</i>	3.71	
2	<i>Penataan Tatalaksana</i>	2.00	
3	<i>Penataan Sistem Manajemen SDM</i>	4.25	
4	<i>Penguatan Akuntabilitas</i>	4.22	
5	<i>Penguatan Pengawasan</i>	6.88	
6	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</i>	4.59	
II	KOMPONEN HASIL	35.61	
1	<i>Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel</i>	20.73	
a	<i>Nilai Survei Persepsi (Survei Eksternal)</i>	16.98	
b	<i>Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya</i>	3.75	
2	<i>Pelayanan Publik Yang Prima</i>	14.88	
	<i>Nilai survei persepsi kualitas pelayanan (Survei Eksternal)</i>	14.88	
	Total Nilai	85.77	

Dari tabel diatas di diketahui penilaian implementasi WBK satker didapatkan dari hasil penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil. Nilai yang didapatkan pada komponen pengungkit adalah 50,16 dan komponen hasil 35,61 sehingga didapatkan nilai total 85,77. Adapun nilai paling rendah pada komponen pengungkit adalah penilaian Penataan Tatalaksana baik pada aspek pemenuhan maupun reform. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut yang lebih spesifik pada komponen dengan nilai rendah.

c. Capaian Indikator

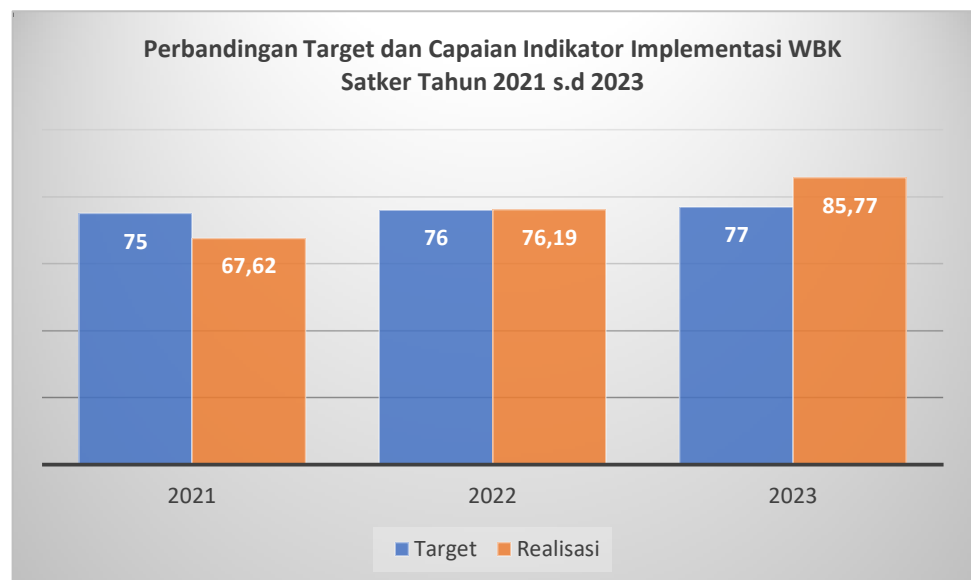
Capaian indikator implementasi WBK Satker tahun 2023 sebesar 85.77 dari target 77, dengan persentase capaian 111.39% dari target. Capaian indikator implementasi WBK satker tahun 2021 sebesar 67.62 dari target 75, capaian tahun 2022 sebesar 76.19 dari target 76. Terjadi peningkatan capaian sebesar 9.58 poin dari capaian kinerja tahun 2022. Berikut ini grafik perbandingan target dan realisasi tahun 2023.



Grafik 3. 42 Target dan Realisasi Implementasi WBK Satker

1) Perbandingan Target dan Capaian Indikator Implementasi WBK Satker Tahun 2021 s.d 2023

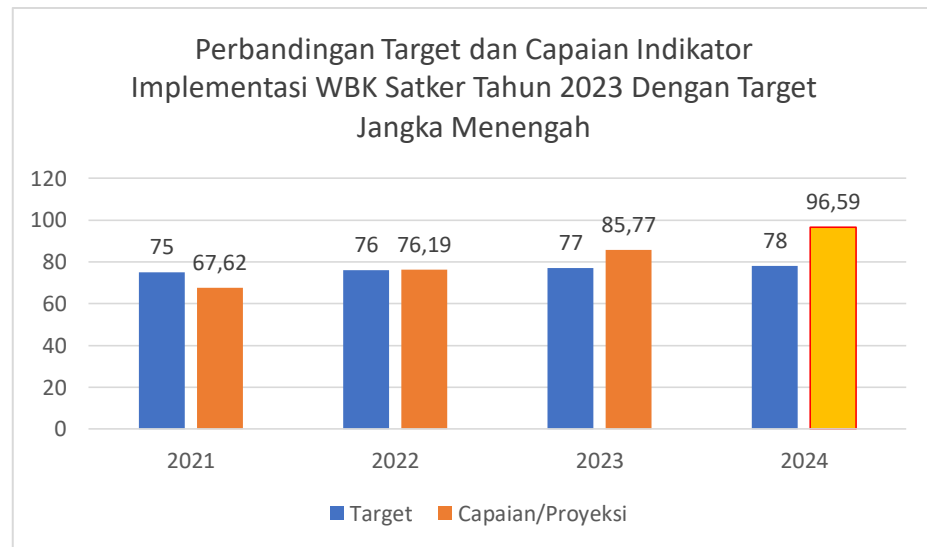
Capaian indikator kinerja implementasi WBK Satker dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 capaian sebesar 67.62, tahun 2021 sebesar 67.62 dan tahun 2022 sebesar 76.19, dan tahun 2023 sebesar 85.77. Berikut ini grafik perbandingan capaian kinerja implementasi wbk satker tahun 2021 sampai dengan tahun 2023:



Grafik 3. 43 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Implementasi WBK Satker Tahun 2021 s.d 2023

2) Perbandingan Target dan Capaian Indikator Implementasi WBK Satker Tahun 2023 dengan target jangka menengah

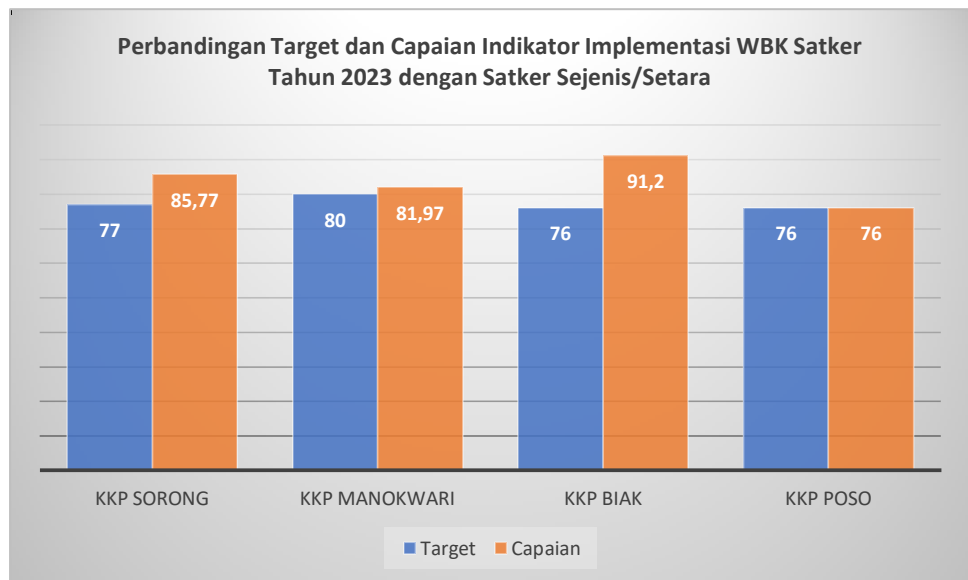
Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 Capaian Kinerja Implementasi WBK Satker tahun 2023 berada diatas target tahun 2024. Adapun proyeksi capaian target indicator implementasi nilai WBK tahun 2024 adalah 96,69. Nilai tersebut diperoleh dari capaian tahun 2023 ditambah rata-rata persentase capaian indicator tahun 2021 s.d 2023 sebesar 12,62%.



Grafik 3. 44 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Implementasi WBK Satker Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

3) Perbandingan Target dan Capaian Indikator Implementasi WBK Satker Tahun 2023 dengan Satker Sejenis/Setara

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja KKP Kelas III Manokwari, KKP Kelas III Biak dan KKP Kelas III Merauke tahun 2023, capaian kinerja Implementasi WBK Satker KKP Kelas III Sorong lebih tinggi dari capaian kinerja KKP Kelas III Manokwari namun lebih rendah dari capaian kinerja KKP Kelas III Biak. Berbeda jika dibandingkan dengan capaian indicator Implementasi WBK Satker KKP Kelas III Poso yang mana memiliki nilai capaian yang lebih rendah yaitu 76. Perbandingan masing-masing satker dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3. 45 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dengan Satker Sejenis/Setara

4) Perbandingan dengan target Renstra kementerian Kesehatan

Capaian Indikator Implementasi WBK Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong tahun 2023 dengan nilai sebesar 85.77 mendukung Renstra Kementerian Kesehatan pada sasaran program “Persentase satker KP/KD yang telah memenuhi predikat WBK/WBBM (Kemenkes/Nasional)”.

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target nilai implementasi WBK adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya inovasi baru seperti Survey Role Mode Pimpinan, Motto Pelayanan (NOKEN).
- 2) Telah dibentuk SK Tim Agent of Change (AoC).
- 3) Telah dibuat dan disusun SOP dari masing-masing seluruh kegiatan yang dilakukan oleh KKP Kelas III Sorong, baik yang bersifat administrative maupun teknis.
- 4) LHP yang sebesar 50% telah dicicil setiap bulannya melalui pemotongan tunjangan kinerja oleh pihak wajib bayar.
- 5) Program Kerja terlaksana sesuai dengan draf rancangan kegiatan.

e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Nilai implementasi WBK satker Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas III Sorong Tahun 2023 telah mencapai target, hal tersebut disebabkan karena :

- 1) Pada manajemen perubahan (komponen penguungkit) sudah didukung oleh adanya dokumen Agent Of Change (AoC)
- 2) Pada penataan tatalaksana (komponen penguungkit) sudah dibuat dokumen SOP disetiap kegiatan yang dilakukan oleh KKP Kelas III Sorong
- 3) Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti (komponen hasil) masih belum diselesaikannya TLHP sebesar 50%.
- 4) Adanya inovasi baru seperti Survey Role Mode Pimpinan, Motto Pelayanan (NOKEN).

f. Kendala masalah yang dihadapi

Pihak wajib bayar dalam penyelesaian LHP sudah bertugas di satker lain.

g. Pemecahan masalah

KKP kelas III Sorong setiap bulan membuat billing untuk pembayaran LHP dan mengirimkan ke Bendahara satker tempat wajib bayar bertugas, serta melakukan kontrol bahwa LHP tersebut diangsur secara lancar.

h. Efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran. Hasil perhitungan Efisiensi berada pada range -20 s.d +20. -20 artinya tidak efisien sedangkan +20 artinya adalah efisien. Sedangkan nilai konversi efisiensi berada pada range 0-100%, disebut efisien bila NE sebesar

50%. Rumus untuk pengukuran efisiensi dan Nilai Efisiensi (NE) tersebut sebagai berikut:

1) Rumus Efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian Keluaran i

Efisiensi penggunaan sumber daya capaian indikator Implementasi WBK Satker tahun 2023 adalah 4.69% dengan perhitungan sebagai berikut :

PAK_i : 273.787.000

RAK_i : 260.282.356

CK_i : 111.38%

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((273.787.000 \times 111.38\%) - 260.282.356)}{\sum_{i=1}^n (273.787.000 \times 111.38\%)} \times 100\%$$

E = 0.1466 x 100 %

E = 14.66 %

2) Rumus Nilai Efisiensi (NE)

$$\text{Nilai Efisiensi} = \frac{50}{100} + \left(\frac{Efisiensi}{20 \times 50} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= \frac{50}{100} + \left(\frac{E}{20 \times 50} \right) \\ &= \frac{50}{100} + \left(\frac{0,1466}{20 \times 50} \right) \\ &= 87\% \end{aligned}$$

Didapatkan hasil Nilai Efisiensi pada indicator satu adalah sebesar **87%**.

3) Analisis Efisiensi

- a) Hasil perhitungan Efisiensi adalah 14,66% berada pada range 0 s.d +20 sehingga dapat disimpulkan bahwa indicator enam **EFISIEN**.
- b) Indikator kinerja implementasi WBK satker telah terlaksana efisien dengan nilai efisiensi sebesar 87%. Dengan anggaran 95.07% dapat mencapai kinerja 111.38%. Nilai efisiensi lebih dari 50% pada indicator ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai implementasi WBK Satker dari tahun sebelumnya diatas target minimal yaitu 77.

7. INDIKATOR TUJUH

Persentase ASN Yang Ditingkatkan kompetensinya

a. Definisi operasional

Peningkatan Kapasitas ASN merupakan pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1(satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Pengembangan kompetensi pegawai dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan klasikal yaitu tatap muka di kelas, dan pelatihan non klasikal yaitu praktik kerja/pembelajaran luar kelas. Outcome indikator ini yaitu meningkatnya kapasitas ASN KKP Kelas III Sorong untuk mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik.

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

b. Rumus/cara perhitungan

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 20 JPL dibagi dengan jumlah seluruh ASN di kali 100%

$$\text{Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya} = \frac{\text{JML ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya}}{\text{Target ASN yang ditingkatkan Kompetensinya}} \times 100\%$$

ASN yang ditingkatkan kapasitasnya minimal 20 JPL = 29 Orang

Jumlah ASN = 36 Orang

$$\text{Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL} = \frac{29}{36} \times 100\% = 80,56\%$$

c. Capaian Indikator

Target peningkatan kompetensi ASN tahun 2023 sebesar 90% dari total 36 pegawai. Pada tahun 2023 jumlah ASN yang mengikuti

program peningkatan kompetensi ASN sampai dengan 20 JPL dalam satu tahun sebanyak 29 orang dari total jumlah ASN 36 orang. Apabila di konversi dalam persentase sebesar 80.56%, dengan persentase capaian 89.44% dari target tahun 2023.

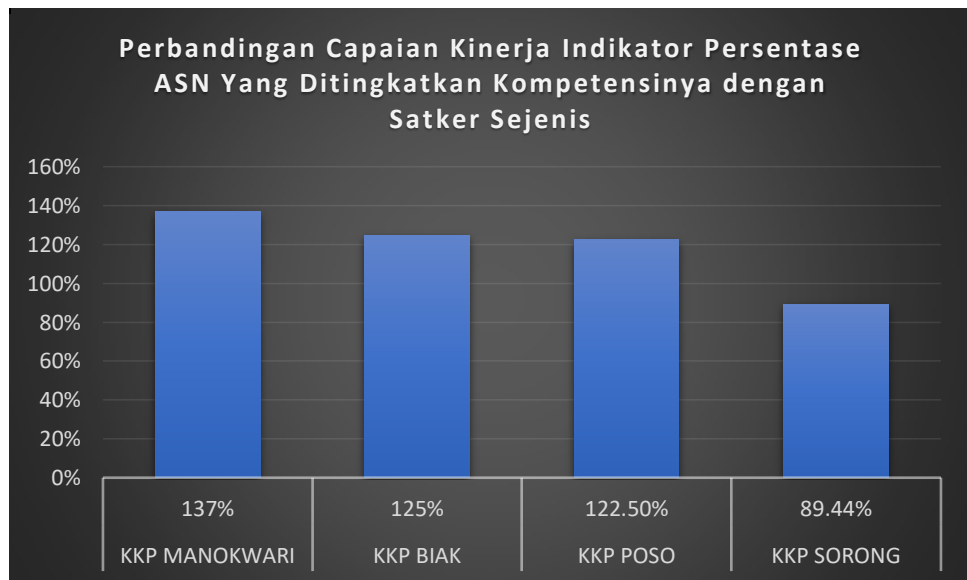
Pada tahun 2021 pegawai yang mengikuti program peningkatan kompetensi ASN sampai dengan 20 JPL sebanyak 26 orang atau 81.25% dari target total jumlah ASN 32 orang, terjadi peningkatan 7 orang pegawai (794%) pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 pegawai yang mengikuti program peningkatan kompetensi ASN sampai dengan 20 JPL sebanyak 29 orang atau 80.58% dari target 90% total jumlah ASN 35 orang. Berikut table perbandingan capaian indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 :

TABEL 3. 14 Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2020 s.d 2023

No	Tahun	Jml Pegawai	Target		Realisasi		Persentase Capaian
			Pegawai	Persentase	Pegawai	Persentase	
1	2021	32	25	80%	26	81.25%	101.56%
2	2022	37	32	85%	33	89.19%	104.93%
3	2023	36	35	90%	29	80.56%	89.44%

1) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya dengan Satker Sejenis

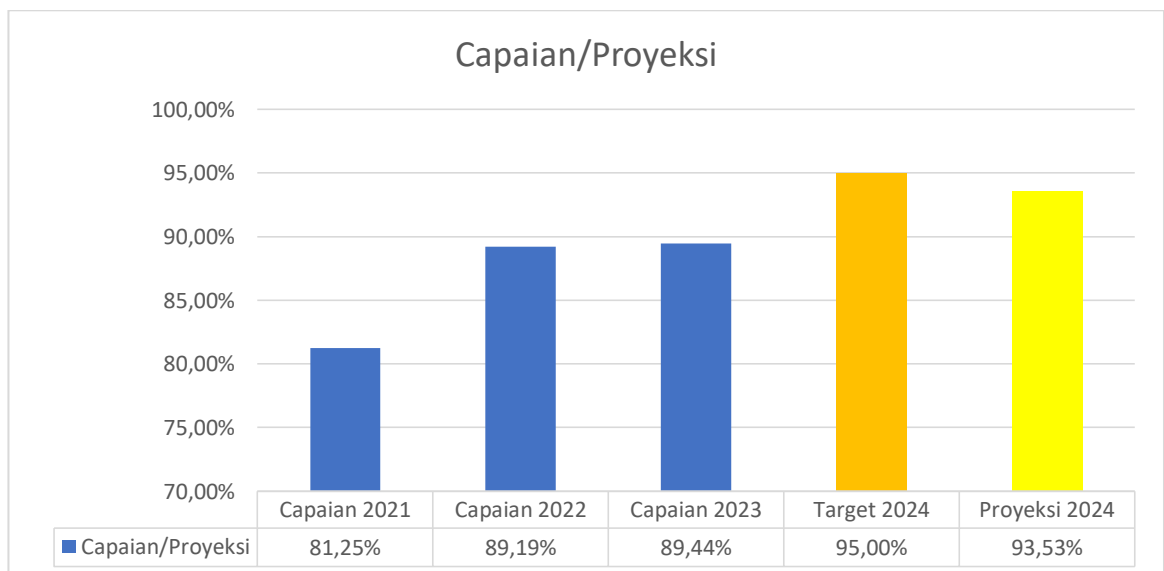
Apabila dibandingkan dengan persentase capaian peningkatan kompetensi ASN tertinggi yaitu KKP Manokwari sebesar 137%, KKP Biak sebesar 125%, KKP Poso sebesar 122.50%, dan, Capaian KKP Sorong berada pada urutan terakhir sebesar 89.44% . Grafik perbandingan capaian persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3. 46 Perbandingan Capaian Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya Dengan Satker Sejenis

2) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya dengan RAK 2020 – 2024

Meskipun dari tahun ke tahun capaian kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya terus mengalami peningkatan namun demikian apabila dibandingkan dengan target RAK tahun 2024, maka capaiannya masih di bawah target.



Grafik 3. 47 Perbandingan Realisasi Tahun 2020, 2021, 2023 dan Target Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya RAK Tahun 2020-2024

Adapun proyeksi capaian indikator pada tahun 2024 adalah 93,53% diperoleh penjumlahan antara capaian 2023 dengan persentase rata-rata capaian tahun 2021 s.d 2023. Nilai proyeksi masih di bawah target tahun 2024 yaitu 95 sehingga untuk mencapai target diperlukan upaya tindak lanjut yang spesifik dalam mengatasi kendala tahun 2023.

3) Perbandingan dengan target Renstra Kementerian Kesehatan

Apabila disandingkan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 maka kinerja persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja persentase pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan indikator persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional.

d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Tidak tercapainya target kinerja persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya tahun 2023 karena kurangnya motivasi pegawai yang belum tercapai target kompetensi untuk menambah pengetahuan di bidang lainnya, yang tidak sesuai dengan jabatan pegawai tersebut. Serta terkendala jaringan oleh pegawai kami yang berada di wilayah kerja khususnya pelatihan atau seminar yang dilaksanakan secara Daring.

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- 1) Mendorong ASN untuk mengikuti pelatihan baik melalui elearning, pelatihan secara klasikal maupun mengikuti seminar secara daring.
- 2) Menyebarkan informasi pelatihan atau seminar ke Group WA.
- 3) Menyiapkan anggaran untuk kegiatan peningkatan kompetensi ASN meskipun anggaran untuk peningkatan kapasitas ASN terbatas.

f. Kendala masalah yang dihadapi

Masih terdapat pegawai yang belum bisa mengikuti pelatihan jabatan fungsional yang dilaksanakan secara klasikal yang dibuka di akhir tahun karena:

- 1) Kurangnya motivasi pegawai yang belum tercapai target kompetensinya untuk menambah pengetahuan di bidang lainnya, yang tidak sesuai dengan jabatan pegawai tersebut.
- 2) Terkendala jaringan oleh pegawai kami yang berada di wilayah kerja, khususnya pelatihan atau seminar yang dilaksanakan secara Daring.

g. Pemecahan masalah

Menyebarkan motivasi kepada pegawai berupa reward (HOTM) jika mampu menyelesaikan JPL 20 ASN, serta menyiapkan anggaran yang memadai dan melakukan penjadwalan ulang pelatihan yang tidak terlaksana untuk di prioritaskan pada awal 2024 kepada pegawai secara merata.

h. Efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran. Hasil perhitungan Efisiensi berada pada range -20 s.d +20. -20 artinya tidak efisien sedangkan +20 artinya adalah efisien. Sedangkan nilai konversi efisiensi berada pada range 0-100%, disebut efisien bila NE sebesar 50%. Rumus untuk pengukuran efisiensi dan Nilai Efisiensi (NE) tersebut sebagai berikut:

1) Rumus Efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times Cki) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times Cki)} \times 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian Keluaran i

Efisiensi penggunaan sumber daya capaian indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya tahun 2023 adalah 11.08% dengan perhitungan sebagai berikut :

PAKi : 327.556.000
 RAKi : 306.088.366
 CKi : 89.44.%

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((327.556.000 \times 89.44\%) - 306.088366)}{\sum_{i=1}^n (327.556.000 \times 89.44\%)} \times 100\%$$

$$E = -0.0448 \times 100 \%$$

$$E = -4.48 \%$$

2) Rumus Nilai Efisiensi (NE)

$$\text{Nilai Efisiensi} = \frac{50}{100} + \left(\frac{\text{Efisiensi}}{20 \times 50} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= \frac{50}{100} + \left(\frac{E}{20 \times 50} \right) \\ &= \frac{50}{100} + \left(\frac{-0.0448}{20 \times 50} \right) \\ &= 38.8\% \end{aligned}$$

Didapatkan hasil Nilai Efisiensi pada indikator satu adalah sebesar **38.8%**.

3) Analisis Efisiensi

- a) Hasil perhitungan Efisiensi adalah -4.48% berada dibawah range 0 s.d +20 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator tujuh **TIDAK EFISIEN**.
- b) Indikator kinerja Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya terlaksana tidak efisien dengan nilai efisiensi sebesar 38.8%. Dengan anggaran 93.45% dapat mencapai

kinerja 89.44%. Nilai efisiensi kurang dari 50% pada indicator ini dipengaruhi oleh factor:

- Kurangnya motivasi pegawai yang belum tercapai target kompetensinya untuk menambah pengetahuan di bidang lainnya, yang tidak sesuai dengan jabatan pegawai tersebut.
- Terkendala jaringan oleh pegawai kami yang berada di wilayah kerja, khususnya pelatihan atau seminar yang dilaksanakan secara Daring.

8. INDIKATOR DELAPAN

PERSENTASE REALISASI ANGGARAN

a. Definisi Operasional

Defisi operasional indikator persentase realisasi anggaran adalah persentase yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundangundangan.

b. Rumus / Cara Perhitungan

Cara perhitungan indikator persentase realisasi anggaran yaitu jumlah realisasi anggaran dibagi jumlah pagu anggaran dikali 100%. Rumus / cara perhitungan indikator di atas yaitu:

$$\text{Persentase realisasi anggaran} = \frac{X}{y} \times 100\%$$

Dimana :

X = Jumlah realisasi anggaran

Y = Jumlah pagu anggaran

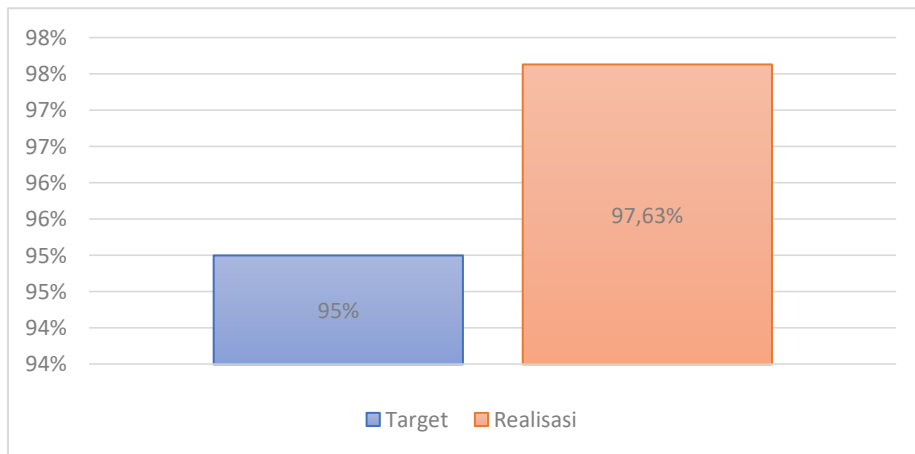
Berdasarkan rumus perhitungan di atas diperoleh hasil :

$$\text{Persentase Realisasi Anggaran 2023} = \frac{12,262,771,994}{12,559,814,000} \times 100\% = 97,63\%$$

Jadi capaian persentase realisasi anggaran KKP Kelas III Sorong pada tahun 2023 adalah sebesar 97,63%.

c. Capaian Indikator

Indikator Persentase Realisasi Anggaran tahun 2023 telah tercapai 97,63% dibandingkan target kinerja yang ditentukan yaitu 95%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,76%.

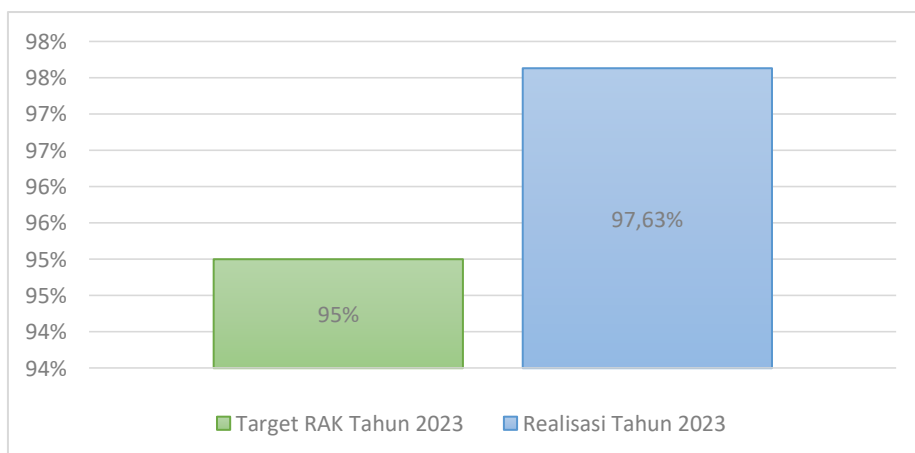


Grafik 3. 48 Perbandingan Realisasi Tahun 2020, 2021, 2023 dan Target Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya RAK Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran beberapa tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran tahun 2023 menurun jika dibandingkan realisasi tahun 2022. Realisasi persentase realisasi anggaran yang paling rendah adalah pada tahun 2020 sebesar 94,29% dan yang paling tinggi adalah tahun 2023 sebesar 98,43%.

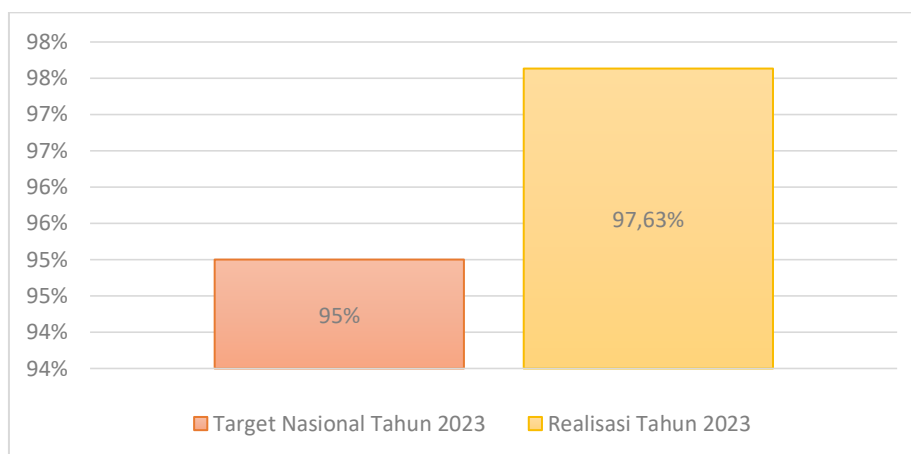
Grafik 3. 49 Realisasi Anggaran KKP Kelas III Sorong Tahun 2020 sampai dengan 2023

Jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Sorong tahun 2020-2024, capaian indikator ini telah melebihi target yang ditentukan yakni sebesar 95%.



Grafik 3. 50 Perbandingan Indikator Persentase Realisasi Anggaran KKP Kelas III Sorong dengan Target RAK Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan target kinerja nasional sesuai dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor PR.03.02/C.I/1142/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penambahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, capaian indikator ini telah mencapai target yang ditentukan tahun 2023 sebesar 95%.



Grafik 3. 51 Perbandingan Indikator Persentase Realisasi Anggaran KKP Kelas III Sorong dengan Target Nasional Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan KKP lain yang setara, capaian indikator ini lebih rendah jika dibandingkan capaian KKP Kelas I Surabaya sebesar 99,02%. Jika dibandingkan dengan KKP Kelas I Medan (88.24%) dan KKP Kelas I Soekarno Hatta (98.34%) capaian tahun ini lebih tinggi.

Grafik 3. 52 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Realisasi Anggaran di KKP Kelas III Sorong; KKP Kelas III Manokwari; KKP Kelas III Biak; dan KKP Kelas III Poso Tahun 2023

d. Upaya yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

Upaya/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai target yaitu :

1. Menyusun perencanaan anggaran dengan baik
2. Menyusun RPK dan RPD dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RPK dan RPD
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran

4. Melakukan evaluasi kegiatan dan menuangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Pada target dari indikator ini belum tercapai sesuai yang ditetapkan. Kegagalan ini disebabkan oleh:

1. Adanya dukungan SDM yang baik dalam mencapai target persentase realisasi anggaran
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran
3. Melakukan penyesuaian RPK dan RPD sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.

f. Kendala/Masalah yang Dihadapi

Untuk pengambilan anggaran bersumber PNBPN tidak optimal dikarenakan adanya kelebihan pengambilan anggaran PNBPN tahun 2022 sehingga mengurangi penggunaan tahun 2023.

g. Pemecahan Masalah

Untuk anggaran bersumber PNBPN pada tahun 2023 lebih teliti lagi dalam proses perceairan, dengan memperhitungan realisasi target yang ada, sehingga tidak terjadi lagi kelebihan pengambilan anggaran.

h. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 12.559.814.000,- dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

TABEL 3.15 Sumber Daya Anggaran KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan Pelayanan Keekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp. 1,825,853,000
2	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 10,733,961,000
Total		Rp. 12,559,814,000

TABEL 3.16 Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

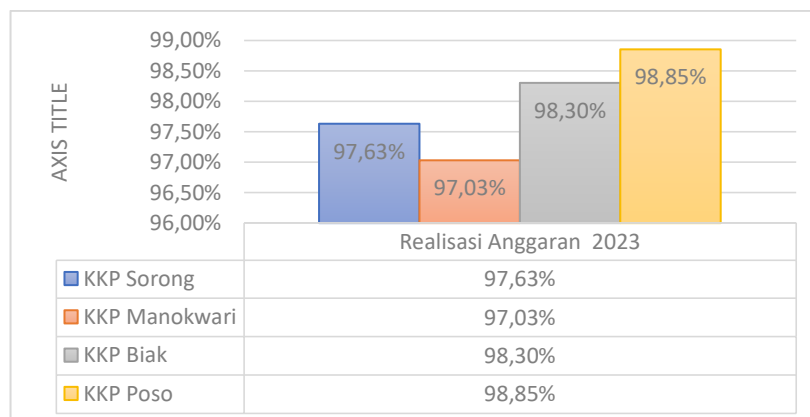
No.	Jenis Belanja	Jml Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Belanja Pegawai	Rp. 5,002,113,000	Rp. 4,980,664,169	99.57%
2	Belanja Barang	Rp. 6,225,358,000	Rp. 5,946,745,032	95.52 %
3	Belanja Modal	Rp. 1,332,343,000	Rp. 1,331,661,677	99.95%
Total		Rp. 12,559,814,000	Rp. 12,259,070,878	97.63 %

Dari tabel di atas diketahui bahwa serapan realisasi anggaran yang paling rendah adalah Belanja Barang yaitu 95,52% dan yang paling tinggi adalah Belanja Modal sebesar 99,95%.

TABEL 3.17 Realisasi Anggaran KKP Kelas III Sorong Tahun 2021 s.d 2023

Dari grafik di atas diketahui bahwa dari tahun 2021 ke 2022 alokasi anggaran KKP Kelas III Sorong mengalami penurunan, tetapi di tahun 2023 mengalami kenaikan kembali. Hal ini lebih dipengaruhi kepada ketersediaan anggaran belanja modal yang hanya tersedia pada anggaran tahun 2021 dan 2023. Realisasi anggaran pada tahun 2023 yaitu 97,63%, turun dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi anggaran terbesar pada tahun 2021 yaitu sebesar 98,66%.

TABEL 3.17 Realisasi Anggaran KKP Kelas III Sorong Tahun 2023 Dibandingkan KKP yang Setara (KKP Kelas III Manokwari, KKP Kelas III Biak dan KKP Kelas III Poso)



Jika dibandingkan dengan KKP lain yang setara, capaian indikator persentase realisasi anggaran KKP Kelas III Sorong lebih rendah jika dibandingkan capaian KKP Kelas III Poso sebesar 98.95% dan KKP Kelas III Biak sebesar 98,30%. Sedangkan KKP Kelas III Manokwari mendapatkan capaian indikator 97.03% dibawah capaian indikator KKP Kelas III Sorong.

TABEL 3. 15 Realisasi Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Satu

PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)	45,952,000	45,881,195	99.85 %	70,805
051	Koordinasi pelayanan kekarantinaan di pelabuhan/bandara/PI BD	45,952,000	45,881,195	99.85 %	70,805
051.0A	Bimtek/Monev ke wilayah kerja	45,952,000	45,881,195	99.85 %	70,805
QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	196,061,000	149,087,733	76.04 %	46,973,267
QAA.011	Pelayanan kesehatan haji (HS)	110,498,000	83,180,546	75.28 %	27,317,454
053	Pelayanan kesehatan haji di bandara - rp	110,498,000	83,180,546	75.28 %	27,317,454
053.0A	Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi	46,252,000	23,869,133	51.61 %	22,382,867
053.0B	Pertemuan evaluasi kesehatan haji di embarkasi	15,524,000	11,432,900	73.65 %	4,091,100
053.0C	Pertemuan Evaluasi penyelenggaraan haji di embarkasi	48,722,000	47,878,513	98.27 %	843,487
QAA.012	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS)	85,563,000	65,907,187	77.03 %	19,655,813
053	Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	85,563,000	65,907,187	77.03 %	19,655,813
053.0A	Pelayanan situasi Khusus pada hari raya keagamaan	85,563,000	65,907,187	77.03 %	19,655,813
QAH.017	Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	88,560,000	33,360,000	37.67 %	55,200,000
053	pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	88,560,000	33,360,000	37.67 %	55,200,000
053.0A	Pemeriksaan alat angkut, orang dan barang pada situasi KLB/wabah/KKM	24,300,000	5,100,000	20.99 %	19,200,000
053.0B	Tindakan pengendalian faktor risiko kesehatan masyarakat	9,000,000	8,100,000	90.00 %	900,000
053.0B	pada alat angkut orang dan barang	9,000,000	8,100,000	90.00 %	900,000
053.0C	Pengawasan faktor Risiko pada barang	49,500,000	14,400,000	29.09 %	35,100,000
053.0D	Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada situasi KI B/Wabah/KKM	5,760,000	5,760,000	100.00 %	0
QAH.U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS)	103,400,000	103,228,315	99.83 %	171,685
051	Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes	103,400,000	103,228,315	99.83 %	171,685
051.0A	Pemetaan	2,360,000	2,325,000	98.52 %	35,000
051.0B	Persiapan Bahan dan Alat	26,680,000	26,543,315	99.49 %	136,685
051.0C	Pemasangan Perangkat	73,560,000	73,560,000	100.00 %	0
051.0D	Identifikasi Tikus dan Pinjal	800,000	800,000	100.00 %	0
QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	19,200,000	19,200,000	100.00 %	0
051	Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD Kategori I	19,200,000	19,200,000	100.00 %	0
051.0A	tanpa sub komponen	19,200,000	19,200,000	100.00 %	0

QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	63,840,000	63,840,000	100.00 %	0
051	Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	63,840,000	63,840,000	100.00 %	0
051.0A	tanpa sub komponen	63,840,000	63,840,000	100.00 %	0
QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	26,880,000	25,980,000	96.65 %	900,000
051	Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	26,880,000	25,980,000	96.65 %	900,000
051.0A	tanpa sub komponen	26,880,000	25,980,000	96.65 %	900,000
QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	8,918,000	8,895,000	99.74 %	23,000
053	Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS - rp	8,918,000	8,895,000	99.74 %	23,000
053.0A	TANPA SUB KOMPONEN	8,918,000	8,895,000	99.74 %	23,000
QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	37,905,000	37,538,600	99.03 %	366,400
053	deteksi dini terduga TB - rp	37,905,000	37,538,600	99.03 %	366,400
053.0A	TANPA SUB KOMPONEN	37,905,000	37,538,600	99.03 %	366,400
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	229,313,000	223,383,686	97.41 %	5,929,314
RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	229,313,000	223,383,686	97.41 %	5,929,314
053	Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan - rp	229,313,000	223,383,686	97.41 %	5,929,314
053.0A	SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN VEKTOR	53,970,000	49,049,700	90.88 %	4,920,300
053.0B	SARANA DAN PRASARANA SANITASI LINGKUNGAN	50,940,000	49,973,600	98.10 %	966,400
053.0C	PENGADAAN OBAT-OBATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN	24,357,000	24,341,646	99.94 %	15,354
053.0D	PENGADAAN BAHAN/ALAT BAHAN MEDIS UNTUK PELAYANAN KESEHATAN	68,383,000	68,375,740	99.99 %	7,260
053.0E	PENGADAAN BAHAN ATAU ALAT NON MEDIS UNTUK PELAYANAN KESEHATAN	31,663,000	31,643,000	99.94 %	20,000

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi anggaran paling rendah terdapat pada kegiatan layanan pemeriksaan orang, barang dan alat angkut yaitu sebesar 37,67%. Terdapat dua sub kegiatan yang terealisasi dibawah 50% yaitu kegiatan pemeriksaan orang, barang dan alat angkut pada situasi KLB/wabah/KKM dan pengawasan factor risiko pada barang. Rendahnya serapan pada indicator tersebut dipengaruhi oleh situasi Pandemi COVID-19 tahun 2023 yang terus membaik sehingga pada bulan Juni 2023 Pemerintah secara resmi telah mencabut status Pandemi COVID-19 menjadi endemic. Pada pengawasan factor risiko pada barang rendahnya realisasi dipengaruhi karena rendahnya volume pengawasan jenazah/kerangka/abu jenazah pada tahun 2023. Sedangkan realisasi anggaran paling tinggi pada kegiatan layanan survei factor risiko penyakit DBD dan malaria yaitu 100%.

TABEL 3. 16 Realisasi Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Dua

QAH.016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	81,936,000	74,272,273	90.65 %	7,663,727
053	pengendalian faktor risiko lingkungan - rp	81,936,000	74,272,273	90.65 %	7,663,727
053.0A	pengawasan sanitasi TTU	32,400,000	31,650,000	97.69 %	750,000
053.0B	Pengawasan sanitasi Tempat pengolah Pangan (TPP)	9,846,000	9,843,050	99.97 %	2,950
053.0C	Pemeriksaan sampel makanan dan air di BTKL Ambon	39,690,000	32,779,223	82.59 %	6,910,777
QAH.U01	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan (HS)	144,000,000	144,000,000	100.00 %	0
053	Pelaksanaan kekarantinaan di pelabuhan penyeberangan - rp	144,000,000	144,000,000	100.00 %	0
053.0A	TANPA SUB KOMPONEN	144,000,000	144,000,000	100.00 %	0
QAH.U02	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara (HS)	57,600,000	57,598,500	100.00 %	1,500
052	Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara - rp	14,400,000	14,398,500	99.99 %	1,500
052.0A	TANPA SUB KOMPONEN	14,400,000	14,398,500	99.99 %	1,500
053	Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara - rp	43,200,000	43,200,000	100.00 %	0
053.0A	TANPA SUB KOMPONEN	43,200,000	43,200,000	100.00 %	0

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi anggaran paling rendah terdapat pada kegiatan layanan pengendalian factor risiko lingkungan yaitu sebesar 90,65%. Serapan pada kegiatan tersebut tidak maksimal dikarenakan sisa anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan sub kegiatan pemeriksaan sampel makanan dan air ke BTKL Ambon. Sedangkan realisasi anggaran pada kegiatan lain telah mencapai 100% realisasi.

TABEL 3. 17 Realisasi Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Tiga

QAH.016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	81,936,000	74,272,273	90.65 %	7,663,727
053	pengendalian faktor risiko lingkungan - rp	81,936,000	74,272,273	90.65 %	7,663,727
053.0A	pengawasan sanitasi TTU	32,400,000	31,650,000	97.69 %	750,000
053.0B	Pengawasan sanitasi Tempat pengolahan Pangan (TPP)	9,846,000	9,843,050	99.97 %	2,950
053.0C	Pemeriksaan sampel makanan dan air di BTKL Ambon	39,690,000	32,779,223	82.59 %	6,910,777
QAH.017	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	88,560,000	33,360,000	37.67 %	55,200,000
053	pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	88,560,000	33,360,000	37.67 %	55,200,000
053.0D	Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada situasi KLB/Wabah/KKM	5,760,000	5,760,000	100.00 %	0
QAH.U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS)	103,400,000	103,228,315	99.83 %	171,685
051	Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes	103,400,000	103,228,315	99.83 %	171,685
051.0A	Pemetaan	2,360,000	2,325,000	98.52 %	35,000
051.0B	Persiapan Bahan dan Alat	26,680,000	26,543,315	99.49 %	136,685
051.0C	Pemasangan Perangkap	73,560,000	73,560,000	100.00 %	0
051.0D	Identifikasi Tikus dan Pinjal	800,000	800,000	100.00 %	0
QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	19,200,000	19,200,000	100.00 %	0
051	Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD Kategori I	19,200,000	19,200,000	100.00 %	0
051.0A	tanpa sub komponen	19,200,000	19,200,000	100.00 %	0
QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	63,840,000	63,840,000	100.00 %	0
051	Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	63,840,000	63,840,000	100.00 %	0
051.0A	tanpa sub komponen	63,840,000	63,840,000	100.00 %	0
QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	26,880,000	25,980,000	96.65 %	900,000
051	Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	26,880,000	25,980,000	96.65 %	900,000
051.0A	tanpa sub komponen	26,880,000	25,980,000	96.65 %	900,000
RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	229,313,000	223,383,686	97.41 %	5,929,314
053	Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan - rp	229,313,000	223,383,686	97.41 %	5,929,314
053.0A	SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN VEKTOR	53,970,000	49,049,700	90.88 %	4,920,300
053.0B	SARANA DAN PRASARANA SANITASI LINGKUNGAN	50,940,000	49,973,600	98.10 %	966,400

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi anggaran paling rendah terdapat pada sub kegiatan penyelidikan epidemiologi pada situasi KLB/Wabah/KKM. Rendahnya realisasi anggaran pada sub kegiatan tersebut dipengaruhi sedikitnya sinyal KLB/Wabah/KKM yang diterima oleh petugas KKP Kelas III Sorong selama tahun 2023 sehingga anggaran tidak bisa terserap maksimal. Sedangkan realisasi anggaran pada kegiatan lain di indicator tiga telah mencapai >90% realisasi.

TABEL 3. 18 Realisasi Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Empat

Nilai Kinerja Anggaran		10,058,653,000	998,801,933	99,41%	58,851,067
	Layanan BMN	26,620,000	26,620,000	100 %	-
051	Pengelolaan BMN	26,620,000	26,620,000	100 %	-
	051.0A Penyusunan Laporan BMN	26,620,000	26,620,000	100 %	-
	051.0B Penyusunan RK BMN	13,310,000	13,031,592	97,91%	278,408
	Layanan Perkantoran	8,525,450,000	8,427,429,330	98,85%	98,020,670
001	Gaji dan Tunjangan	5,002,113,000	4,984,365,285	99,65%	17,747,715
	001.0A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5,002,113,000	4,984,365,285	99,65%	17,747,715
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,523,337,000	3,443,064,045	97.72 %	80,272,955
	002.0A Honor Pengelola Keuangan	164,688,000	152,274,000	92,46 %	12,414,000
	002.0B Pengadaan pakaian kerja sopir / pesuruh / keamanan	37,750,000	37,750,000	100.00 %	-
	002.0C Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan untuk ASN	79,550,000	63,974,700	80,42%	15,575,300
	002.0D Terlaksananya Perbaikan Kantor	94,530,000	90,077,524	95,29 %	4,452,476
	002.0E Pemeliharaan gedung dan halaman gedung kantor induk dan wilyahan kerja	516,336,000	516,211,455	99,98 %	124,545
	002.0F Tersedianya pakaian dinas lengkap para pegawai	74,000,000	72,000,000	97,30 %	2,000,000
	002.0G Terpeliharanya kendaraan roda 2	38,150,000	38,148,339	100 %	1,661
	002.0H Tersedianya keperluan sehari hari perkantoran	67,630,000	67,629,056	100%	900,044
	002.0I Terpeliharanya kendaraan roda 4	155,773,000	155,748,898	99,98 %	24,102
	002.0J Langganan Daya dan Jasa	168,606,000	158,918,800	94,25%	9,687,200

	002.0K	Tersedianya Jasa Satpam, Sopir, Pramubakti dan Kebersihan	2,027,714,000	1,993,162,973	98,30 %	34,551,027
	002.0L	Tersedianya Jasa Pos dan Giro	7,000,000	5,558,300	79,40 %	1,441,700
	002.0M	Belanja Sewa	91,610,000	91,610,000	100,00 %	-
	Layanan Sarana Internal		559,883,000	559,868,000	100%	15,000
	Layanan Sarana Internal		559,883,000	559,868,000	100%	15,000
	058.0A	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	559,883,000	559,868,000	100%	15,000
	Layanan Internal	Prasarana	772,460,000	771,793,677	99,91%	666,323
	051.0A	Pengadaan Lahan	682,460,000	681,793,677	99,90%	666,323
	052.0B	Pembangunan Pagar	90,000,000	90,000,000	100%	-
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		200,860,000	200,059,334	99,60 %	800,666
051	Rencana program pencegahan pengendalian dan manajemen penyakit dukungan		200,860,000	200,059,334	99,60 %	800,666
	051.0A	Penyusunan e renggar	39,930,000	39,357,682	98,57 %	572,318
	051.0B	Penyusunan RKAKL	79,860,000	79,637,879	99,72 %	222,121
	051.0C	Pembahasan dan Penelaahan usulan dokumen perencanaan dan revisi anggaran	53,240,000	53,238,525	100 %	104,075
	051.0D	Penyusunan RAK	27,830,000	27,825,248	99,98%	4,752

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi anggaran pada indicator ke empat paling rendah pada kegiatan layanan perkantoran yaitu 98,85%. Capaian realisasi per kegiatan pada indicator ke empat sudah sangat baik dengan rata-rata realisasi sebesar 99,61%.

TABEL 3. 19 Realisasi Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Lima

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		306,851,000	302,934,554	98,72 %	3,916,446
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	161,430,000	160,426,119	99,38 %	1,003,881
501	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	161,430,000	160,426,119	99,38 %	1,003,881
	501.0 A Penyusunan laporan pelaksanaan program	92,280,000	91,528,898	99,19 %	751,102
	501.0 B Penyusunan Laporan E money penganggaran	26,620,000	26,508,511	99,58 %	111,489
	501.0 C Penyusunan Laporan Tahunan Satker	1,000,000	998,00	99,80 %	2,000
	501.0 D Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program P2P	39,930,000	39,795,410	99,66 %	134,590
	501.0 E Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja	600,000	595,300	99,22 %	4,700
	501.0 F Evaluasi SAKIP	1,000,000	1,000,000	100%	-
	Layanan Manajemen Keuangan	145,421,000	142,508,435	98,00 %	2,912,565
051	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	145,421,000	142,508,435	98,00 %	2,912,565
	051.0 A Penyusunan Laporan Keuangan	54,740,000	54,547,927	99,65 %	192,073
	051.0 B Sosialisasi Peraturan dan Koordinasi pengelolaan PNBPN pada pihak internal dan eksternal UPT	53,240,000	53,049,927	99,64 %	190,073
	051.0 C Upaya penyelesaian LHP / Tuntutan Perbendaharaan dan ganti rugi	53,240,000	50,810,388	95,44 %	2,429,612

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi anggaran pada indicator ke lima paling rendah pada kegiatan layanan manajemen keuangan yaitu 98%. Capaian realisasi per kegiatan pada indicator ke lima sudah sangat baik dengan rata-rata realisasi sebesar 98,69%.

TABEL 3. 20 Realisasi Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Enam

Implementasi Kinerja WBK Satker		273,787,000	260,282,356	95.07 %	13,504,044
Layanan Hukum		40,430,000	40,013,711	98,97 %	416,289
05 1	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	40,430,000	40,013,711	98,97 %	416,289
	051.0 A Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing system	13,310,000	13,181,587	99,04 %	128,413
	051.0 B Advokasi Hukum dan bantuan hukum	13,310,000	13,039,824	97,97 %	270,176
	051.0 C Pengelolaan unit pengendalian gratifikasi	500,000	498,00	99,60 %	2,000
	051.0 D Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPNS Ditjen P2P	13,310,000	13,294,300	99,88 %	15,700
Layanan Hubungan Masyarakat		9,000,000	8,964,618	99,61 %	35,382
05 1	Pelayanan humas dan protokoler	9,000,000	8,964,618	99,61 %	35,382
	051.0 A Diseminasi/promosi informasi kegiatan	9,000,000	8,964,618	99,61 %	35,382
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		57,750,000	56,006,665	96,98 %	1,743,335
05 1	Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	57,750,000	56,006,665	96,98 %	1,743,335
	051.0 A Penyusunan dan Reviu dan Analisis Beban kerja, peta dan informasi jabatan	26,620,000	25,056,897	94,13 %	1,563,103
	051.0 B Penyusunan / Monev SOP AP UPT	13,310,00	13,131,523	98,66 %	178,477
	051.0 C Pembangunan Zona Integritas menuju satker WBK, Penguatan dan pendampingan assesment penilaian satker WBK/WBBM	17,320,000	17,318,245	99,99 %	1,755

	051.0 D	Rapat Internal layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Satker	500,000	500,000	100,00 %	-
Layanan Umum			137,352,000	126,902,262	92,39 %	10,449,738
051	Layanan umum dan perlengkapan		137,352,000	126,902,262	92,39 %	10,449,738
	051.0 A	Pengelolaan kantor berhias	41,540,000	40,649,364	97,86 %	8,980,636
	051.0 B	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	13,310,000	11,690,253	87,83 %	1,619,747
	051.0 C	Layanan Internet	75,252,000	68,287,645	90,75 %	6,964,355
	051.0 D	Penyediaan PAS Bandara dan Pelabuhan	7,250,000	6,275,000	86,25 %	975,000
Layanan Data dan Informasi			13,845,000	13,819,700	99,82 %	25,300
053	Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit		13,845,000	13,819,700	99,82 %	25,300
	053.0 A	Penyusunan Profil	13,845,000	13,819,700	99,82 %	25,300
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan			15,410,000	14,575,400	94,58 %	834,600
501	Penyelenggaraan Kearsipan		15,410,000	14,575,400	94,58 %	834,600
	501.0 A	Penyusunan Arsip di Lingkungan Ditjen P2P	15,410,000	14,575,400	94,58 %	834,600

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi anggaran pada indicator ke enam paling rendah adalah pada kegiatan layanan umum yaitu 92,39%. Capaian realisasi per kegiatan pada indicator ke enam sudah cukup baik dengan rata-rata realisasi sebesar 97,05%.

TABEL 3. 21 Realisasi Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Tujuh

Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya		327,556,000	306,088,366	93,45 %	21,467,634
Layanan Manajemen SDM Internal		54,740,000	54,306,767	99,21 %	433,233,000
	Layanan Manajemen SDM	54,740,000	54,306,767	99,21 %	433,233,000
055	Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	54,740,000	54,306,767	99,21 %	433,233,000

	055.0A	Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai	1,500,000	1,317,500	87,8 3%	182,500
	055.0B	Peningkatan kompetensi pegawai	53,240,000	52,989,267	99,5 3%	250,733
Layanan Manajemen SDM Internal			272,816,000	251,781,599	92,2 9%	21,034,401
	Pelatihan kesehatan		272,816,000	251,781,599	92,2 9%	21,034,401
053	Pelatihan bidang kesehatan - PNBP		272,816,000	251,781,599	92,2 9%	21,034,401
	053.0A	Peningkatan Kualitas SDM Teknis Sesuai Jenis Jabatan Fungsional	187,232,000	166,197,599	88,7 7%	21,034,401
	053.0B	On The JOP Training (OJT) Sinkronisasi Sinkarkes dan Simponi di Kota Sorong	85,584,000	85,584,000	100 %	-

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi anggaran pada indicator ke tujuh paling rendah adalah pada kegiatan layanan manajemen SDM internal yaitu 92,32%. Capaian realisasi per kegiatan pada indicator ke tujuh sudah cukup baik dengan rata-rata realisasi sebesar 95,7%.

h. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$E = \frac{(PAKi \times CKi) - RAKi}{(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Dimana :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimum efisiensi yang dicapai sebesar - 20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% sampai 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Dimana :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh hasil:

TABEL 3. Efisiensi Per Indikator Kinerja KKP Kelas III Sorong Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Cki	Efisiensi	Nilai Efisiensi (NE)	Kategori
1	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	820,029,000.00	710,394,529.00	86.63%	111.23%	22.12%	105.29%	Efisien
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	711,395,000.00	669,391,669.00	94.10%	102.04%	4.98%	62.46%	Efisien
3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	449,472,000.00	408,399,483.00	90.86%	105.26%	13.68%	84.20%	Efisien
4	Nilai Kinerja Anggaran	12,559,814,000.00	12,259,070,878.00	97.61%	95.21%	-2.51%	43.00%	Tidak Efisien
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	306,851,000.00	302,934,554.00	98.72%	94.65%	-4.30%	39.00%	Tidak Efisien
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	273,787,000.00	260,282,356.00	95.07%	111.38%	14.38%	87.00%	Efisien
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	327,556,000.00	306,088,366.00	93.45%	89.44%	-4.48%	38.80%	Tidak Efisien
8	Persentase Realisasi Anggaran	12,559,814,000.00	12,262,771,994.00	97.63%	101.50%	3.80%	59.52%	Efisien

Dari tabel diatas diketahui dari delapan indicator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat tiga indicator yang berdasarkan hasil perhitungan Nilai Efisiensi (NE) masuk dalam kategori tidak efisien. Adapun indicator tersebut adalah Nilai Kinerja Anggaran, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, dan Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya. Factor-faktor yang menyebabkan NE tidak efisien telah dijabarkan pada pembahasan masing-masing indicator di atas. Sedangkan indicator dengan NE paling tinggi adalah Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan program dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong kepada pimpinan (Direktur Jenderal P2P) dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong telah merealisasikan program dan kegiatan pada tahun 2023, dimana capaian sasaran program sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 yaitu "Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah". Hal ini di dukung dengan rata-rata persentase capaian kinerja KKP Kelas III Sorong tahun 2023 yang telah mencapai target indicator seperti tertuang pada Perjanjian Kinerja KKP Kelas III Sorong tahun 2023. Rata rata capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 101.50%, dimana dari tujuh indikator kinerja enam indikator mencapai target dan satu indikator masih di bawah target, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/plbdn tercapai 0,99 dari target 0,89 dengan persentase capaian kinerja 111,23%;
2. Indikator persentasi faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan tercapai 100% dari target 98% dengan persentase capaian kinerja 102,04%;
3. Indikator Indeks pengendalian faktor resiko di pintu masuk negara tercapai 1 dari target 0.95 dengan persentase capaian kinerja 105,26 %;
4. Indikator Nilai Kinerja Anggaran tercapai 82,84 dari target 87 dengan persentase capaian kinerja 95,21%;
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tercapai 89,92 dari target 95 dengan persentase capaian kinerja 94,65%;

6. Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker tercapai 85,77 dari target 77 dengan persentase capaian kinerja 111,39%;
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya, tercapai 80,56% dari target 90% sehingga capaian kerjanya 89,51%.
8. Persentase Realisasi Anggaran, tercapai 97,61% dari target 95% sehingga capaian kerjanya 102,74%.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja di tahun 2023 yaitu tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, adanya dukungan dari pimpinan, stake holder terkait dan dukungan masyarakat Pelabuhan/ bandara yang telah berperan dalam mendukung capaian indikator, optimalisasi sumber daya manusia yang ada melalui peningkatan kapasitas SDM, sarana prasarana yang mendukung, adanya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala sehingga permasalahan yang dihadapi di lapangan dapat diatasi, serta komitmen dengan instansi Lintas Sektor/Lintas Program melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi. Tentunya dalam upaya mencapai target realisasi pada masing-masing indikator, KKP Kelas III Sorong mendapati berbagai kendala. Adapun kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Beberapa pelabuhan di wilayah kerja KKP Sorong belum dilengkapi dengan thermal Scanner sehingga pemeriksaan suhu tubuh dilakukan secara manual.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedis yang memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kerja KKP Kelas III Sorong.
3. Sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan kesehatan lingkungan meliputi fasilitas penunjang laboratorium lingkungan dan entomologi belum memadai.
4. Belum terbentuknya forum Pelabuhan sehat di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong.
5. Kendaraan operasional ambulance tidak dimiliki oleh semua wilayah kerja KKP kelas III Sorong, sehingga pelayanan pasien meliputi antar jemput pasien dalam rujukan dan evakuasi korban kegawat daruratan kecelakaan laut tidak maksimal.

6. Kendaraan operasional vektor yang terbatas sehingga proses distribusi petugas dan peralatan dalam rangka pengendalian vector tidak dapat berjalan dengan maksimal.
7. Frekuensi pengangkutan sampah ketempat pembuangan akhir sampah sering mengalami keterlambatan sehingga volume sampah di tempat pembuangan sampah sementara di wilayah Pelabuhan/bandara meningkat.
8. Belum meratanya distribusi SDM kesehatan diantaranya jabatan Dokter, Perawat, Epidemiologi Kesehatan, Entomologi Kesehatan dan Sanitarian di masing-masing wilayah kerja KKP Kelas III Sorong yang dapat menghambat proses deteksi dini dan respon terhadap factor risiko penyakit.
9. Masih dijumpai penolakan tindakan pengendalian vector di lingkungan buffer Pelabuhan dan bandara oleh Masyarakat sekitar.
10. Terdapat sumber factor risiko perindukan lalat seperti pasar ikan, pasar buah dengan sanitasi pengelolaan sampah yang kurang di beberapa wilayah kerja Pelabuhan/Bandara.
11. Pada TPM di wilayah kerja Pelabuhan Rakyat, Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Raja Ampat memiliki bangunan yang bersifat semi permanen sehingga berpotensi terhadap cemaran fisik, keberadaan vector dan agen biologis lainnya.
12. Belum tersedianya laboratorium kesehatan lingkungan yang terakreditasi di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong sehingga pemeriksaan sampel lingkungan tidak bisa terlaksana dengan maksimal.
13. Tidak tercapainya capaian output kegiatan peningkatan kompetensi SDM dikarenakan target pada DIPA terlalu besar
14. Pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana PNBK tidak terserap secara optimal dikarenakan terdapat kelebihan penggunaan pada tahun 2022 sehingga menjadi pengurang pada tahun 2023.
15. Tidak tercapainya capaian output kegiatan peningkatan kompetensi SDM dikarenakan target pada DIPA terlalu besar

16. Pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana PNBPN tidak terserap secara optimal dikarenakan terdapat kelebihan penggunaan pada tahun 2022 sehingga menjadi pengurang pada tahun 2023.
17. Pihak wajib bayar dalam penyelesaian LHP sudah bertugas di satker lain.
18. Masih terdapat pegawai yang belum bisa mengikuti pelatihan jabatan fungsional yang dilaksanakan secara klasikal yang dibuka di akhir tahun karena keterbatasan anggaran pelatihan.

B. Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut perbaikan pada tahun 2023 yaitu:

1. Mengusulkan penambahan thermal scanner dalam perencanaan anggaran dan mengoptimalkan penggunaan thermometer digital di Pelabuhan wilayah kerja KKP Kelas III Sorong.
2. Mengusulkan penambahan ambulance standar karantina dan kendaraan operasional vektor untuk menunjang kegiatan deteksi faktor risiko dipintu masuk negara.
3. Mengoptimalkan pelayanan petugas medis/paramedis yang ada sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
4. Menganalisa kembali terhadap beban kerja sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam pengusulan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) baik medis maupun paramedis di tahun berikutnya untuk penempatan di masing-masing wilker sesuai kebutuhan sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan lebih optimal.
5. Mengusulkan penghapusan peralatan laboratorium lingkungan dan entomologi yang telah rusak berat untuk selanjutnya dilakukan pengusulan pengadaan pada anggaran tahun berikutnya.
6. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait di wilayah Pelabuhan untuk pembentukan forum Pelabuhan sehat di wilayah kerja KKP Kelas III Sorong.
7. Mengusulkan penambahan SDM kesehatan baik melalui formasi CPNS umum maupun menambah tenaga PPPK.

8. Melakukan pengendalian/penyemprotan lalat secara rutin setiap bulan di lokasi pembuangan sampah sementara mengacu pada hasil survey vector dan binatang pembawa penyakit.
9. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor di Pelabuhan dan Bandara dalam mengatur pengelolaan sampah untuk menekan perkembang biakan lalat.
10. Melakukan koordinasi dengan tokoh Masyarakat dan pemberian KIE tentang pentingnya pengendalian vector penyakit sebelum tindakan.
11. Advokasi kepada pihak pasar terkait dengan pengelolaan sampah sesuai standar dengan tidak menimbun sampah basah >24 jam serta melakukan pengendalian vector lalat secara rutin.
12. Diseminasi informasi hasil pemeriksaan TPM kepada pengelola Pelabuhan terkait dengan factor risiko konstruksi bangunan TPM sehingga menjadi pertimbangan perencanaan pengelola dalam memperbaiki konstruksi bangunan TPM pada tahun-tahun berikutnya.
13. Pengusulan anggaran pemeriksaan sampel lingkungan (air bersih dan makanan) di laboratorium terpadu terdekat dengan lokasi KKP Kelas III Sorong.
14. Untuk lebih memperhatikan lagi perhitungan pegawai yang akan ditingkatkan kompetensinya
15. Realisasi anggaran bersumber PNBPN harus sejalan dengan penerimaan PNBPN, sehingga tidak terjadinya kelebihan pengambilan.
16. Diperlukan koordinasi dengan Pihak KPPN mengenai langkah-langkah dalam meningkatkan nilai deviasi halaman III DIPA.
17. Mengupayakan Optimalisasi Penyerapan Anggaran berupa belanja barang dan belanja modal sesuai dengan RPK dan RPD Satker
18. KKP kelas III Sorong setiap bulan membuat billing untuk pembayaran LHP dan mengirimkan ke Bendahara satker tempat wajib bayar bertugas, serta melakukan kontrol bahwa LHP tersebut diangsur secara lancar.

19. Menyebarkan motivasi kepada pegawai berupa reward (HOTM) jika mampu menyelesaikan JPL 20 ASN, serta menyiapkan anggaran yang memadai dan melakukan penjadwalan ulang pelatihan yang tidak terlaksana untuk di prioritaskan pada awal 2024 kepada pegawai secara merata.